BP3OKP
BADAN PENGARAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
PROVINSI PAPUA SELATAN

PAPUA CERDAS
Mencerdaskan Papua,
Membangun Masa Depan

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA CERDAS BP3OKP PAPUA SELATAN

Bersinergi Mewujudkan Papua Selatan Cerdas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan



KOLABORASI
Bersama membangun Papua Selatan

AKSELERASI
Mempercepat inovasi dan pelayanan

INOVASI
Melahirkan gagasan dan solusi baru

BERDAMPAK
Memberi manfaat nyata untuk masyarakat

PERIODE BULAN
AGUSTUS
2026

Sekretariat BP3OKP
Provinsi Papua Selatan
Merauke

www.bp3okp.papuaselatan.go.id

#PapuaCerdas
Cerdas Membangun
Papua Sela

L E M B A R P E N G E S A H A N

LAPORAN HASIL KEGIATAN

POKJA PAPUA CERDAS BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN

BULAN AGUSTUS 2026

PROGRAM PERCEPATAN MISI PAPUA CERDAS

Pengembangan Sekolah Terbuka, Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari, Pengembangan Sekolah Berpola Asrama, Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

Laporan ini telah diperiksa, dievaluasi, dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan bulanan Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan.

Merauke, 01 September 2026
Penyusun Laporan,
Anggota Pokja Papua Cerdas
BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 19703082005011013

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

BADAN PENGARAH PAPUA • PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pokja Papua Cerdas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan Bulan Agustus Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap berbagai kebijakan, program, dan kegiatan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Selatan. Selama bulan Juli 2026 telah dilaksanakan berbagai kegiatan strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh agama, masyarakat, serta mitra pembangunan untuk memperkuat sinergi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, infrastruktur, serta implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.

Melalui laporan ini disajikan tujuan kegiatan, hasil yang dicapai, output strategis, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut yang diharapkan menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten, BP3OKP, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, Bappenas, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan selama periode pelaporan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan laporan maupun pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.

Merauke, 01 September 2026
Penyusun

DAFTAR ISI

L E M B A R P E N G E S A H A N i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Maksud dan Tujuan..... 1
1.1.1 Maksud 1
1.1.2 Tujuan 1
1.2 Ringkasan Kelembagaan..... 1
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan 1
1.2.2 Definisi 2
1.2.3 Struktur Kelembagaan 2
1.2.4 Tugas dan Fungsi 2
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan 3
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 4
1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN..... 6
2.1 Pelaksanaan Kegiatan..... 6
BAB III PENUTUP..... 58
3.1 Kesimpulan..... 58
3.2 Saran..... 59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Agustus 2026 menggambarkan pelaksanaan tugas Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan dalam menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap kebijakan dan program percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan telah melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan selama bulan Agustus 2026 yang mencakup empat klaster utama, yaitu: (1) koordinasi dan perencanaan pembangunan, (2) pengawasan tata kelola keuangan dan aset daerah, (3) partisipasi dalam agenda kenegaraan dan kebangsaan, serta (4) pengembangan SDM, akademik, dan kelembagaan. Seluruh kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan penguatan tata kelola pemerintahan, dengan menjalankan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) secara konsisten.

Rangkaian kegiatan menghasilkan sejumlah output strategis. Dalam persiapan Kongres Bahasa Daerah, telah disepakati penyelenggaraan FGD Pra-Kongres di Merauke dengan melibatkan 30 peserta dari Dinas Pendidikan, Disoparap, Balai Bahasa, Bappeda, praktisi budaya, dan KSBN, serta telah tersedia pemetaan awal potensi budaya di empat kabupaten. Dalam pengawasan Dana Otsus, teridentifikasi perlunya percepatan penyusunan RAB/RAP Perubahan APBD, peningkatan kualitas pelaporan, dan pengurangan SILPA/SILVA. Sementara itu, evaluasi DOB menunjukkan Papua Selatan telah membentuk 22 perangkat daerah dengan 243 jabatan definitif, menyerahkan aset tahap I senilai Rp150 miliar, dan membangun 125 km infrastruktur jalan. Namun demikian, masih ditemukan 33 jabatan pimpinan yang kosong serta pengelolaan aset yang belum optimal.

Berdasarkan serangkaian kegiatan, teridentifikasi lima isu strategis utama yang menjadi tantangan pembangunan di Papua Selatan. Pertama, rendahnya kapasitas perencanaan dan pelaporan yang tercermin dari tingkat keselarasan usulan Musrenbang Otsus dengan RAPPP yang masih rendah (57,49% di provinsi dan 20-50% di kabupaten). Kedua, penyerapan anggaran yang belum menjangkau kampung dan wilayah 3T karena anggaran masih terpusat di tingkat provinsi/kabupaten. Ketiga, pengelolaan aset daerah yang lemah dengan dokumen dan legalitas belum lengkap serta data masih dikelola menggunakan Microsoft Excel. Keempat, keterbatasan ASN dengan 33 jabatan pimpinan masih kosong. Kelima, potensi pengurangan TKD yang dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik.

Berdasarkan seluruh output dan rekomendasi, ditetapkan tujuh langkah prioritas. Pertama, menyelenggarakan FGD Pra-Kongres Bahasa Daerah di Merauke sebagai forum penyelarasan konsep dan delegasi empat kabupaten. Kedua, mengintensifkan pendampingan teknis kepada kabupaten/kota dalam penyusunan RAB/RAP Perubahan APBD. Ketiga, mendorong implementasi sistem data terintegrasi berbasis cloud untuk mengatasi kendala rotasi ASN. Keempat, menertibkan dan menginventarisasi seluruh aset daerah dengan koordinasi lintas sektor (BPN, KPK, masyarakat adat). Kelima, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otsus hingga tingkat kampung dan wilayah 3T. Keenam, memperkuat koordinasi antara BP3OKP, BPKP, dan APIP dalam pengawasan preventif. Ketujuh,

memanfaatkan pelantikan pejabat baru sebagai momentum penguatan koordinasi dan advokasi kebijakan.

Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan telah menunjukkan peran ganda yang efektif sebagai pelaksana program strategis sekaligus unsur pengawas dan pendukung dalam berbagai forum strategis. Seluruh kegiatan di bulan Agustus 2026 tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menghasilkan output strategis, identifikasi tantangan, dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Ke depan, Pokja berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta menjadi motor penggerak dalam memastikan program-program pembangunan—khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kesejahteraan—dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua Selatan, khususnya Orang Asli Papua.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Maksud dari laporan bulanan ini disusun agar mempermudah POKJA dalam menginventarisir kegiatan Program Kerja yang tersusun dalam kalender tahunan dan rencana kegiatan setiap bulannya yang telah dilaksanakan dan juga menginventarisir pemenuhan kegiatan yang bersumber dari kegiatan kemitraan POKJA Papua Cerdas BPP-PPS.

1.1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaporan bulanan dari Kelompok Kerja Papua Cerdas Badan Pengarah Propinsi Papua Selatan, adalah :

1. Menyajikan catatan kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP PPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK dalam bulan berjalan.
2. Mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK dalam membantu Anggota BPP PPS.
3. Memberikan masukan strategis untuk penguatan koordinasi lintas OPD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

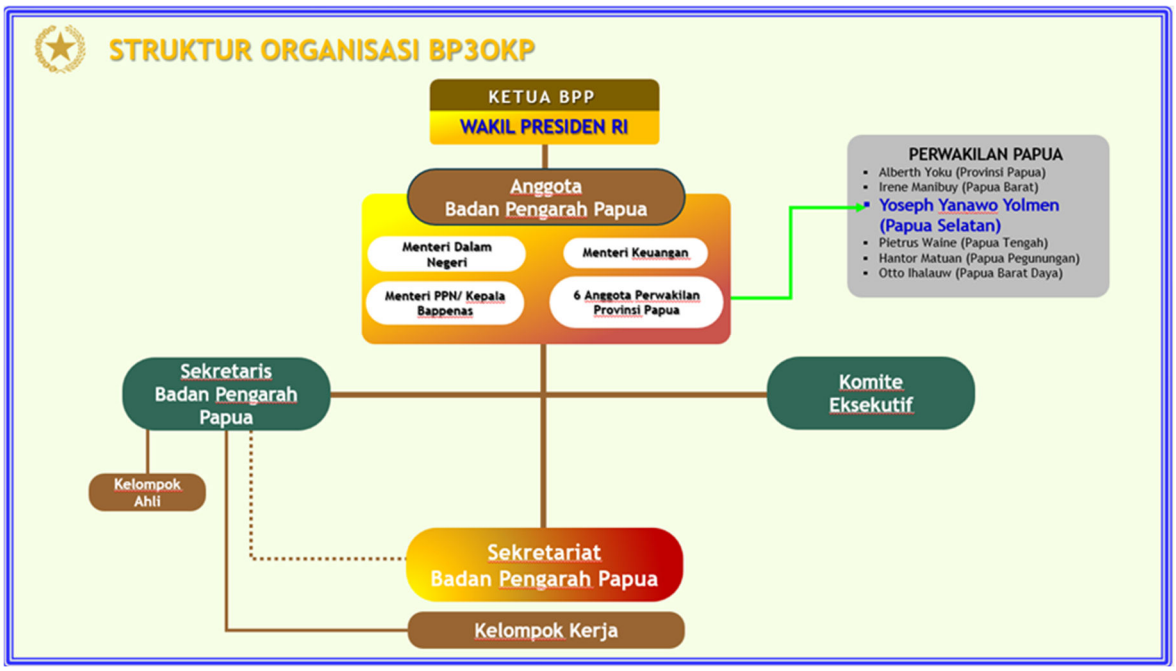
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
5) Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
6) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
7) Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua

8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

1.2.2 Definisi

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



1.2.4 Tugas dan Fungsi

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
   a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
   b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi

Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;

c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan\ pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan palaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut :

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan
- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi
- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
- Menyusun basis data yang komprehensif dan *up-to-date* terkait hasil evaluasi dan monitoring program Otsus di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program
- Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Pokja Papua Cerdas.
- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal
- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1, di bawah :

Tabel 1. 1 Daftar SDM sesuai struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO.	UNIT KERJA & JABATAN			JLH ORG
1.	Pimpinan	:	Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA)	:	1. POKJA Papua Sehat	2 org
		:	2. POKJA Papua Cerdas	2 org
		:	3. POKJA Papua Produktif	2 org
		:	4. POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung Administratif dan substantif	:	TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsin Papua Salatan	5 org
4.	Staf/ Karyawan	:	Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org

1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP, tersedia sarana dan prasarana utama pada skretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, diantaranya dpat dilihat pada Tabel 1. 2 Di bawah.

Tabel 1. 2 Daftar sarana & prasarana pada sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

NO.	URAIAN	SAT	VOL
1.	Bangunan Kantor	gdg	1
2.	Ruangan		

NO.	URAIAN	SAT	VOL
a.	Front office	Ruang	1
b.	Ruang Rapat	Ruang	1
c.	Ruang Tamu	Ruang	1
d.	Ruang Kerja Pimpinan/ Anggota BP3OKP PPS	Ruang	1
e.	Ruang kerja Anggota POKJA dan Staff	Ruang	1
f.	Ruang Dapur	Riang	1
g.	Kamar Mandi ^ Toilet	Ruang	1
3.	Peralatan dan Perlengkapan		
1)	Meja dan Kursi Kerja Pimpinan (3 kursi + 1 meja)	set	1
2)	Meja dan kursi sofa ruang pimpinan	set	1
3)	Meja dan kursi sofa ruang tamu	set	1
4)	Meja Anggota POKJA dan Staf	unit	1
5)	Kursi POKJA dan Staf	unit	6
6)	Meja dan kursi Front Office	set	1
7)	Smart TV	unit	2
8)	TIK Satrlink (digunakan bersama)	unit	1
9)	Laptop	unit	4
10)	Printer (Tidak bisa digunakan)	unit	1
11)	Hardisk Eksternal 1 TB	unit	1
12)	Kitchen set	Set	1
13)	Kulkas	unit	1
14)	Dispenser	Unit	1
15)	Kompor Listrik	unit	1
16)	ATK	tersedia	
17)	Peralatan Makan	tersedia	

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas pada laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada **triwulan 2 ||Mei tahun 2026,** dengan rincian kegiatan yang terurai pada Tabel 2. 1 berikut.

Tabel 2. 1 Rincian Kegiatan BP3OKP Pokja Papua Cerdas Triwulan 2 tahun 2026
Bulan Juni 2026

Kegiatan 1. Persiapan Kongres Bahasa Daerah

Kegiatan 1	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Senin, 03 Agustus 2026
	**Dasar Pelaksanaan Kegiatan** ☑ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 ☐ Surat Tugas/Sumber Email: Sekretariat BPP Papua ☒ Insidentil : Menerima Kunjungan Tim Komite Seni Budaya Nasional (KSBN) Papua Selatan **Surat Tugas** Surat Tugas Nomor . .. Tanggal ……

Lokasi Kegiatan	:	**Ruang Kerja Ketua BP3OKP Provinsi Papua Selatan**
Judul Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan bersama Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Merauke
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Koordinasi persiapan menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026
Pelaksana Kegiatan	:	Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan/ Sumber Dokumen	:	Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan, dan Pengurus Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Kabupaten Merauke.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas kesiapan Provinsi Papua Selatan dalam menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026 di Jayapura, serta menjalin sinergi dengan KSBN Merauke dalam pelestarian bahasa dan budaya daerah.
Hasil/output Kegiatan	:	
▪ **Output Strategis**	1.	Terbangunnya kesepahaman awal mengenai keterlibatan KSBN dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kongres Bahasa dan Seni Budaya Nasional.

	2. Papua Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang akan menampilkan kekayaan bahasa dan budaya secara representatif melalui keterlibatan empat kabupaten. 3. Disepakati perlunya pelaksanaan Pra-Kongres/FGD di Merauke sebagai forum penyelarasan konsep, materi, dan representasi daerah sebelum kongres nasional. 4. Disepakati untuk segera melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kongres pada bulan Agustus 2026 sebagai forum persiapan menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026 di Jayapura. 5. FGD Pra-Kongres akan menghadirkan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Balai Bahasa, Balai Guru Penggerak (BGTK), Bappeda, praktisi budaya, dan KSBN Merauke. 6. Estimasi jumlah peserta FGD Pra-Kongres sebanyak 30 orang.
▪ **Output Koordinasi**	1. Teridentifikasinya kebutuhan koordinasi intensif antara: a. Kementerian; b. Balai Bahasa; c. Pemerintah Provinsi Papua Selatan; d. Pemerintah Kabupaten; e. KSBN dan pemangku kepentingan budaya lainnya. 2. Diperlukan pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif agar informasi mengenai undangan, jadwal, dan pembagian tugas dapat tersampaikan secara cepat.
▪ **Output Perencanaan Kegiatan**	1. Disepakati bahwa jadwal pelaksanaan masih menunggu keputusan resmi dari panitia pusat, namun rentang waktu 20–26 menjadi acuan sementara. 2. Kegiatan direncanakan meliputi: a. Seminar/Kongres Bahasa; b. Presentasi makalah budaya; c. Pameran/stan budaya; d. Pertunjukan seni dan budaya; e. Pra-kongres sebagai forum penyusunan materi.
▪ **Output Representasi Papua Selatan**	1. Telah tersedia pemetaan awal mengenai: a. suku-suku besar; b. potensi budaya; c. tokoh adat; d. tokoh agama; e. komunitas seni; f. keterwakilan perempuan.

	2. Data tersebut akan disusun menjadi dokumen representasi resmi Papua Selatan untuk disampaikan kepada panitia pusat.
▪ **Output Pengembangan Program**	1. Disepakati perlunya pengembangan budaya yang tidak berhenti pada penyelenggaraan acara, tetapi dilanjutkan melalui: a. riset budaya; b. pendidikan vokasi; c. inkubasi seni; d. pelatihan; e. pemasaran produk budaya dan UMKM. 2. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.
▪ **Output Pendanaan**	1. Teridentifikasi kebutuhan penyusunan mekanisme pendanaan yang jelas melalui: a. APBD Provinsi; b. APBD Kabupaten; c. Balai Bahasa; d. CSR; e. dukungan kementerian. 2. Penggunaan anggaran diarahkan agar transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan program budaya.
▪ **Output Tindak Lanjut**	Pertemuan menghasilkan beberapa tindak lanjut utama, yaitu: 1. Memperoleh konfirmasi resmi mengenai jadwal, rundown, dan undangan dari panitia pusat. 2. Menyusun daftar keterlibatan KSBN beserta pembagian peran dan jumlah peserta. 3. Melakukan pemetaan kontak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan budaya di empat kabupaten Papua Selatan. 4. Menyelenggarakan FGD/Pra-Kongres di Merauke pada akhir Agustus. 5. Menyiapkan profil budaya Papua Selatan sebagai bahan presentasi dan pameran pada kongres nasional.
▪ **Kesimpulan Output Pertemuan**	Pertemuan menghasilkan arah kebijakan dan rencana kerja awal untuk mendukung partisipasi Papua Selatan dalam Kongres Bahasa dan Seni Budaya Nasional. Fokus utama yang disepakati meliputi penguatan koordinasi antarinstansi, finalisasi jadwal dan mekanisme pelaksanaan, penyiapan representasi budaya Papua Selatan yang komprehensif, serta pengembangan program budaya yang berkelanjutan

	melalui riset, pendidikan vokasi, inkubasi seni, dan dukungan pendanaan yang terstruktur. Seluruh hasil pertemuan akan menjadi dasar penyelenggaraan Pra-Kongres di Merauke sekaligus persiapan delegasi Papua Selatan menuju kongres tingkat nasional.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:
	1. Melaksanakan rapat koordinasi internal untuk menyusun strategi partisipasi Papua Selatan pada Kongres Bahasa dan Seni Budaya Nasional. 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian, Balai Bahasa, dan Panitia Nasional guna memperoleh jadwal, rundown, surat undangan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. 3. Menyusun Tim Koordinasi Papua Selatan yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas seni budaya. 4. Melakukan pemetaan potensi bahasa, seni, budaya, komunitas, sanggar, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta pelaku budaya pada empat kabupaten di Papua Selatan. 5. Menyusun Profil Budaya Papua Selatan yang memuat bahasa daerah, seni pertunjukan, kearifan lokal, sejarah, dan identitas budaya sebagai bahan presentasi pada kongres. 6. Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kongres di Merauke untuk menyatukan konsep, materi, serta delegasi Papua Selatan. 7. Menyusun materi ilmiah mengenai pelestarian bahasa daerah, pendidikan budaya, dan penguatan identitas budaya Papua Selatan. 8. Menyeleksi dan menetapkan delegasi Papua Selatan yang akan mengikuti kongres nasional secara representatif dari seluruh kabupaten. 9. Menyiapkan materi pameran budaya, stan promosi, dokumentasi, produk budaya, serta pertunjukan seni yang mewakili Papua Selatan. 10. Menginventarisasi kebutuhan anggaran dan mengoordinasikan dukungan pendanaan melalui APBD, Balai Bahasa, CSR, dan kementerian terkait. 11. Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam bidang riset, dokumentasi bahasa daerah, digitalisasi budaya, dan pendidikan vokasi budaya.

	12. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan Kongres Bahasa dan Seni Budaya Nasional.
▪ **Prioritas Tindak Lanjut Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan**	1. Mengintegrasikan pelestarian bahasa dan budaya daerah ke dalam program Papua Cerdas sebagai bagian dari penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal. 2. Mendorong dokumentasi bahasa daerah dan budaya lokal sebagai sumber belajar di satuan pendidikan. 3. Mengembangkan jejaring kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas budaya. 4. Menyiapkan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengenai penguatan pendidikan budaya dan bahasa daerah. 5. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan FGD Pra-Kongres dan memastikan keterwakilan seluruh kabupaten.
▪ **Prioritas Tindak Lanjut KSBN Papua Selatan**	1. Menjadi koordinator penyusunan materi budaya Papua Selatan untuk Kongres Nasional. 2. Menyusun profil budaya, bahasa daerah, seni pertunjukan, dan komunitas budaya Papua Selatan. 3. Mengoordinasikan sanggar seni, pelaku budaya, dan tokoh adat sebagai delegasi daerah. 4. Menyiapkan pameran budaya, pertunjukan seni, dan materi promosi budaya Papua Selatan. 5. Mengembangkan program pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan, inkubasi seni, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya.
▪ **Prioritas Tindak Lanjut Provinsi Papua Selatan**	1. Membentuk Tim Koordinasi Provinsi untuk persiapan Kongres Bahasa dan Seni Budaya yang melibatkan OPD terkait, KSBN, Balai Bahasa, BP3OKP, perguruan tinggi, tokoh adat, dan komunitas budaya. 2. Melaksanakan rapat koordinasi lintas perangkat daerah guna menyusun rencana kerja, pembagian tugas, dan jadwal persiapan. 3. Berkoordinasi dengan Kementerian dan Balai Bahasa untuk memperoleh jadwal resmi, rundown, mekanisme pelaksanaan, serta kebutuhan dukungan daerah. 4. Menetapkan delegasi resmi Papua Selatan yang mewakili empat kabupaten secara proporsional dan inklusif. 5. Menyelenggarakan Pra-Kongres/FGD Provinsi di Merauke sebagai forum penyelarasan konsep, materi, dan representasi budaya Papua Selatan.

6. Menyusun Profil Budaya Papua Selatan yang memuat bahasa daerah, seni, adat istiadat, sejarah, dan potensi budaya sebagai bahan promosi pada kongres nasional.
7. Mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD Provinsi serta mengoordinasikan dukungan pendanaan dari kementerian, CSR, dan mitra pembangunan.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pameran budaya, pertunjukan seni, serta promosi produk ekonomi kreatif Papua Selatan pada kongres nasional.
9. Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pendokumentasian bahasa daerah, riset budaya, serta digitalisasi warisan budaya.
10. Menyusun kebijakan pelestarian bahasa dan budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan penguatan identitas budaya Papua Selatan.

Berdasarkan prioritas tindaklanjut di atas, perlu adanya program prioritas guna meninadklanjuti secara konkrit dalam pencapaian yang berkelanjutan untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah Provinsi Papua Selatan. Adapun usulan program prioritas Provinsi Papua Selatan sebagai berikut :

A. Penguatan Tata Kelola

- Membentuk Tim Koordinasi Daerah.
- Menetapkan mekanisme koordinasi lintas OPD.
- Memastikan komunikasi aktif dengan Kementerian dan Balai Bahasa.

B. Penguatan Representasi Budaya

- Menyiapkan delegasi dari empat kabupaten.
- Menyusun profil budaya Papua Selatan.
- Menyiapkan materi pameran, pertunjukan seni, dan promosi budaya.

C. Penguatan Kapasitas Daerah

- Menyelenggarakan Pra-Kongres/FGD Provinsi.
- Melibatkan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas budaya.
- Mendorong dokumentasi bahasa daerah dan inventarisasi warisan budaya.

D. Penguatan Pendanaan

- Menyediakan dukungan APBD.
- Mengoptimalkan sinergi pendanaan dengan kementerian, Balai Bahasa, dan CSR.
- Menjamin transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

E. Penguatan Keberlanjutan

- Mengembangkan riset dan pendidikan vokasi budaya.
- Mendorong pembinaan pelaku seni dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
- Menjadikan hasil kongres sebagai dasar penyusunan program pelestarian bahasa dan budaya di Papua Selatan.

Dari usulan program prioritas di atas, adanya outcome yang diharapkam adalah :

- Pemerintah Provinsi Papua Selatan diharapkan mampu membangun koordinasi lintas sektor yang kuat, mempersiapkan partisipasi Papua Selatan secara optimal pada Kongres Bahasa dan Seni Budaya Nasional, serta menghasilkan program pelestarian bahasa dan budaya yang berkelanjutan.
- Melalui langkah ini, kekayaan budaya dari empat kabupaten dapat terdokumentasi, dipromosikan, dan dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, penguatan identitas daerah, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Seluruh prioritas tersebut selaras dengan kebutuhan koordinasi, persiapan representasi daerah, dan pengembangan budaya berkelanjutan.

Dokumentasi :









Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PPS

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng | **Jaswadi, S.Pd.,M.Pd**
NIP. 19703082005011013

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg…2

Kegiatan 2. Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus

Kegiatan 2	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Rabu, 05 Agustus 2026 Pukul : 11.00—13.00 WIT



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- ☑ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
- ☒ Undangan : Zoom Meeting Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
- ☐ Insidentil Internal:

Surat Tugas Nomor .

Lokasi Kegiatan :

Ruang Kerja Anggota Pokja BPP PPS
Meeting ID: 812 0474 4035
Passcode: Otsus26

Judul Kegiatan	:	Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026.
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP PPS, Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026
Pelaksana Kegiatan	:	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Produktif, Pemprov, Pemkab Se-Papua Raya

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kolaborasi SHEK Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026
Hasil/output Kegiatan	:	Berdasarkan hasil rapat Zoom, fokus utama pemerintah adalah mempercepat penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun 2026, meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan manfaat dana benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua. Kendala utama saat ini bukan lagi regulasi, melainkan implementasi di daerah, terutama keterlambatan penyusunan dokumen, validasi data, dan pelaporan realisasi.
Ringkasan Strategis bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan	**A. Isu Strategis**	
	a. Memimpin percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap II dan DTI sesuai target pemerintah pusat. b. Mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan antara provinsi dan kabupaten. c. Memastikan seluruh kabupaten memenuhi persyaratan administrasi penyaluran dana tepat waktu. d. Meminimalkan SILPA/SILVA melalui pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program.	
	B. Prioritas Strategis	
	a. Mengoordinasikan percepatan penyusunan RAB, RAP Perubahan APBD, dan validasi dokumen. b. Melaksanakan monitoring mingguan terhadap realisasi penyaluran dan capaian output. c. Memastikan penggunaan rekening khusus Dana Otsus sesuai ketentuan. d. Memimpin evaluasi lintas kabupaten untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi.	
Ringkasan Strategis bagi Pemerintah Kabupaten	A. **Isu Strategis**	
	a. Memenuhi seluruh persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap II. b. Mempercepat penyusunan dan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan. c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar capaian output sejalan dengan realisasi anggaran. d. Mengurangi keterlambatan pelaporan yang berpotensi memengaruhi alokasi tahun berikutnya.	
	B. **Prioritas Strategis**	

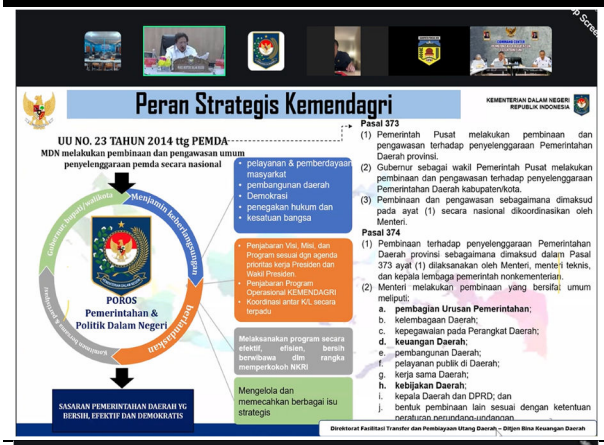
	a. Menyelesaikan seluruh dokumen RAB dan RAP Perubahan APBD. b. Memperbaiki kualitas tagging kegiatan dan pelaporan. c. Memastikan seluruh program memiliki indikator output yang terukur. d. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap serapan anggaran.
Ringkasan Strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	**A. Isu Strategis** a. OPD merupakan pelaksana utama program Otsus sehingga bertanggung jawab atas kualitas output. b. Keterlambatan administrasi OPD menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran dana. c. Masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja program. **B. Prioritas Strategis** a. Mempercepat penyusunan dokumen pendukung penyaluran. b. Memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. c. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPD dan sistem informasi lainnya. d. Menyusun laporan realisasi secara tepat waktu dan akurat.
Ringkasan Strategis bagi APIP (Inspektorat)	**A. Isu Strategis** a. APIP diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara preventif melalui pendampingan dan reviu, bukan hanya pemeriksaan administratif. b. Risiko utama meliputi manipulasi dokumen, penggunaan dana di luar ketentuan, dan lemahnya pengendalian internal. **B. Prioritas Strategis** a. Melaksanakan reviu atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Otsus. b. Memberikan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan RAB dan RAP Perubahan. c. Melakukan audit kepatuhan terhadap penggunaan Dana Otsus. d. Mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Ringkasan Strategis bagi BP3OKP Papua Selatan	**A. Isu Strategis** Sebagai lembaga yang bertugas mengarahkan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP memiliki peran strategis dalam memastikan Dana Otsus menghasilkan dampak nyata terhadap

	peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), terutama pada sektor prioritas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur
	B. Prioritas Strategis
	a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) pelaksanaan program Otsus. b. Melakukan monitoring terhadap kesesuaian penggunaan Dana Otsus dengan kebijakan nasional dan daerah. c. Menyampaikan rekomendasi strategis kepada Gubernur mengenai percepatan penyaluran dan peningkatan kualitas belanja Otsus. d. Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, APIP, dan OPD. e. Mendorong penggunaan indikator kinerja berbasis outcome sehingga manfaat Dana Otsus dapat diukur secara nyata.
Isu Prioritas Bersama	Seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian pada beberapa isu utama berikut: 1. Percepatan penyelesaian RAB dan RAP Perubahan APBD. 2. Percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap II. 3. Peningkatan kualitas pelaporan fisik dan keuangan. 4. Penguatan interoperabilitas sistem informasi perencanaan dan keuangan. 5. Pengurangan SILPA/SILVA melalui perencanaan yang lebih akurat. 6. Penguatan fungsi pengawasan APIP secara preventif. 7. Peningkatan kualitas capaian output agar sebanding dengan realisasi anggaran. 8. Monitoring dan evaluasi berkala antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Kesimpulan Strategis	Hasil rapat menegaskan bahwa keberhasilan percepatan penyaluran Dana Otsus tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pencairan anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, sinkronisasi lintas pemerintahan, akuntabilitas pelaksanaan program, dan pencapaian output yang terukur. Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu memimpin koordinasi lintas sektor, pemerintah kabupaten dan OPD harus mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi serta pelaksanaan program, APIP memperkuat pengawasan berbasis pendampingan, dan BP3OKP menjalankan fungsi strategis melalui sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi agar Dana Otsus memberikan manfaat yang optimal bagi Orang Asli Papua dan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.

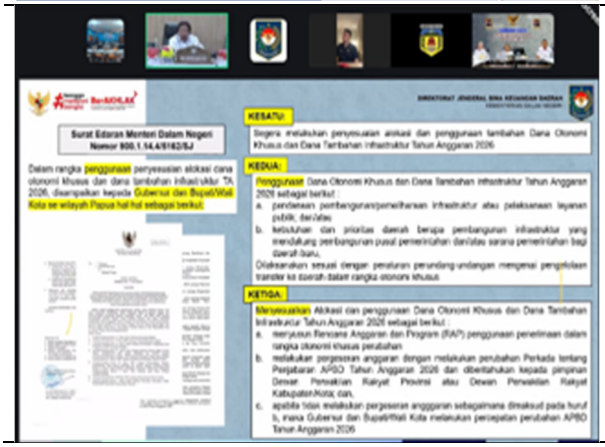
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	Berdasarkan Hasil Rapat Zoom Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Papua Selatan		1. Memimpin percepatan penyelesaian persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap II di seluruh kabupaten. 2. Mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan antara provinsi dan kabupaten. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi keuangan dan capaian output. 4. Memastikan penggunaan rekening khusus Dana Otsus serta penerapan mekanisme tagging sesuai ketentuan. 5. Memfasilitasi percepatan penyusunan RAP Perubahan APBD dan RAB sebagai dasar pencairan dana.
Pemerintah Kabupaten		1. Segera menyelesaikan seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap II. 2. Mempercepat penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan secara lengkap dan tepat waktu. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan program agar capaian output sebanding dengan realisasi anggaran. 4. Mengendalikan SILPA/SILVA melalui perencanaan dan pelaksanaan yang lebih efektif.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		1. Menyusun dan memvalidasi RAB serta RAP Perubahan APBD sesuai ketentuan. 2. Memperbaiki kualitas data, tagging kegiatan, dan pelaporan melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. 3. Memastikan seluruh kegiatan memiliki indikator output dan outcome yang terukur. 4. Melaksanakan percepatan penyerapan anggaran sesuai target nasional.
APIP (Inspektorat)		1. Melaksanakan review dan pendampingan terhadap dokumen persyaratan penyaluran Dana Otsus. 2. Memperkuat pengawasan preventif terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. 3. Mengidentifikasi risiko manipulasi dokumen, penyimpangan penggunaan dana, dan kelemahan pengendalian internal. 4. Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada kepala daerah dan OPD secara berkala.
BP3OKP Papua Selatan		1. Melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus. 2. Mengawal keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam penggunaan Dana Otsus. 3. Menyampaikan rekomendasi strategis kepada Gubernur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

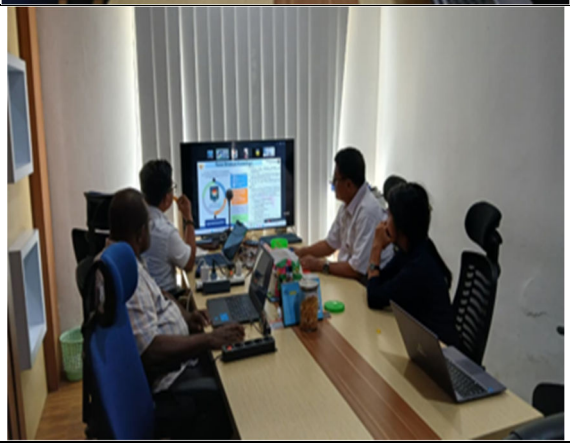
	4. Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, APIP, dan perangkat daerah guna mengatasi hambatan pelaksanaan program. 5. Mendorong penguatan indikator kinerja berbasis hasil (outcome) sehingga manfaat Dana Otsus dapat dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua (OAP).
Rekomendasi Umum	1. Mempercepat penyelesaian RAB, RAP Perubahan APBD, dan seluruh dokumen persyaratan penyaluran. 2. Memperkuat interoperabilitas sistem perencanaan dan keuangan untuk mendukung validasi serta pelaporan otomatis. 3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh OPD. 4. Mengoptimalkan fungsi pengawasan APIP melalui pendekatan pendampingan dan mitigasi risiko. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran dana, realisasi anggaran, dan capaian output. 6. Menyusun roadmap peningkatan tata kelola Dana Otsus secara berkelanjutan agar penyaluran lebih tepat waktu, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan serta kesejahteraan Orang Asli Papua.

Dokumentasi









Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PPS

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 19703082005011013

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yoseph Yanawe Tolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg…3

Kegiatan 3. HUT ke 1 Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora

Kegiatan 3	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Senin, 10 Agustus 2026 Pukul : 19.00-Selesai WIT
	**Dasar Pelaksanaan Kegiatan** ☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 ☒ Undangan : Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora Sekretariat Umum ☐ Insidentil : Surat Tugas Nomor . **Lokasi Kegiatan :** **Lapangan Komando Daerah Militer XXIV/ Mandala Trikora**

Judul Kegiatan	:	HUT Ke 1 Kodam XXIV/MT dan Brigif TP 83/Bugodi Tahun 2026
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP, Anggota Pokja Papua Cerdas, dan Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Kolaborasi Peran Pertahanan Keamanan dan Kebersamaan dalam peningkatanan Kesejahteraan Masayarakat
Pelaksana Kegiatan	:	Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Forkopimda Provinsi Papua Selatan, dan empat Kabupaten, serta seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Peringatan HUT Ke 1 Kodam XXIV/ Mandala Trikora
Hasil/output Kegiatan	:	
Hasil output merupakan Sambutan	1.	Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Papua Selatan dalam mendukung stabilitas dan

dari Gubernur Papua Selatan dan Pangdam Mandala Trikora		kesejahteraan, terutama melalui peran Kodam 24 Mandala Trikora. Momen peringatan hari ulang tahun pertama dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengharapan akan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa bagi wilayah dan warga Provinsi Papua Selatan. 2. HUT ini bukan hanya menjadi perayaan dan hiburan, tetapi juga sarana memperkuat motivasi dan komitmen prajurit Kodam 24 Mandala Trikora dalam menjalankan tugasnya di Papua Selatan. 3. Dengan semangat "Kenali, Datangi, Layani," Kodam berupaya membangun hubungan erat dan sinergi dengan masyarakat serta mengoptimalkan bantuan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Selatan. 4.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. Bersinergi dan bersatu padu dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua Selatan

Dokumentasi



Ramah Tamah dan Panggung Hiburan Pada HUT Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas
BP3OKP PPS

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yoseph Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 19703082005011013

Next Keg…4

Kegiatan 4. Rapat Paripurna

Kegiatan 4	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Senin, 10 Agustus 2026 Pukul : 19.00-Selesai WIT
	**Dasar Pelaksanaan Kegiatan** ☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 ☒ Undangan : Undangan Rapat Paripurna dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, perihal Undangan Rapat ☐ Insidentil : Surat Tugas Nomor . **Lokasi Kegiatan :** **Ruang Rapat Utama DPR Papua Selatan, Kawasan Pusat Pemerintah Papua Selatan, KTM Salor - Distrik Kurik, Merauke**

Judul Kegiatan	:	Rapat Paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc (Hari Pertama)
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPR Papua Selatan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dan Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Produktif BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	:	Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Sekretaris Daerah, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, unsur Forkopimda (Pangdam XXIV Mandala Trikora, Dankodaeral XI Merauke, Danlanud J.A Dimara Merauke, Kapolda Papua), Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan, para Staf Ahli dan Asisten Gubernur, Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan, serta pimpinan Perangkat Daerah/OPD lingkup Provinsi Papua Selatan sesuai daftar undangan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc, sebagai bagian dari tugas Pokja Papua Cerdas mewakili BP3OKP Papua Selatan.
Hasil/output Kegiatan	:	
Hasil output merupakan Sambutan dari Gubernur Papua Selatan dan Pangdam Mandala Trikora		1. Rapat Paripurna dibuka secara resmi, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. 2. Sambutan Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, SH, yang pada intinya menyampaikan bahwa Rapat Paripurna diselenggarakan dalam rangka

	pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Perda Komisi Hukum Ad Hoc, dan mengajak seluruh peserta mengikuti pembahasan secara aktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 3. Sambutan Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, yang pada intinya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rapat Paripurna serta menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pembahasan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc untuk mendukung penguatan tata kelola hukum di Provinsi Papua Selatan. 4. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Komisi Hukum Ad Hoc disampaikan oleh Dr. Safaruddin, ST, MT. 5. Rangkaian acara pembukaan ditutup dengan doa. 6. Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan (Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dan Pokja Produktif Marthinus Kendom, SP., MP.) hadir dan mengikuti jalannya Rapat Paripurna.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**: Rekomendasi** 1. Melanjutkan mengikuti Rapat Paripurna pada hari kedua, Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 10.00 WIT di Ruang Sidang DPR Papua Selatan, Salor, Merauke. 2. Mencermati perkembangan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc sebagai bahan masukan BP3OKP Papua Selatan. 3. Melaporkan hasil rapat kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.

Dokumentasi



Suasana penyampaian sambutan pada pembukaan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan, Salor, Merauke.



Suasana Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc.

	
Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dari Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan mengikuti Rapat Paripurna.	Perwakilan Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Selatan menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua Selatan.

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas
BP3OKP PPS

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yosep Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg. … 5

Kegiatan 5. Rapat Paripurna hari ke 2

Kegiatan 5	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Selasa, 11 Agustus 2026 Pukul : 19.00-Selesai WIT



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- ☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
- ☒ Undangan : Undangan Rapat Paripurna dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, perihal Undangan Rapat (rangkaian hari kedua, Senin s.d. Selasa, 10 s.d. 11 Agustus 2026)
- ☐ Insidentil :

Surat Tugas Nomor .

Lokasi Kegiatan :

		Ruang Rapat Utama DPR Papua Selatan, Kawasan Pusat Pemerintah Papua Selatan, KTM Salor - Distrik Kurik, Merauke
Judul Kegiatan	:	Rapat Paripurna DPR Papua Selatan Hari Kedua: Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur Papua Selatan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Menghadiri dan mengikuti kelanjutan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dan Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	:	Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Sekretaris Daerah, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, unsur Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan beserta fraksi-fraksi, para Staf Ahli dan Asisten Gubernur, Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan, serta pimpinan Perangkat Daerah/OPD lingkup Provinsi Papua Selatan sesuai daftar undangan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengikuti agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Papua Selatan serta Jawaban Gubernur Papua Selatan atas pandangan umum tersebut, sebagai kelanjutan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc.
Hasil/output Kegiatan	:	
Hasil output merupakan Sambutan dari Gubernur Papua Selatan dan Pangdam Mandala Trikora		1. Skors Rapat Paripurna dicabut oleh Ketua DPR Papua Selatan, dan sidang dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Usmum Fraksi-Fraksi DPR Papua Selatan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc. 2. Pemandangan umum disampaikan secara berurutan oleh juru bicara masing-masing fraksi, yaitu: a. Fraksi PDI Perjuangan, dengan juru bicara Paskalis Letsoin; b. Fraksi NasDem, dengan juru bicara Simon Salle; c. Fraksi Gerindra (gabungan Partai Gerindra dan PKB) d. Fraksi Golkar; e. Fraksi Keadilan dan Persatuan (gabungan PKS dan PPP); f. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera g. Utusan Khusus Afirmasi. 3. Secara umum, mayoritas fraksi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Selatan atas

	capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 4. Selain apresiasi, beberapa fraksi turut menyampaikan catatan dan sorotan, di antaranya terkait pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta penanganan stunting yang dinilai masih berjalan lambat, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. 5. Setelah rehat makan siang, sidang dilanjutkan pukul 14.00 WIT dengan agenda Jawaban Gubernur Papua Selatan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, sebagai tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap pandangan, saran, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: **Rekomendasi** 1. Mendokumentasikan poin-poin pandangan umum fraksi dan jawaban Gubernur sebagai bahan referensi BP3OKP Papua Selatan dalam mendukung tindak lanjut kebijakan daerah. 2. Mencermati tindak lanjut catatan fraksi terkait pengelolaan SiLPA dan percepatan penanganan stunting, khususnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Pokja Papua Cerdas. 3. Melaporkan hasil Rapat Paripurna hari pertama dan kedua secara menyeluruh kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.

Dokumentasi



Suasana sidang lanjutan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan hari kedua di Ruang Sidang DPR Papua Selatan, Salor, Merauke.



Asisten 1 Mewakili Gubernur pada Rapat Paripurna hari kedua.



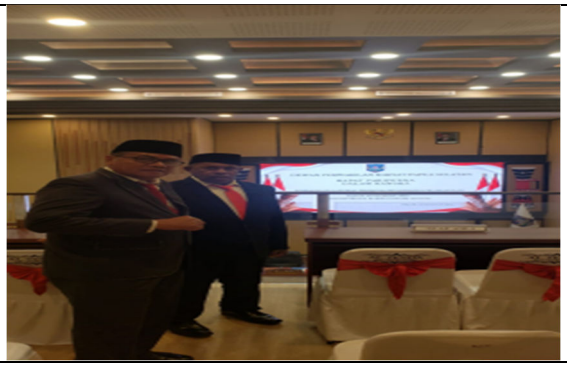
Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan mengikuti jalannya sidang dari ruang peserta..



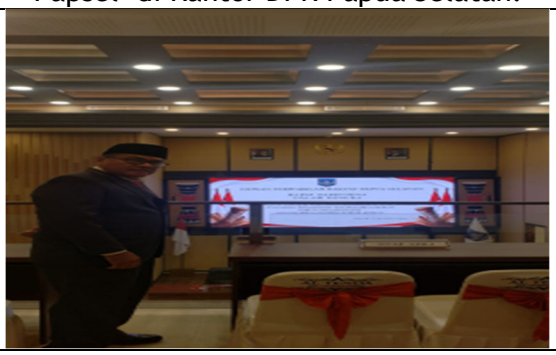
Suasana ruang sidang dengan layar agenda Rapat Paripurna, Salor, 11 Agustus 2026.



Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan bersama Asisten 1 Setda Papsel di Kantor DPR Papua Selatan.



Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan di lokasi Rapat Paripurna, Salor, 11 Agustus 2026.



Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan Saat menghadiri Rapat Paripurna hari kedua

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas
BP3OKP PPS

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999902401171457257

Next Keg.6

Kegiatan 6. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan

Kegiatan 4	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Selasa, 11 Agustus 2026 Pukul : 09.00 – Selesai WIT



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- ☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
- ☒ Undangan/Surat : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
- ☐ Insidentil :

Surat Tugas Nomor . ….. Tanggal ……

Lokasi Kegiatan :

Swiss-Belhotel Merauke Jalan Raya Mandala No. 49, Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Judul Kegiatan	:	Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, dan Papua Sehat serta Daftar Undangan Terlampir (link : https://drive.google.com/file/d/1z9mBqGSOXpPmoX0qvRnNLalL7Hro3hpb/view?usp=sharing)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua Selatan.
■ **Tujuan Utama**	:	1. Mengukur progres pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur. 2. Menilai pelaksanaan peraturan, tata kelola, dan pembentukan perangkat daerah. 3. Verifikasi penegasan batas wilayah dan penyerahan aset. 4. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil/output Kegiatan	:	**Evaluasi dilakukan pada sembilan aspek utama yang menjadi indikator keberhasilan dan tantangan pelaksanaan otonomi baru di Papua Selatan**
Pelaksanaan dan Temuan Kunci		1. Penegasan Batas Wilayah dan Tata Ruang a. Provinsi Papua Selatan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua yang dibagi menjadi tiga provinsi baru.

b. Penegasan batas wilayah antar provinsi dan kabupaten/kota penting untuk menghindari konflik, terutama di kawasan perbatasan.
c. Sudah dilakukan survei dan pembuatan peta batas serta penyesuaian batas laut sampai 33.120 km^2, mencakup 61 titik batas antar kabupaten.
d. Tata ruang wilayah telah ditetapkan melalui Perda Provinsi Nomor 3 Tahun 2025.

2. Pembentukan Perangkat Daerah dan ASN
   a. Papua Selatan telah membentuk 22 perangkat daerah.
   b. Terdapat 243 jabatan definitif, sisanya masih dijabat pelaksana tugas atau kosong, termasuk 33 jabatan pimpinan.
   c. Pengisian ASN masih perlu dioptimalkan agar sesuai dengan formasi dan pendidikan, khususnya menyelesaikan status ganda atau tumpang tindih ASN yang pindah dari kabupaten/kota ke provinsi DOB.
   d. Pembentukan dan pengisian keanggotaan MRP telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan stabil.
3. Pelaksanaan APBD dan Pelaporan Keuangan
   a. Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai jadwal dengan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
   b. Pembahasan APBD dan pertanggungjawaban berjalan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang.
   c. Belanja daerah dan pengelolaan keuangan sudah menunjukkan kemajuan, meski penghitungan kebutuhan anggaran untuk pemprov DOB masih perlu disesuaikan dengan dinamika pengelolaan pemerintahan baru.
4. Penyerahan Aset dan Dokumentasi Hukum
   a. Penyerahan barang milik daerah dari provinsi induk (Papua) ke Papua Selatan sudah terlaksana tahap pertama dengan nilai sekitar Rp150 miliar, namun sebagian aset masih dalam proses tahap kedua senilai sekitar Rp2,4 triliun.
   b. Terdapat kendala berupa aset yang secara fisik sudah rusak berat sehingga ada pengajuan penghapusan aset namun perlu proses administrasi dengan KPK dan BPN.
   c. Penyerahan aset meliputi tanah, bangunan, jalan, dan dokumen sertifikat yang menjadi dasar kepemilikan dan pembelian oleh pemerintah provinsi baru.
   d. Pemerintah kabupaten Merauke dan lain-lain juga menunjang proses hibah tanah dan bangunan bernilai puluhan miliar rupiah sebagai dukungan terhadap Papua Selatan.

	5. Infrastruktur dan Pelayanan Publik a. Infrastruktur jalan telah dibangun sepanjang 125 km di empat kabupaten cakupan provinsi dan akan bertambah dengan 15 ruas lagi. b. Pembangunan kantor Gubernur dan fasilitas DPRP sudah selesai dan berfungsi. c. Beberapa proyek penyediaan air minum (SPAM), rumah susun ASN, pelabuhan kecil di distrik, dan sarana pendidikan juga telah dilaksanakan. d. Fokus utama adalah mendekatkan layanan kepada masyarakat serta mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang merata. 6. Hibah Dana dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah a. Pemerintah kabupaten Merauke berkomitmen melakukan hibah ke pemerintah provinsi Papua Selatan senilai Rp20 miliar, meskipun realisasi sepanjang 2023 berjalan secara bertahap. b. Kebutuhan koordinasi dan dukungan pemerintah provinsi terhadap hibah dana untuk pembayaran kewajiban daerah juga mendapat perhatian. c. Realisasi dana hibah dari kabupaten lain turut memperkuat likuiditas dan pembangunan provinsi.
Tantangan dan Isu Strategis	1. Banyak ASN belum terisi definitif dengan jabatan kosong atau pelaksana tugas, sehingga perlu percepatan rekruitmen. 2. Pengelolaan aset menghadapi kendala administratif terkait dokumen dan kondisi fisik aset. 3. Masalah batas wilayah dan perbatasan antar daerah memerlukan koordinasi lintas kabupaten dan pemerintah pusat. 4. Kewenangan pendidikan menengah dan pengelolaan keuangan masih menjadi isu penting antara provinsi dan kabupaten/kota. 5. Pengurangan dana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dikhawatirkan berdampak pada sektor kesehatan dan pelayanan publik. 6. Regulasi dan dukungan pusat terutama terkait BPJS dan pendanaan kesehatan perlu penyesuaian agar lebih responsif kebutuhan daerah Papua Selatan. 7. Pemutakhiran data kemiskinan dan kesehatan semakin akurat seiring sistem pendataan yang lebih intensif, walaupun angka sering terlihat naik karena faktor pemetaan yang lebih valid.
Status Skor Evaluasi Kinerja DOB Papua Selatan	1. Banyak ASN belum terisi definitif dengan jabatan kosong atau pelaksana tugas, sehingga perlu percepatan rekruitmen.

	2. Pengelolaan aset menghadapi kendala administratif terkait dokumen dan kondisi fisik aset. 3. Masalah batas wilayah dan perbatasan antar daerah memerlukan koordinasi lintas kabupaten dan pemerintah pusat. 4. Kewenangan pendidikan menengah dan pengelolaan keuangan masih menjadi isu penting antara provinsi dan kabupaten/kota. 5. Pengurangan dana TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dikhawatirkan berdampak pada sektor kesehatan dan pelayanan publik. 6. Regulasi dan dukungan pusat terutama terkait BPJS dan pendanaan kesehatan perlu penyesuaian agar lebih responsif kebutuhan daerah Papua Selatan. 7. Pemutakhiran data kemiskinan dan kesehatan semakin akurat seiring sistem pendataan yang lebih intensif, walaupun angka sering terlihat naik karena faktor pemetaan yang lebih valid.
Dampak dan Harapan Kedepan	Dari hasil evaluasi ini, beberapa dampak strategis yang diharapkan tercapai adalah: 1. Penguatan kewajiban dan tanggung jawab DOB guna mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Peralihan fokus dari pembangunan kelembagaan menuju optimalisasi hasil pembangunan yang berdampak langsung. 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih stabil dan akuntabel. 4. Peningkatan kualitas layanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. 5. Terwujudnya komunikasi yang sinergis antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam penyelesaian masalah administratif dan teknis. 6. Penyelesaian segera masalah aset dan batas wilayah sebagai dasar pengembangan ekonomi dan tata kelola sumber daya. 7. Program kesehatan yang lebih efektif dengan dukungan anggaran dan regulasi dari pemerintah pusat yang memperhatikan kondisi khusus daerah Papua Selatan.
Catatan Tambahan dan Pendapat Para Pemangku Kepentingan	1. Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan komitmen hibah dana secara bertahap dan koordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Majelis Rakyat Papua (MRP) dan perangkat adat berjalan dengan baik dan menjadi mitra dalam pengawasan pelaksanaan otonomi. 3. Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR RI memberikan arahan agar sinergi koordinasi antar tingkat pemerintahan terus diperkuat, serta mendorong percepatan penyelesaian indikator yang tertunda.

	4. Masyarakat dan OPD agar aktif dalam penyusunan data yang valid dan pelaporan transparan untuk mendukung evaluasi berkelanjutan.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:
	1. Provinsi Papua Selatan sudah melaksanakan sebagian besar amanat perundang-undangan pemekaran dengan kemajuan signifikan dalam penegasan batas wilayah, tata ruang, pembentukan perangkat daerah, dan pembangunan infrastruktur. 2. Pengelolaan ASN dan optimalisasi perangkat daerah masih perlu percepatan dan konsistensi pengisian jabatan strategis. 3. Penyelesaian dan pengakuan aset aslinya masih menghadapi kendala dokumentasi dan administrasi sehingga peran fasilitasi pusat serta koordinasi dengan KPK dan BPN sangat dibutuhkan. 4. Hibah dana dari kabupaten pendukung harus cepat direalisasikan agar pembangunan dan operasional provinsi dapat berjalan optimal. 5. Perlu perbaikan ke sistem perencanaan dan penganggaran segera terkait pelimpahan kewenangan pendidikan menengah agar terjadi sinergi antara pemprov dan kabupaten. 6. Sektor kesehatan dan layanan sosial memerlukan perhatian khusus dengan adanya potensi pengurangan TKD dan tantangan pelayanan di daerah terpencil. 7. Komitmen semua pihak diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah administratif dan teknis yang menghambat percepatan pembangunan.

Dokumentasi



Pembukaan – Penyampaian Laporan - Dialog



Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas
BP3OKP PPS

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 19703082005011013

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg…7

Kegiatan 7. Rapat Paripurna Hasil Tindak Lanjut LHP BKP RI

Kegiatan 5	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : 13 Agustus 2026 Pukul : 10.00-Selesai WIT



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- ☑ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
- ☒ Undangan : DPR Papua Selatan
- ☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya

Surat Tugas Nomor . ….. Tanggal ……

Lokasi Kegiatan :

Ruang Rapat Utama DPR Papua Selatan (Kawasan Pusat Pemerintah Papua Selatan, Salor - Distrik Kurik Merauke

Judul Kegiatan	:	Rapat Paripurna Hasil Tindak Lanjut LHP BKP RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 Dan LHP Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 Sampai Dengan Semester I Tahun 2025
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif BP3OKP PPS
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Hasil Realisasi Program Percepatan Pembangunan Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, DPR Provinsi Papua, BPK RI, Gubernur Papua Selatan, MRP, Sekda Provinsi Papua Selatan dan Undangan lainnya terlampir pada Undangan. Link berikut : https://drive.google.com/file/d/15V_HAp_CudWKGnQKzpTvI87UJLKcDoGX/view?usp=sharing
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mendengarkan penyampaian Hasil Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 Dan LHP Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 Sampai Dengan Semester I Tahun 2025
Hasil/output Kegiatan	:	
		1. Penyampaian hasil kerja Pansus DPR Papua Selatan terhadap tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK RI 2. Pengelolaan aset daerah menjadi perhatian utama 3. Tindak lanjut rekomendasi BPK belum optimal 4. Ditemukan permasalahan penerimaan dari pemanfaatan aset 5. Dokumen pemanfaatan aset belum lengkap 6. Pengelolaan data aset masih menggunakan Microsoft Excel 7. Permasalahan status hukum Balai Diklat Utama Rawasari 8. Potensi kehilangan aset daerah 9. Pansus merumuskan 10 langkah rekomendasi kepada Gubernur 10. Gubernur diminta melakukan pengawalan langsung 11. Pengawasan DPR dilakukan secara berkala 12. Komitmen mempertahankan opini WTP
Output Strategis		**1. Penguatan tata kelola keuangan daerah** Paripurna menegaskan bahwa LHP BPK tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. **2. Penertiban dan penyelamatan aset daerah**

	Pemerintah Provinsi Papua Selatan perlu segera melakukan inventarisasi, verifikasi, penertiban administrasi, pengamanan fisik dan penyelesaian legalitas seluruh aset, khususnya aset yang berasal dari penyerahan Pemerintah Provinsi Papua. 3. **Percepatan penyelesaian rekomendasi BPK** Masih terdapat rekomendasi yang belum selesai. Pansus menilai capaian tindak lanjut belum optimal dan meminta OPD terkait segera menyelesaikan rekomendasi sesuai kewenangan dan batas waktu. 4. **Penyelesaian aset bermasalah secara lintas pihak** Permasalahan aset yang berkaitan dengan pemerintah kabupaten, sertifikasi, dokumen kepemilikan maupun masyarakat adat membutuhkan koordinasi, klarifikasi hak, sertifikasi, dokumentasi dan mediasi, bukan hanya penyelesaian administratif. 5. **Penguatan monitoring dan evaluasi** DPR Papua Selatan akan melakukan pemantauan berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi dan menggunakan tingkat penyelesaian tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam pembahasan anggaran dan evaluasi kinerja OPD. Hasil Rapat Paripurna DPR Papua Selatan menghasilkan komitmen untuk mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK RI, khususnya terkait pengelolaan dan pengamanan aset daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan diminta melakukan inventarisasi dan verifikasi aset secara menyeluruh, mempercepat penyelesaian aspek administrasi dan legalitas, menertibkan penerimaan pemanfaatan aset, melengkapi dokumen perikatan, serta menyelesaikan aset yang masih bermasalah melalui koordinasi lintas pemerintah dan masyarakat adat. Gubernur diminta mengawal langsung pelaksanaan rekomendasi dengan menetapkan OPD penanggung jawab, target waktu, dan pelaporan berkala. DPR Papua Selatan selanjutnya akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap tindak lanjut tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta mempertahankan opini WTP.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: **Rekomendasi** 1. Hasil Pansus menjadi bahan pengawasan DPR terhadap penyelesaian rekomendasi BPK 2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan diminta melakukan pendataan dan inventarisasi aset secara

	menyeluruh, termasuk aspek administrasi, fisik dan hukum 3. OPD yang bertanggung jawab diminta mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih tertunda 4. Penerimaan pemanfaatan aset yang belum tercatat/disetor perlu segera ditertibkan dan dipastikan masuk ke kas pemerintah 5. Seluruh dokumen perikatan/pemanfaatan aset harus dilengkapi untuk memberikan kepastian hukum 6. Didorong optimalisasi sistem informasi manajemen aset agar data aset lebih terintegrasi, akurat dan mudah diawasi 7. Perlu penelusuran dan penegasan status kepemilikan/pengelolaan, sertifikasi, kelengkapan dokumen, serta koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat adat 8. Aset yang belum memiliki kejelasan administrasi dan legalitas harus segera diamankan untuk mencegah kehilangan aset dan persoalan hukum di kemudian hari 9. Meliputi penelusuran rekomendasi tertunda, penertiban penerimaan aset, percepatan sertifikasi tanah, pelengkapan dokumen, koordinasi dengan pemerintah kabupaten, serta penyelesaian persoalan hukum dan pengamanan aset 10. Gubernur diminta menetapkan OPD penanggung jawab, memberikan tenggat waktu penyelesaian, dan meminta laporan perkembangan secara berkala 11. DPR akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran serta evaluasi kinerja OPD 12. Seluruh catatan dan rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti agar temuan yang sama tidak berulang dan opini WTP dapat dipertahankan.
Dokumentasi	
	

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP
PPS

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 19703082005011013

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg…8

Kegiatan 8. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan

Kegiatan 8		**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : 14 Agustus 2026 Pukul : 13.00-Selesai WIT
		**Dasar Pelaksanaan Kegiatan** ☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 ☒ Undangan : Undangan Gubernur Papua Selatan perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan ☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya Surat Tugas Nomor . ….. Tanggal …… **Lokasi Kegiatan :** Aula Utama Lantai 1, Kantor Gubernur Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	:	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Menghadiri dan mengikuti kegiatan pelantikan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	:	Gubernur Papua Selatan (Dr.Ir. Apolo Safanpo, ST., MT), , Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan (Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Sc.),

		para pejabat yang dilantik, serta undangan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Hasil/output Kegiatan	:	
		1. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung khidmat, dengan susunan acara: Pembukaan, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Doa, Pembacaan Keputusan Gubernur, Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji, Sambutan Gubernur Papua Selatan, Menyanyikan Lagu Tanah Papua, dan Penutup. **2.** Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik pada jabatan baru, di antaranya: a. Soleman Yamburmias, S.Pd., M.Kes — dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan; b. Bonifasius Bupits, S.Sos., M.Si — dari Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Selatan; c. Florentina Kakare, S.Sos — dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPR Provinsi Papua Selatan menjadi Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan d. Dr. Paskalis Prayitno, AP., M.Si — dari Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan; e. Edy Purwanto, S.Sos — dari Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Selatan menjadi Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan; f. Dr. Aloysius Pasauran, SH., MH — dari Sekretaris Inspektorat Kabupaten Asmat menjadi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. 3. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan menyampaikan pesan dan arahan kepada pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas

	dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. 4. Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan (Jaswadi, S.Pd., M.Pd.) hadir dan mengikuti keseluruhan rangkaian acara pelantikan.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**: Rekomendasi** 1. Mencatat pejabat yang baru dilantik sebagai mitra kerja Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan, khususnya Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. 2. Menindaklanjuti koordinasi dengan pejabat terkait dalam mendukung program percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut

Dokumentasi



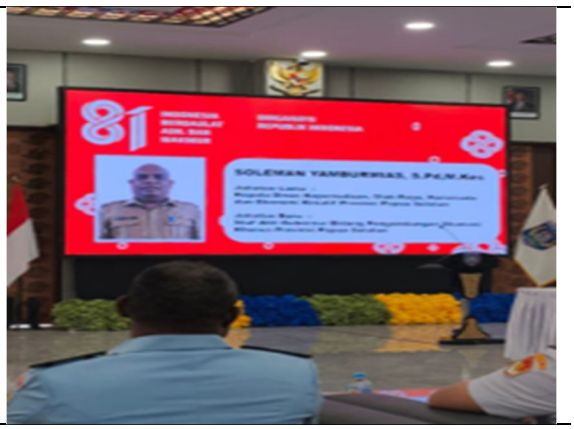
Prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Utama Kantor Gubernur Papua Selatan



Sesi ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik seusai acara.



Foto bersama pejabat yang dilantik dan tamu undangan di Aula Utama Kantor Gubernur Papua Selatan



Profil pejabat yang dilantik: Soleman Yamburmias, S.Pd., M.Kes.



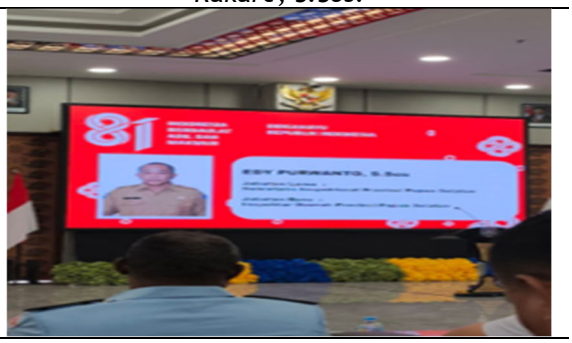
Profil pejabat yang dilantik: Bonifasius Bupits, S.Sos., M.Si.



Profil pejabat yang dilantik: Florentina Kakare, S.Sos.



Profil pejabat yang dilantik: Dr. Paskalis Prayitno, AP., M.Si.



Profil pejabat yang dilantik: Edy Purwanto, S.Sos.

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP
PPS

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg…9

Kegiatan 9. HUT Kemerdekaan RI ke 81

Kegiatan 9	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Senin, 17 Agustus 2026 Pukul : 06.30-12.00 WIT
	**Dasar Pelaksanaan Kegiatan** ☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 ☒ Undangan : Undangan Gubernur Papua Selatan perihal Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 ☐ Insidentil : Surat Tugas Nomor . ….. Tanggal ……. **Lokasi Kegiatan :** Stadion Katapal Kab. Merauke Prov Papua Selatan

Judul Kegiatan	:	Upacara HUT Kemerdekaan RI ke 81
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif BP3OKP PPS. Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81.
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Membangun Rasa Cinta Tanah Air dan menghargai Jasa Para Pahlawan yang telah gugur untuk kemerdekaan RI
Pelaksana Kegiatan	:	Pemprov Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif BP3OKP PPS
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 81
Hasil/output Kegiatan	:	
		1. Terwujudnya partisipasi dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Meningkatnya semangat nasionalisme dan kebangsaan, khususnya melalui keterlibatan dalam rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. 3. Terbangunnya koordinasi dan kebersamaan antara pemerintah, lembaga/instansi, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan agenda nasional di wilayah Papua Selatan. 4. Penguatan nilai persatuan dan gotong royong sebagai modal sosial dalam mendukung percepatan

	pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 5. Tersampaikannya pesan pembangunan dan kebangsaan, bahwa momentum HUT Kemerdekaan RI menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Selatan yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. 6. Terdokumentasinya keikutsertaan dan rangkaian kegiatan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kelembagaan.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: 1. Menjadikan semangat kemerdekaan sebagai penguatan agenda Papua Cerdas 2. Pokja Papua Cerdas perlu menerjemahkan nilai kemerdekaan, persatuan, gotong royong, dan kesetaraan ke dalam program dan rekomendasi kebijakan pembangunan pendidikan di Papua Selatan. 3. Memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan 4. Mendorong integrasi pendidikan karakter, nasionalisme, kebinekaan, budaya lokal, dan wawasan kebangsaan dalam program pendidikan, terutama bagi peserta didik Orang Asli Papua (OAP). 5. Mendorong peningkatan akses dan pemerataan pendidikan 6. Momentum HUT Kemerdekaan perlu menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata, termasuk bagi anak-anak OAP di wilayah 3T, kampung, dan daerah yang sulit dijangkau. 7. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait 8. Pokja Papua Cerdas perlu melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten, Dinas Pendidikan, Bappeda, BKPSDM, serta OPD terkait untuk memastikan rekomendasi pendidikan dapat diterjemahkan menjadi program, kegiatan, dan penganggaran. 9. Mendorong penguatan peran generasi muda Papua Selatan 10. Pokja perlu mendorong program pengembangan kepemimpinan, literasi, numerasi, teknologi, keterampilan, dan kewirausahaan bagi generasi

muda OAP sebagai investasi SDM untuk pembangunan Papua Selatan.

11. Mengembangkan kolaborasi dengan satuan pendidikan dan perguruan tinggi
12. Memperkuat kemitraan dengan sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan SDM Papua Selatan.
13. Mengawal keberlanjutan kebijakan dan program pendidikan
14. Menggunakan momentum kebangsaan sebagai bahan advokasi kebijakan
15. Hasil kegiatan HUT Kemerdekaan dapat menjadi bahan penguatan advokasi Pokja kepada BP3OKP dan pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan Otonomi Khusus Papua.
16. Memperkuat dokumentasi dan basis data pendidikan
17. Setiap kegiatan dan hasil koordinasi perlu didokumentasikan serta dihubungkan dengan data dan indikator pembangunan pendidikan sehingga rekomendasi Pokja berbasis bukti dan dapat digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi.
18. Menjadikan HUT Kemerdekaan sebagai momentum evaluasi Papua Cerdas
19. Pokja Papua Cerdas dapat memanfaatkan momentum tahunan HUT Kemerdekaan sebagai salah satu titik evaluasi untuk melihat sejauh mana pembangunan pendidikan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya OAP.

Dokumentasi/Link Dokumen



Foto bersama di panggung kehormatan latar backdrop HUT Ke-81 RI.



Peserta mengikuti jalannya Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Stadion Katalpal, Merauke.



bersama tamu undangan mengikuti jalannya



pada area tangga panggung kehormatan upacara



Foto bersama tamu undangan usai pelaksanaan upacara

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PPS

Frederik H. Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 197503082005011013

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg…10

Kegiatan 10. Resepsi HUT Kemerdekaan RI ke 81

Kegiatan 10	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Senin, 17 Agustus 2026 Pukul : 19.00-Selesai WIT



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- ☑ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
- ☒ Undangan : Undangan Gubernur Papua Selatan perihal Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
- ☐ Insidentil :

Surat Tugas Nomor . ….. Tanggal ……

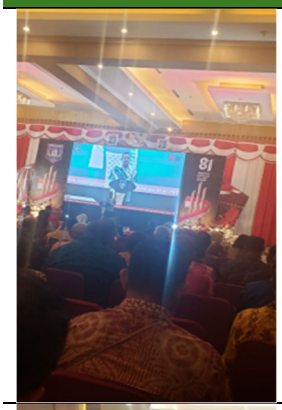
Lokasi Kegiatan :

Ballroom Swissbel Hotel, Merauke, Provinsi Papua Selatan

Judul Kegiatan	:	Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	:	Kepala BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Menghadiri Malam Resepsi Kenegaraan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	Kepala BP3OKP beserta Jaswadi, S.Pd. dan Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	:	Gubernur Papua Selatan, unsur Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan beserta jajaran Pokja, serta tamu undangan VVIP lingkup Provinsi Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menghadiri Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, sebagai bentuk partisipasi BP3OKP dalam kegiatan kenegaraan sekaligus mempererat silaturahmi dengan unsur pimpinan daerah.
Hasil/output Kegiatan	:	
		1. Malam Resepsi Kenegaraan berlangsung di Ballroom Swissbel Hotel, Merauke, dihadiri oleh Gubernur Papua Selatan, unsur Forkopimda, Pimpinan Tinggi Pratama, serta tamu undangan VVIP. 2. Kepala BP3OKP beserta Pokja Papua Cerdas (Jaswadi, S.Pd.M.MPd) turut hadir dan mengikuti rangkaian acara resepsi.Rombongan BP3OKP turut berfoto bersama pasukan pengibar bendera serta

	unsur pimpinan daerah sebagai bentuk dokumentasi kegiatan. 3. Kegiatan berlangsung khidmat, tertib, dan lancar hingga selesai.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	: 1. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan dokumentasi dan tindak lanjut. 2. Menindaklanjuti hasil silaturahmi dan koordinasi dengan unsur pimpinan daerah untuk mendukung program kerja BP3OKP selanjutnya

Dokumentasi/Link Dokumen



Suasana Malam Resepsi Kenegaraan di Ballroom Swissbel Hotel, Merauke.



foto bersama pasukan pengibar bendera pada Malam Resepsi



Pokja Cerdas bersama pasukan pengibar bendera



Kadisdik Merauke bersama Pokja Papua Cerdas pada Malam Resepsi

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PPS

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yoseph Yo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg…11

Kegiatan 11. Kuliah Tamu Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi

Kegiatan 11	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Rabu, 19 Agustus 2026 Pukul : 13.00 – 17.00 WIT
 	**asar Pelaksanaan Kegiatan** Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 Undangan : Undangan Pit. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus Nomor 673/DST/UN52.2/TU.02.02/2026 tanggal 13 Agustus 2026, perihal Undangan Kuliah Tamu Insidentil : urat Tugas Nomor . ….. Tanggal …… **okasi Kegiatan :** edung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) niversitas Musamus, Merauke

Judul Kegiatan	:	Kuliah Tamu Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus dengan tema "Ketimpangan dan Transformasi Ekonomi antar Wilayah di Indonesia"
Misi/Keterangan	:	Kepala BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Menghadiri dan mengikuti Kuliah Tamu dari BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	1. Yoseph Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC (Kepala BP3OKP Papua Selatan) beserta 2. Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. 3. Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	:	Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus, narasumber Dr. Fajri Muharja, S.E., M.Si., Koordinator APSEPI Wilayah Maluku & Papua Romualdus Turu Putra Maro Djanggo, M.Si., Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan beserta Pokja Papua Cerdas, unsur Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, pimpinan perbankan, STIE Yapis Merauke, alumni Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unmus, dosen, serta mahasiswa Universitas Musamus sesuai daftar undangan Nomor 673/DST/UN52.2/TU.02.02/2026.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menghadiri dan mengikuti Kuliah Tamu dengan tema "Ketimpangan dan Transformasi Ekonomi antar Wilayah di Indonesia", sebagai bagian dari tugas Pokja Papua Cerdas mewakili BP3OKP Papua Selatan dalam mendukung pengembangan wawasan ekonomi pembangunan wilayah Papua Selatan.
Hasil/output Kegiatan	:	
		1. Kegiatan Kuliah Tamu dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Romualdus T.P.M Djanggo, M.Si., diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unmus. 2. Pemaparan materi disampaikan oleh narasumber Dr. Fajri Muharja, S.E., M.Si. (Ketua Asosiasi Pengelola Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia/APSEPI) dengan dipandu oleh moderator Dr. Elly Noer, S.E., M.M., yang pada intinya membahas kesenjangan dan transformasi ekonomi antarwilayah di Indonesia serta tantangan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia termasuk Papua Selatan. 3. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP3OKP, Yoseph Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC, turut memberikan motivasi kepada seluruh peserta, khususnya para mahasiswa, tentang pentingnya memiliki impian dan cita-cita dengan berlandaskan pada tiga modal utama, yaitu agama, attitude (sikap), dan budi pekerti. Beliau menekankan bahwa kesuksesan tidak diraih secara instan, melainkan membutuhkan proses dan kesungguhan dalam menjalani setiap tahapan kehidupan. 4. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang berlangsung hangat, di mana Kepala BP3OKP turut memberikan solusi-solusi yang nyata dan aplikatif atas berbagai pertanyaan peserta, sehingga mendapat antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, serta undangan dari instansi pemerintah dan perbankan. 5. Kepala BP3OKP beserta Pokja Papua Cerdas (Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. dan Jaswadi, S.Pd., M.Pd.) hadir dan turut aktif mengikuti jalannya kuliah tamu dari awal hingga akhir. 6. Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan dan plakat kepada narasumber,

	serta sesi foto bersama seluruh peserta dan undangan.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:** 1. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan dokumentasi dan tindak lanjut. 2. Menjadikan materi kuliah tamu mengenai ketimpangan dan transformasi ekonomi antarwilayah sebagai bahan masukan dalam mendukung perumusan kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Selatan. 3. Menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Universitas Musamus serta APSEPI dalam kegiatan akademik dan pengembangan ekonomi daerah selanjutnya.

Dokumentasi/Link Dokumen



Foto bersama Kepala BP3OKP, Pokja Papua Cerdas, dan seluruh peserta Kuliah Tamu di Gedung PKM Universitas Musamus.



Suasana Ruangan Kuliah Tamu "Ketimpangan dan Transformasi Ekonomi antar Wilayah di Indonesia".



Kepala BP3OKP memberikan motivasi dan solusi nyata kepada mahasiswa dalam sesi diskusi interaktif.



Kepala BP3OKP dan Pokja Papua Cerdas mengikuti jalannya kuliah tamu.



Suasana sesi tanya jawab dan diskusi interaktif bersama peserta



Foto bersama Kepala BP3OKP, Pokja Papua Cerdas, dan panitia usai kegiatan Kuliah Tamu

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PPS

Frederik H. Sumbung, ST.,M.Eng | **Jaswadi, S.Pd.,M.Pd**
NIP. 197503082005011013

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yosep Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

Next Keg ….12

Kegiatan 12. Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi..Musrenbang Otsus 2026

Kegiatan 13	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Kamis, 20 Agustus 2026 Pukul : 08.00-21.30 WIT
	**Dasar Pelaksanaan Kegiatan** ☑ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026 ☒ Undangan : No. T-18232/D.02/PP.03.03/ 08/2026 Jakarta, 13 Agustus 2026 Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan ☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya Surat Tugas Nomor . ….. Tanggal …… **Lokasi Kegiatan :** Kantor Bupati Merauke (Breakout Room 6), dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting (Meeting ID: 830 8362 5395)

Judul Kegiatan	:	Sesi Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 – Desk Provinsi Papua Selatan, meliputi Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat
Misi/Keterangan	:	Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan selaku Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Selatan/Tim Asistensi, beserta Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, dan Pokja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	SHEK Pengarah Sinergi Implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029, dan Menghadiri dan mendampingi jalannya Sesi Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026, selaku Tim

		Asistensi/Anggota Badan Pengarah Papua yang mewakili Provinsi Papua Selatan, dalam rangka memastikan keselarasan usulan Musrenbang Otsus 2026 dengan RAPPP 2025–2029
Pelaksana Kegiatan	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 1. Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC (Kepala BP3OKP Papua Selatan) 2. Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. (Pokja Papua Cerdas) 3. Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas) 4. dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M. (Pokja Papua Sehat) 5. Ratmika Pasorong (Pokja Papua Sehat) Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Produktif)
Peserta Kegiatan	:	Tim Asistensi Pusat: Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah serta Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; serta unsur Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat sesuai jadwal desk masing-masing sebagaimana Lampiran 2 Surat Undangan Nomor T-18232/D.02/PP.03.03/08/2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Evaluasi keselarasan antara usulan daerah dalam Musrenbang Otsus Tahun 2026 dengan RAPPP 2025-2029
Hasil/output Kegiatan	:	Pertemuan ini merupakan sesi tindak lanjut dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) OTSUS Papua Selatan yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan dana OTSUS serta memperbaiki tata kelola dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama terletak pada peningkatan keselarasan program serta penyempurnaan sistem pelaporan dan pengelolaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), khususnya sampai ke tingkat distrik dan kampung. Pertemuan dipimpin oleh tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Diskusi juga melibatkan perwakilan dari berbagai stakeholder lokal seperti

	Bappeda, OPD terkait, dan lembaga pendamping daerah.
	1. Evaluasi Keselarasan Usulan Program dan Anggaran OTSUS ■ Persentase keselarasan antara program yang diusulkan oleh daerah dengan kerangka RAPBN 2025-2029 (Rencana Anggaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah) masih di angka sekitar 57,49%, dan di tingkat kabupaten bervariasi antara 20% hingga 50%. ■ Jumlah usulan sub-kegiatan meningkat signifikan dari 153 pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 380 sub-kegiatan tahun 2026, yang mengakibatkan kesulitan dalam memastikan semua usulan benar-benar selaras dan sesuai prioritas pembangunan melalui RAPPP 2025-2029. ■ Beberapa sub-kegiatan belum memenuhi kriteria kesesuaian administratif dan fungsional, sehingga perlu penyesuaian nomenklatur serta evaluasi ulang agar dana dapat terfokus pada prioritas pembangunan daerah yang berdampak langsung. ■ Pemerintah daerah mengaku adanya tantangan dalam menyelaraskan usulan dengan referensi pusat diantaranya waktu penetapan RAPPP, terutama terkait perubahan nomenklatur dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. 2. Keterbatasan Pelaksanaan Anggaran dan Dampak Pada Masyarakat ■ Implementasi anggaran OTSUS hingga tingkat distrik dan kampung masih terbatas karena anggaran hanya sampai pada tingkat provinsi, belum menyentuh langsung masyarakat pesisir dan daerah 3T yang paling membutuhkan. ■ Pemerintah daerah menekankan pentingnya alokasi anggaran yang langsung diteruskan sampai tingkat kampung dan wilayah pesisir demi mendukung percepatan pembangunan yang inklusif. ■ Beberapa kendala teknis dan birokrasi dalam pelaporan penggunaan dana juga diidentifikasi sebagai faktor penghambat. 3. Penguatan Sistem Pelaporan dan Data Terintegrasi ■ Sering terjadi keterlambatan pelaporan karena rotasi atau mutasi ASN yang mengelola data dan pelaporan anggaran, sehingga data tidak terdistribusi dengan baik antar pejabat pengganti. ■ Usulan penggunaan sistem penyimpanan data terpadu berbasis cloud (motor drive) untuk memastikan transfer data data tetap tersimpan dan dapat diakses meski terjadi pergantian staf.

	■ Ditekankan perlunya penunjukan petugas khusus (operator IT) yang profesional mengelola data kegiatan dan anggaran agar pelaporan bisa konsisten dan tepat waktu. ■ Pendampingan oleh tim dari Bappenas, KPK, dan kementerian terkait diarahkan untuk membantu memperbaiki tata kelola data dan pelaporan ini. 4. Efisiensi dan Akuntabilitas Dana OTSUS ■ Pembentukan tim pendamping yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga pengawas (termasuk KPK) bertujuan memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan dana. ■ Evaluasi kinerja menjadi acuan dalam penyaluran dana tahap 2 dan 3 agar perbaikan penyerapan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran. ■ Laporan pertanggungjawaban wajib disampaikan tidak hanya ke pemerintah daerah tetapi juga ke tingkat pusat agar pengawasan berjalan efektif. 5. Sinkronisasi Pusat-Daerah dan Pendampingan Terus-Menerus ■ Perlu adanya sinkronisasi yang lebih baik antara perencanaan pusat dan daerah supaya program serta penggunaan dana OTSUS tidak bertentangan atau tumpang tindih. ■ Evaluasi dan revisi regulasi menjadi penting untuk mengakomodasi kondisi riil lapangan ketimbang terpaku pada aturan baku yang sulit diimplementasikan. ■ Tim pendamping akan membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan perencanaan, penyesuaian program, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. 6. Komitmen dan Harapan Kedepan ■ Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan pelaporan guna meningkatkan penyerapan dana OTSUS secara tepat, efektif, dan berdampak. ■ Pihak pusat berharap Papua Selatan bisa menjadi contoh pelaksanaan OTSUS yang baik, termasuk dalam implementasi sistem interoperabilitas data pembangunan terintegrasi (insana). ■ Perlu upaya bersama untuk memastikan bahwa dana OTSUS mendukung pembangunan jangka panjang, efektif hingga 20-100 tahun ke depan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**: Rekomendasi** 1. Kesesuaian usulan dan anggaran OTSUS perlu ditingkatkan, dengan fokus menghilangkan kegiatan

yang bersifat administratif dan tugas rutin, serta memastikan hasil Musrembang OTSUS mencerminkan prioritas pembangunan Papua Selatan.

2. Alokasi anggaran perlu diperluas sampai ke tingkat kampung dan wilayah pesisir, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T, guna mendukung percepatan pembangunan yang merata dan inklusif.
3. Pendampingan teknis dan penguatan tata kelola data harus diintensifkan, dengan penggunaan teknologi informasi yang mendukung monitoring berbasis data real-time dan pengelolaan data secara aman dan transparan.
4. Evaluasi kinerja dan pelaporan wajib rutin ke pusat harus menjadi budaya kerja, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan.
5. Koordinasi antara pusat dan daerah serta antar-pemangku kepentingan harus diperkuat, agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sinkron, efektif, dan berdampak nyata ke masyarakat luas.
6. Keterlibatan KPK dan lembaga pengawas dilihat penting untuk memastikan dana OTSUS dipergunakan secara benar dan mencegah penyalahgunaan.
7. Pemerintah daerah dan pusat berharap Papua Selatan menjadi contoh pelaksanaan dana OTSUS yang sukses dengan sistem integrasi data dan pengelolaan tata kelola yang modern dan profesional.

Dokumentasi



Foto bersama Tim Asistensi, unsur Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dan Tim BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada pembukaan kegiatan.



Tim Kerja OPD Kabupaten Merauke dalam menyampaikan hasil penyelerasan kepada tim Pusat



Tim Pokja BP3OKP mendokumentasikan poin-poin hasil pembahasan.



Tim BP3OKP Provinsi Papua Selatan mengikuti jalannya pembahasan dari awal hingga akhir.



Suasana keseluruhan ruang rapat saat sesi pembahasan berlangsung



Suasana pembahasan Desk Kabupaten/Kota bersama Tim Asistensi dan Pemerintah Daerah.

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PPS

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 19703082005011013

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999902401171457257

Next Keg…13

Kegiatan 13. BPKP Perwakilan Provinsi Papua

Kegiatan 13	**Waktu Pelaksanaan Kegiatan** Hari/Tgl : Rabu, 26 September 2026 Pukul : 10.00 WIT - Selesai



Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- ☑ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026
- ☐ Undangan : Undangan Sekretariat BPP Papua No. UND-21/SETBPP /JYP/2026 Tgl. 22 Juli 2026
- ☒ Insidentil : Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor PE.09.02/ST-712/PW26/3.1/2026 tanggal 3 Agustus 2026 dan Surat Nomor PE.09.02/S-711/PW26/3.1/ 2026 tanggal 3 Agustus 2026 hal Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke

Surat Tugas Nomor … Tgl. ….

Lokasi Kegiatan :

Ruang Rapat BP3OKP Papua Selatan, Jl. Prajurit No. 1, Merauke

Judul Kegiatan	:	Pertemuan Koordinasi antara BP3OKP Provinsi Papua Selatan dengan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke
Misi/Keterangan	:	Seluruh Pokja BP3OKP Provinsi Papua Selatan (Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, dan Pokja Papua Produktif) beserta Kepala BP3OKP Papua Selatan
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	:	Menerima kunjungan dan mengikuti pertemuan koordinasi dengan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Papua terkait pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Merauke, mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	1. Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC — Kepala BP3OKP Papua Selatan 2. Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. — Pokja Papua Cerdas 3. Jaswadi, S.Pd., M.Pd. — Pokja Papua Cerdas 4. dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M. — Pokja Papua Sehat 5. Ratmika Pasorong — Pokja Papua Sehat 6. Marthinus Kendom, SP., MP. — Pokja Papua Produktif
Peserta Kegiatan	:	**Pihak BP3OKP Papua Selatan:**

		1. Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC (Kepala BP3OKP Papua Selatan) 2. Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. (Pokja Papua Cerdas) 3. Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas) 4. dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M. (Pokja Papua Sehat) 5. Ratmika Pasorong (Pokja Papua Sehat) 6. Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Produktif) **Pihak Tim BPKP Perwakilan Provinsi Papua (sesuai Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-712/PW26/3.1/2026):** 1. Hendro Wibowo — Penanggung Jawab 2. Dian Hidayati — Pengendali Teknis 3. Adhi Satriyanto — Anggota Tim 4. Fajar Kurniawan — Anggota Tim 5. Abimelek Gobai — Anggota Tim 6. Muhammad Lukman A — Anggota Tim
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Membahas pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke, serta membangun koordinasi dan kolaborasi antara BP3OKP dan BPKP sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pengawasan pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
Hasil/output Kegiatan	:	
		1. Pertemuan dibuka dan dihadiri oleh seluruh Pokja BP3OKP Papua Selatan beserta Kepala BP3OKP Papua Selatan, serta Tim BPKP Perwakilan Provinsi Papua. 2. Tim BPKP menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, yaitu melaksanakan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke sesuai Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-712/PW26/3.1/2026 3. Berlangsung diskusi yang aktif antara BP3OKP dan BPKP, dengan berbagai saran dan pendapat dari kedua belah pihak terkait pengawasan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. 4. Masing-masing Pokja BP3OKP menyampaikan informasi perkembangan program dan kegiatan di bidang tugasnya (Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif) yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Otsus. 5. Kedua belah pihak menyepakati bahwa BP3OKP dan BPKP akan berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
	:	**Rekomendasi**

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	1. BP3OKP dan BPKP akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pengawasan Dana Otonomi Khusus. 2. Pokja BP3OKP agar menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan oleh Tim BPKP dalam pelaksanaan program di bidang masing-masing. 3. Melaporkan hasil pertemuan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.

Dokumentasi



Pertemuan koordinasi BP3OKP Papua Selatan dengan Tim BPKP di ruang rapat BP3OKP



Diskusi antara Pokja BP3OKP dan Tim BPKP terkait Evaluasi Dana Otsus.



Suasana pertemuan koordinasi BP3OKP dan BPKP



Kepala BP3OKP dan Pokja bersama Tim BPKP dalam pertemuan koordinasi

Pembuat/ Penyusun Laporan
Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP PPS

Ir. Frederik H Sumbung, ST.,M.Eng
NIP. 19703082005011013

Jaswadi, S.Pd.,M.Pd

Mengetahui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian 13 kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan telah menunjukkan peran yang sangat aktif, strategis, dan integratif dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Selatan. Kesimpulan utama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Peran Ganda dan Fokus Kerja yang Strategis:** Pokja Papua Cerdas menjalankan dua peran utama secara bersamaan. **Pertama**, sebagai pelaksana teknis dan pemrakarsa program, terutama dalam persiapan Kongres Bahasa Daerah (Kegiatan 1), yang merupakan agenda strategis untuk pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. **Kedua**, sebagai unsur pendukung dan pengawas, yang tercermin dalam kehadiran dan partisipasi aktif pada berbagai forum strategis tingkat provinsi seperti Rapat Paripurna DPR, Rapat Evaluasi DOB, Rapat Koordinasi Dana Otsus, dan kegiatan kenegaraan lainnya.
2. **Penguatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor:** Sepanjang Agustus, Pokja secara konsisten membangun dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun pusat. Hal ini terlihat dari kolaborasi dengan KSBN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, DPR, Forkopimda, dan akademisi (Universitas Musamus). Sinergi ini krusial untuk memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas program, dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
3. **Fokus pada Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan:** Sebagian besar kegiatan di bulan Agustus menyoroti isu-isu fundamental tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan. Isu utama yang berulang kali muncul meliputi:
    a. **Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Otsus:** Perlu peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, dan penyerapan anggaran di semua tingkatan (Provinsi, Kabupaten, dan OPD) untuk meminimalkan SILPA/SILVA dan memastikan dana tepat sasaran, terutama hingga ke kampung dan wilayah 3T.
    b. **Pengelolaan Aset Daerah:** Masih terdapat permasalahan serius terkait inventarisasi, legalitas, dan pemanfaatan aset daerah yang perlu segera ditertibkan untuk mencegah kerugian daerah.
    c. **Pengisian Sumber Daya Manusia (ASN):** Percepatan pengisian jabatan definitif dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam pengelolaan data dan pelaporan, menjadi kebutuhan mendesak.
4. **Komitmen pada Pembangunan SDM dan Pendidikan:** Melalui program Papua Cerdas, Pokja secara konsisten mendorong agenda peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan melalui persiapan kongres bahasa untuk pelestarian budaya, kehadiran dalam kegiatan akademik (Kuliah Tamu), dan pemanfaatan momentum Hari Kemerdekaan untuk memperkuat advokasi pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP).

5. **Identifikasi Tantangan Kritis:** Berbagai kegiatan rapat mengidentifikasi sejumlah tantangan kritis yang menghambat pembangunan, antara lain: rendahnya keselarasan usulan program dengan RAPPP, lemahnya sistem pelaporan dan data terintegrasi, kendala administratif dalam pengelolaan aset, serta potensi pengurangan TKD yang berdampak pada pelayanan publik

3.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan memastikan keberlanjutan program ke depan, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Mengintensifkan Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah:**
   - *Akselerasi FGD:* Segera realisasikan FGD Pra-Kongres di Merauke dengan melibatkan seluruh kabupaten untuk menyamakan visi dan mematangkan materi representasi budaya.
   - *Data dan Materi:* Percepat penyusunan Profil Budaya Papua Selatan yang komprehensif dan berbasis data, serta finalisasi daftar delegasi dan materi pameran/pertunjukan sesuai dengan jadwal resmi dari panitia pusat.
2. **Mendorong Reformasi Tata Kelola dan Pengelolaan Keuangan Daerah:**
   - *Basis Data Terintegrasi:* Dukung dan dorong implementasi sistem data terintegrasi (*insana*/cloud) di seluruh OPD untuk memastikan akurasi dan kelancaran pelaporan, serta antisipasi rotasi ASN.
   - *Sinkronisasi Perencanaan:* Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keselarasan (alignment) antara usulan Musrenbang Otsus dengan RAPPP 2025-2029 guna memastikan setiap rupiah dana Otsus benar-benar berdampak pada prioritas pembangunan.
   - *Tindak Lanjut Rekomendasi BPK:* Dukung pengawasan DPR dan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama terkait penertiban aset, untuk mempertahankan opini WTP dan mencegah temuan berulang.
3. **Penguatan Peran Pokja dalam Pengawasan dan Pendampingan:**
   - *Pendampingan Terstruktur:* Tingkatkan peran Pokja sebagai Tim Asistensi dalam memberikan pendampingan teknis kepada kabupaten dan OPD, tidak hanya pada saat evaluasi, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
   - *Kolaborasi dengan APIP/BPKP:* Perkuat kolaborasi dengan Inspektorat dan BPKP dalam fungsi pencegahan (*preventif*) melalui reviu dokumen dan pendampingan, guna memastikan program berjalan sesuai koridor sebelum potensi penyimpangan terjadi.
4. **Perluasan Jangkauan dan Dampak Program:**
   - *Advokasi Anggaran Kampung:* Dorong agar alokasi Dana Otsus tidak hanya berhenti di tingkat provinsi dan kabupaten, tetapi juga dapat menjangkau langsung kampung-kampung dan wilayah pesisir/3T yang selama ini kurang tersentuh.

- *Program Keberlanjutan:* Tindaklanjuti komitmen pengembangan budaya berkelanjutan (riset, vokasi, inkubasi seni) dari hasil rapat Kongres Bahasa, dan kaitkan dengan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya.

5. **Pemanfaatan Momen Strategis untuk Advokasi Kebijakan:**
   - Gunakan momen-momen penting seperti HUT Kemerdekaan atau peresmian pejabat baru sebagai pintu masuk untuk mengadvokasi rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan, khususnya kepada gubernur dan kepala OPD terkait (seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Staf Ahli Otsus) guna memastikan program Papua Cerdas terintegrasi dalam kebijakan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BADAN PENGARAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
PROVINSI PAPUA SELATAN

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

81 DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA SEHAT

BULAN
AGUSTUS 2026



"Papua Selatan;
Masyarakat Kuat,
Masa Depan Hebat."

JAMINAN KESEHATAN ORANG ASLI PAPUA

PENINGKATAN UMUR HARAPAN HIDUP

PENURUNAN STUNTING

ELIMINASI MALARIA

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL KEGIATAN RATMIKA PASORONG
POKJA PAPUA SEHAT BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN AGUSTUS 2026

Laporan ini telah diperiksa, dievaluasi, dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan bulanan Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan.

Penyusun,
Anggota Pokja Papua Sehat

Ratmika Pasorong

Mengetahui:
Kepala BP3OKP Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Hasil Kegiatan saya sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Papua Sehat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan untuk periode Bulan Agustus Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi saya Pokja Papua Sehat dalam menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di bidang kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Secara garis besar, laporan ini memuat gambaran umum kelembagaan Pokja Papua Sehat pada Bab I, serta rincian pelaksanaan dan capaian setiap kegiatan yang dilaksanakan selama Bulan Agustus 2026 pada Bab II, mencakup kegiatan rapat koordinasi, kunjungan lapangan, hingga penyelenggaraan sinkronisasi kebijakan bersama pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Merauke.

Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknis penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Saya harapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan pada periode berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan BP3OKP dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ringkasan Kelembagaan 2
1.2.1 Landasan Hukum 2
1.2.2 Definisi 2
1.2.3 Struktur Kelembagaan 3
1.2.4 Tugas dan Fungsi 3
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan 3
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 4
1.2.7 Sarana dan Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN **6**
2.1 Pelaksanaan Kegiatan 6
Kegiatan I. Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan DTI 6
Kegiatan II. Kunjungan dan Koordinasi Kerja 9
Kegiatan III. Rapat Paripurna 11
Kegiatan IV. Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Rapublik Indonesia 13
Kegiatan V. Rapat pleno pembukaan perbaikan evaluasi pelaksanaan musrembang otsus tahun 2026 15
Kegiatan VI.Pendampingan Perbaikan Evaluasi musrembang otsus tahun 2026 19
Kegiatan VII.Rapat Koordinasi BP3OKP bersama dengan BPKP 24
Kegiatan VIII.Pembahasan MOU perjanjian kerja sama Terkait malaria,imunisasi dan Kesehatan Ibu Anak 28
Kegiatan IX Kunjungan koordinasi anggota DPR Afirmasi Papua Selatan. 31
BAB III PENUTUP **35**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi saya selaku Kelompok Kerja (Pokja) Papua Sehat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan selama Bulan Agustus Tahun 2026. Sebagai salah satu dari empat kelompok kerja di bawah BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Pokja Papua Sehat menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di bidang kesehatan guna mendukung percepatan pembangunan kesehatan bagi Orang Asli Papua di wilayah Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel.

Selama periode laporan, saya Pokja Papua Sehat telah melaksanakan dan mengikuti sembilan kegiatan utama, antara lain rapat koordinasi percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur bersama Kementerian Dalam Negeri, rapat paripurna, kunjungan kerja dan koordinasi lintas kabupaten, monitoring pelaksanaan program kesehatan, serta forum sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan bersama Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait. Secara umum, seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan sejumlah kesepakatan serta rekomendasi tindak lanjut sebagaimana diuraikan pada Bab II laporan ini.

Beberapa capaian penting yang dihasilkan antara lain komitmen percepatan penyaluran Dana Otsus/DTI Tahap 2 melalui penyelesaian RAP/RAB perubahan dan validasi SILPA, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten dalam penanganan isu strategis kesehatan, serta terjalinnya sinergi antara Pokja Papua Sehat dengan Perangkat Daerah dan mitra kerja lainnya. Beberapa tantangan yang masih memerlukan tindak lanjut antara lain keterlambatan penyelesaian dokumen administratif di sejumlah daerah dan perlunya penguatan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, saya Pokja Papua Sehat merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan terkait mempercepat penyelesaian dokumen dan validasi administratif, memperkuat pendampingan teknis secara berkelanjutan, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga guna memastikan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di bidang kesehatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Selatan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dibentuk sebagai lembaga yang mengemban amanat pengawalan dan percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, dan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan tugasnya, BP3OKP berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), serta ketentuan teknis pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024.

Kelompok Kerja (Pokja) Papua Sehat merupakan salah satu dari empat kelompok kerja di bawah BP3OKP Provinsi Papua Selatan, yang mengemban misi mewujudkan pilar Papua Sehat melalui pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) di bidang kesehatan. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain rapat koordinasi lintas lembaga, kunjungan dan monitoring lapangan, serta evaluasi pelaksanaan program kesehatan pada Perangkat Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, Pokja Papua Sehat menyusun laporan bulanan yang memuat rincian pelaksanaan, capaian, serta rekomendasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini disusun untuk periode Bulan Agustus Tahun 2026, mencakup kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

1.1.1 Maksud

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk mendokumentasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan selama Bulan Agustus 2026, sekaligus sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan BP3OKP dan pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

1.1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat selama Bulan Agustus 2026 secara sistematis dan akuntabel.
2. Mengidentifikasi capaian, permasalahan, dan kendala pelaksanaan program kesehatan di lapangan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
3. Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Menyediakan bahan informasi dan pertimbangan bagi pimpinan BP3OKP dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan.
5. Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan atas implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan Hukum

Pelaksanaan tugas Pokja Papua Sehat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

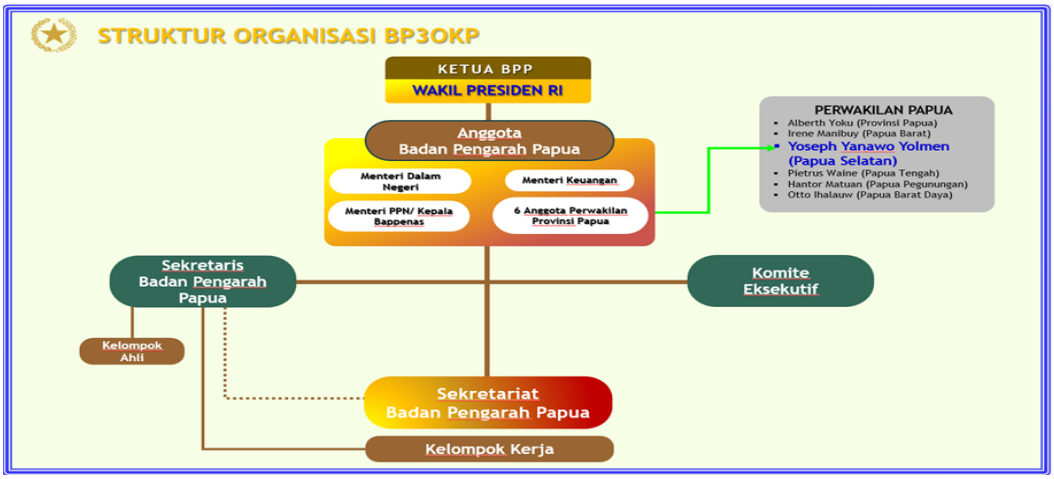
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus Papua.
6. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.

1.2.2 Definisi

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Kelompok Kerja (Pokja) Papua Sehat merupakan unit kerja pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan yang menjalankan fungsi SHEK pada bidang kesehatan guna mendukung percepatan pembangunan kesehatan bagi Orang Asli Papua.

1.2.3 Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) beserta kedudukan Kelompok Kerja Papua Sehat pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan digambarkan sebagai berikut:



1.2.4 Tugas dan Fungsi

Pokja Papua Sehat merupakan bagian dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang mendukung pelaksanaan tugas BP3OKP melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap kebijakan dan program pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk:

- ✓ Mendukung sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- ✓ Melakukan harmonisasi program pembangunan kesehatan dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMD;
- ✓ Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan dana otonomi khusus bidang kesehatan;
- ✓ Menyusun rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan bagi anggota BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan.

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Selama Bulan AgustusTahun 2026, Pokja Papua Sehat melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan, meliputi:

- ✓ Penguatan kapasitas kelembagaan Pokja;
- ✓ Kunjungan kerja ke Boven Digoel
- ✓ Koordinasi implementasi kebijakan Otonomi Khusus bidang kesehatan;
- ✓ Penguatan kolaborasi lintas sektor;
- ✓ Monitoring dan evaluasi isu strategis kesehatan;
- ✓ Penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi SHEK.

Ruang lingkup tersebut diwujudkan melalui empat kegiatan utama yang dilaksanakan selama Bulan Agustus 2026.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar SDM sesuai struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO.	UNIT KERJA & JABATAN	URAIAN	JLH ORG
1.	Pimpinan	Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA)	1. POKJA Papua Sehat	2 org
		2. POKJA Papua Cerdas	2 org
		3. POKJA Papua Produktif	2 org
		4. POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung Administratif dan Substantif	Tim Kerja dari KPPN/DJPb Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan	5 org
4.	Staf/Karyawan	Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org

1.2.7 Sarana dan Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP, tersedia sarana dan prasarana utama pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Daftar sarana dan prasarana pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

NO.	URAIAN	SAT	VOL
1.	Bangunan Kantor	gdg	1
2.	Ruangan		
	a. Front Office	Ruang	1
	b. Ruang Rapat	Ruang	1
	c. Ruang Tamu	Ruang	1
	d. Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP PPS	Ruang	1
	e. Ruang Kerja Anggota POKJA dan Staf	Ruang	1
	f. Ruang Dapur	Ruang	1
	g. Kamar Mandi & Toilet	Ruang	1
3.	Peralatan dan Perlengkapan		
	1) Meja dan Kursi Kerja Pimpinan (3 kursi + 1 meja)	set	1
	2) Meja dan kursi sofa ruang pimpinan	set	1
	3) Meja dan kursi sofa ruang tamu	set	1
	4) Meja Anggota POKJA dan Staf	unit	1

NO.	URAIAN	SAT	VOL
	5) Kursi POKJA dan Staf	unit	6
	6) Meja dan kursi Front Office	set	1
	7) Smart TV	unit	2
	8) TIK Starlink (digunakan bersama)	unit	1
	9) Laptop	unit	4
	10) Printer	unit	1
	11) Hardisk Eksternal 1 TB	unit	1
	12) Kitchen Set	set	1
	13) Kulkas	unit	1
	14) Dispenser	unit	1
	15) Kompor Listrik	unit	1
	16) ATK	tersedia	
	17) Peralatan Makan	tersedia	

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat pada laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama Bulan Agustus Tahun 2026. Selama periode tersebut, Pokja Papua Sehat mengikuti dan melaksanakan empat kegiatan utama sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

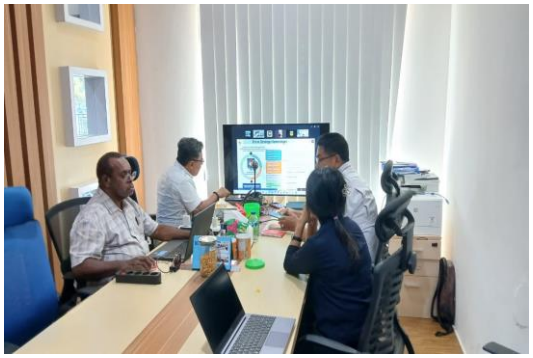
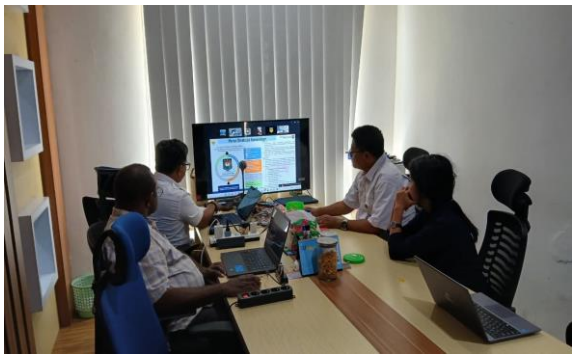
Kegiatan I. **Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tanah Papua bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Tabel 2.1 Rincian Kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN I		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	**:**	**Hari/Tanggal:** Rabu, 5 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 11.00 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	**:**	https://kemendagri-go-id.zoom.us/j/93200599707?pwd=WR4HbDdWbcOueLTOVJcGKuxDFZUQaS.1 via zoom
Judul Kegiatan	**:**	Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tanah Papua bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Misi / Keterangan	**:**	**Papua Sehat:** Pokja Papua Sehat BP3OKP mengemban misi untuk mengawal pemanfaatan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur agar benar-benar memberikan dampak dan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat di Tanah Papua. Secara rinci, misi tersebut mencakup: 1. Mengawal agar dana Otsus dan DTI, khususnya alokasi pada sektor kesehatan, tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna bagi masyarakat di Tanah Papua. 2. Menjembatani sinergi antara pemerintah pusat (Kemendagri, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga terkait) dengan pemerintah daerah se-Tanah Papua Selatan dalam percepatan realisasi anggaran, khususnya bidang kesehatan. 3. Memastikan layanan kesehatan dasar dan program pemberdayaan masyarakat Papua menjadi prioritas dalam perencanaan dan pemanfaatan dana Otsus/DTI
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	**:**	Dalam menjalankan misinya, Pokja Papua Sehat BP3OKP melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pendekatan SHEK, yaitu Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi, sebagai berikut:

KEGIATAN I		
		Sinkronisasi Menyelaraskan data perencanaan dan realisasi anggaran kesehatan, sehingga laporan realisasi dapat tereproduksi secara otomatis dan akurat. **Harmonisasi** Menyelaraskan kebijakan dan regulasi pusat **Evaluasi** Menilai kinerja penyaluran dana Otsus/DTI pada setiap tahap (Tahap 1 hingga Tahap 3), termasuk kesenjangan antara realisasi anggaran dan capaian output di lapangan serta memetakan kondisi SILPA yang belum tervalidasi di sejumlah daerah. **Koordinasi** Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi lintas provinsi/kabupaten se Papua Selatan.
Pelaksana Kegiatan	**:**	Kementrian Dalam Negeri
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	**:**	Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur terkait Kemendagri, perwakilan Kementerian Keuangan, Gubernur dan Sekda/Bappeda/BPKAD Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya dan Pokja Papua Sehat BP3OKP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	1. Mempercepat penyaluran dana Otsus/DTI Tahap 2 (target minimal 45%, paling lambat Juni 2026) yang hingga saat pertemuan tercatat masih tertinggal sekitar satu bulan dari target. 2. Memastikan seluruh pemerintah daerah menyusun dan menyelesaikan RAB/RAP perubahan serta validasi integrasi RAB-APBD sesuai arahan Surat Edaran Kemendagri. 3. Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap syarat administratif penyaluran, sekaligus mencegah risiko manipulasi dokumen dan penggunaan dana di luar peruntukan. 4. Memetakan status penyaluran dana Otsus/DTI per provinsi dan kabupaten/kota se-Tanah Papua sebagai dasar penentuan langkah pendampingan teknis lanjutan, termasuk untuk sektor kesehatan. 5. Mendorong penguatan interoperabilitas sistem perencanaan dan keuangan agar pelaporan realisasi dapat dilakukan secara otomatis dan real-time.
Hasil / Output Kegiatan	**:**	**a. Status Penyaluran Secara Umum**

KEGIATAN I		
		1. Penyaluran Tahap 1 (target minimal 30%, paling lambat April) secara umum telah terealisasi dengan baik; sejumlah daerah bahkan telah merealisasikan 100% lebih cepat dari target. 2. Penyaluran Tahap 2 (target minimal 45%, paling lambat Juni) masih tertinggal; per saat pertemuan (Agustus), realisasi belum memenuhi target dan tercatat terlambat sekitar satu bulan. 3. Secara keseluruhan, 9 daerah telah menyalurkan dana Tahap 2 dan 2 daerah lain sedang dalam proses; sebagian besar provinsi/kabupaten lain di Tanah Papua masih dalam tahap penyelesaian RAP/RAB perubahan. **b. Status Per Provinsi (berdasarkan laporan pada rapat)** Papua Selatan: penyaluran Tahap 1 telah dilaksanakan; Tahap 2 masih terkendala penyesuaian SILPA Otsus tahun sebelumnya, dengan target penyelesaian dalam waktu dekat. **c. Output Kegiatan** 1. Komitmen bersama seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua untuk menyelesaikan RAP/RAB perubahan dan menuntaskan validasi SILPA 2. Penguatan peran APIP/Inspektorat daerah dalam melakukan review kinerja dan pendampingan berkelanjutan, tidak hanya sebagai formalitas administratif. 3. Teridentifikasinya daerah-daerah dengan kendala spesifik (mis. penyesuaian SILPA, kelengkapan review APIP, keterlambatan input sistem) sebagai dasar pendampingan lanjutan oleh Pokja Papua Sehat BP3OKP
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:**	1. Pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota yang belum menyalurkan Tahap 2, segera menuntaskan penyusunan RAP perubahan/RAB serta validasi SILPA paling lambat akhir Agustus 2026. 2. Pokja Papua Sehat BP3OKP melakukan pendampingan teknis khusus pada alokasi sektor kesehatan agar SILPA dana kesehatan tidak menumpuk di akhir tahun dan capaian output layanan kesehatan meningkat sejalan dengan realisasi anggaran.
Kesimpulan dan Saran	**:**	**Kesimpulan** Secara umum, kerangka regulasi dan petunjuk teknis penyaluran dana Otsus dan DTI Tanah Papua telah tersedia dan

KEGIATAN I		
		diterbitkan secara memadai, baik melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kendala utama saat ini terletak pada kapasitas pelaksanaan di tingkat daerah, khususnya dalam penyusunan RAP perubahan, penyelesaian validasi SILPA, dan pemutakhiran data realisasi. Penyaluran Tahap 1 telah berjalan baik, namun Tahap 2 masih tertinggal dari target waktu yang ditetapkan, dengan variasi kesiapan yang cukup besar antar provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua. **Saran** 1. Perlu penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara berkelanjutan, tidak hanya pada forum evaluasi berkala, agar percepatan penyaluran dapat konsisten tercapai. 2. Pendampingan teknis kepada daerah yang masih tertinggal, khususnya pada penyusunan RAP dan validasi SILPA, perlu diintensifkan oleh Pokja Papua Sehat BP3OKP bersama Kemendagri dan Kemenkeu. 3. Perlu ditetapkan target yang lebih realistis dan mekanisme insentif/sanksi yang jelas bagi daerah yang konsisten tepat waktu maupun yang berulang kali terlambat dalam penyaluran.
Dokumentasi	**:**	
		

Kegiatan II. HUT Ke 1 Kodam XXIV/MT dan Brigif TP 83/Bugodi Tahun 2026

Tabel 2.2 Rincian Kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN 2		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	**:**	**Hari/Tgl :** Senin, 10 Agustus 2026 **Pukul** : 19.00-Selesai WIT
Lokasi Kegiatan	**:**	Lapangan Komando Daerah Militer XXIV/ Mandala Trikora
Judul Kegiatan	**:**	HUT Ke 1 Kodam XXIV/MT dan Brigif TP 83/Bugodi Tahun 2026

KEGIATAN 2		
Misi / Keterangan	**:**	Anggota BPP, Anggota Pokja Papua Cerdas, dan Papua Produktif
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	**:**	SHEK Kolaborasi Peran Pertahanan Keamanan dan Kebersamaan dalam peningkatanan Kesejahteraan Masayarakat
Pelaksana Kegiatan	**:**	Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	**:**	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, Forkopimda Provinsi Papua Selatan, dan empat Kabupaten, serta seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	Peringatan HUT Ke 1 Kodam XXIV/ Mandala Trikora
Hasil / Output Kegiatan	**:**	1. Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Papua Selatan dalam mendukung stabilitas dan kesejahteraan, terutama melalui peran Kodam 24 Mandala Trikora. Momen peringatan hari ulang tahun pertama dijadikan momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengharapan akan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa bagi wilayah dan warga Provinsi Papua Selatan. 2. HUT ini bukan hanya menjadi perayaan dan hiburan, tetapi juga sarana memperkuat motivasi dan komitmen prajurit Kodam 24 Mandala Trikora dalam menjalankan tugasnya di Papua Selatan. 3. Dengan semangat "Kenali, Datangi, Layani," Kodam berupaya membangun hubungan erat dan sinergi dengan masyarakat serta mengoptimalkan bantuan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Selatan. 4. Bekerja sama dengan kodam,pemda membina masyarakat demi papua selatan yang lebih sejatera
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:**	Bersinergi dan bersatu padu dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua Selatan
Dokumentasi	**:**	





Kegiatan III. RAPAT PARIPURNA

Tabel 2.3 Rincian Kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN 3		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tgl :** kamis 13 Agustus 2026 **Pukul :** 10.00-Selesai WIT
Lokasi Kegiatan	:	Ruang Rapat Utama DPR Papua Selatan (Kawasan Pusat Pemerintah Papua Selatan, Salor - Distrik Kurik Merauke
Judul Kegiatan	:	Rapat Paripurna Hasil Tindak Lanjut LHP BKP RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 Dan LHP Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 Sampai Dengan Semester I Tahun 2025
Misi / Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif BP3OKP
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	SHEK Hasil Realisasi Program Percepatan Pembangunan Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	:	Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat, DPR Provinsi Papua, BPK RI, Gubernur Papua Selatan, MRP, Sekda Provinsi Papua Selatan dan Undangan lainnya terlampir pada Undangan. Link berikut : https://drive.google.com/file/d/15V_HAp_CudW KGnQKzpTvI87UJLKcDoGX/view?usp=sharing
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mendengarkan penyampaian Hasil Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2025 Dan LHP Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2024 Sampai Dengan Semester I Tahun 2025
Hasil / Output Kegiatan	:	1. Penyampaian hasil kerja Pansus DPR Papua Selatan terhadap tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK RI 2. Pengelolaan aset daerah menjadi perhatian utama 3. Tindak lanjut rekomendasi BPK belum optimal 4. Ditemukan permasalahan penerimaan dari pemanfaatan aset 5. Dokumen pemanfaatan aset belum lengkap 6. Pengelolaan data aset masih menggunakan Microsoft Excel 7. Permasalahan status hukum Balai Diklat Utama Rawasari 8. Potensi kehilangan aset daerah 9. Pansus merumuskan 10 langkah rekomendasi kepada Gubernur 10. Gubernur diminta melakukan pengawalan langsung 11. Pengawasan DPR dilakukan secara berkala

KEGIATAN 3		
		12. Komitmen mempertahankan opini WTP
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:**	1. Hasil Pansus menjadi bahan pengawasan DPR terhadap penyelesaian rekomendasi BPK 2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan diminta melakukan pendataan dan inventarisasi aset secara menyeluruh, termasuk aspek administrasi, fisik dan hukum 3. OPD yang bertanggung jawab diminta mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih tertunda 4. Penerimaan pemanfaatan aset yang belum tercatat/disetor perlu segera ditertibkan dan dipastikan masuk ke kas pemerintah 5. Seluruh dokumen perikatan/pemanfaatan aset harus dilengkapi untuk memberikan kepastian hukum 6. Didorong optimalisasi sistem informasi manajemen aset agar data aset lebih terintegrasi, akurat dan mudah diawasi 7. Perlu penelusuran dan penegasan status kepemilikan/pengelolaan, sertifikasi, kelengkapan dokumen, serta koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat adat 8. Aset yang belum memiliki kejelasan administrasi dan legalitas harus segera diamankan untuk mencegah kehilangan aset dan persoalan hukum di kemudian hari 9. Meliputi penelusuran rekomendasi tertunda, penertiban penerimaan aset, percepatan sertifikasi tanah, pelengkapan dokumen, koordinasi dengan pemerintah kabupaten, serta penyelesaian persoalan hukum dan pengamanan aset 10. Gubernur diminta menetapkan OPD penanggung jawab, memberikan tenggat waktu penyelesaian, dan meminta laporan perkembangan secara berkala 11. DPR akan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran serta evaluasi kinerja OPD
Dokumentasi	**:**	





Kegiatan IV. Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Rapublik Indonesia

Tabel 2.4 Rincian Kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus2026

KEGIATAN 4		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	**:**	**Hari/Tanggal:** Senin,17 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 07.00 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	**:**	Di Kaltapal Merauke
Judul Kegiatan	**:**	Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia
Misi / Keterangan	**:**	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif BP3OKP PPS
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	**:**	SHEK Membangun Semangat Persatuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil,makmur,sejatera dan bermartabat.
Pelaksana Kegiatan	**:**	Pemprov Papua Selatan
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	**:**	Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas, Papua Sehat,Papua Produktif. DPR Provinsi Papua, Gubernur Papua Selatan, MRP, Sekda Provinsi Papua Selatan dan Masyarakat di Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	1. Memperingati hari bersejarah bagi bangsa dan negara kita dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 2. Memupuk dan Menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan ,kebersamaan,semangat kebangsaan ,serta nasionalisme. 3. Menjaga kebersamaan dan terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Hasil / Output Kegiatan	**:**	1. Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berjalan dengan aman, tertib, sukses dan lancar. Di pimpin oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo selaku inspektur upacara 2. Pembacaan naskah pancasila di lakukan oleh inspektur upacara, dilanjutkan pembacaan (UUD) 1945 oleh ketua MRP Papua Selatan.Sementara naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di bacakan oleh Bupati Merauke. 3. Pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putihdalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. di pimpin ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun,S.H.,M.H.,selaku inspektur upacara.

KEGIATAN 4		
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut		Melanjutkan kehadiran pada rangkaian pada malam resepsi kenegaraan HUT ke-81 kemerdekaan republik indonesia pada malam harinya
Dokumentasi	**:**	
		

Kegiatan V. Rapat pleno pembukaan rangkaian sesi pendampingan dan asistensi perbaikan evaluasi pelaksanaan musrembang otsus tahun 2026.

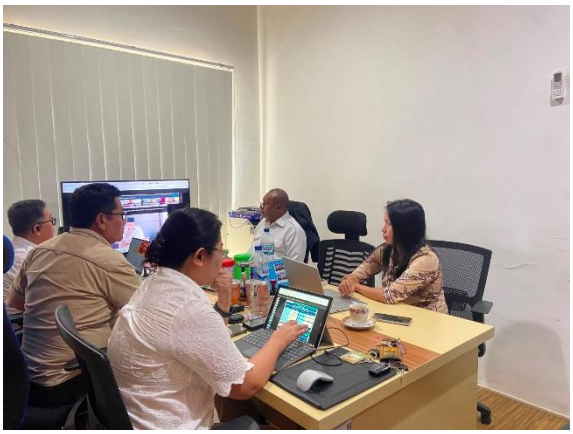
Tabel 2.5 Rincian Kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN 5		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	**:**	**Hari/Tanggal: Kamis**, 20 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 08.30 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	**:**	Via zoomeating
Judul Kegiatan	**:**	Pembukaan rangkaian sesi pendampingan dan asistensi perbaikan evaluasi pelaksanaan musrembang otsus tahun 2026
Misi / Keterangan	**:**	Pokja Papua Sehat merupakan penjabaran dari salah satu pilar misi percepatan pembangunan Papua, yaitu mewujudkan Papua yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera melalui Papua yang sehat, cerdas, produktif, serta damai. Secara khusus, misi Pokja Papua Sehat BP3OKP adalah: 1. Mengawal aspirasi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), agar tetap menjadi dasar arah pembangunan menuju kemandirian dan kesejahteraan. 2. Menjaga keselarasan antara Musrenbang OTSUS, RAPPP, serta perencanaan dan penganggaran daerah agar bergerak dalam satu arah kebijakan. 3. Mengawal implementasi dana OTSUS agar menghasilkan perubahan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan "setiap

KEGIATAN 5		
		rupiah dana OTSUS adalah amanat yang harus dapat ditelusuri, dipertanggungjawabkan, dan dirasakan manfaatnya." 4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), termasuk yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	**:**	Berdasarkan mandat kelembagaan BP3OKP sebagaimana disampaikan dalam rapat, tugas dan fungsi Pokja dijalankan melalui kerangka SHEK Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi/Pengendalian sebagai berikut: **Sinkronisasi** Menyelaraskan usulan hasil Musrenbang OTSUS dengan RAPPP 2025–2029 dan RIPPP 2022–2041, dengan target keselarasan 100%, Mendorong integrasi antar-sistem informasi: SIPD (Kemendagri), SIPD (Kementerian Keuangan), dan SIPPP (Bappenas), agar seluruh data perencanaan bersumber dari satu ekosistem yang sama. **Harmonisasi** Memberikan arah dan kebijakan umum agar program daerah tidak keluar dari koridor 19 program prioritas OTSUS dalam RAPPP,Menjembatani kesenjangan antara aspirasi masyarakat, dokumen perencanaan, sumber pendanaan (OTSUS block grant, specific grant, Dana Tambahan Infrastruktur/DTI), dan implementasi di lapangan,Mendorong tagging dan labeling sumber dana pada setiap program/kegiatan agar tidak terjadi pencampuran sumber pendanaan. **Evaluasi** Mengevaluasi hasil pelaksanaan Musrenbang OTSUS 2026, termasuk tingkat keselarasan usulan daerah terhadap RAPPP,Mengidentifikasi pola ketidakselarasan: usulan yang bersifat administratif/tugas reguler, pemetaan sumber dana OTSUS dan DTI yang belum jelas, serta kualitas input anggaran yang masih lemah,Menindaklanjuti hasil Evaluasi Rencana Penganggaran (EVRAN) dari BPKP sebagai bahan perbaikan perencanaan. **Koordinasi** Berperan sebelum, saat, dan setelah Musrenbang: mengawal isu strategis sebelum forum, menjaga kualitas usulan selama forum,
Pelaksana Kegiatan	**:**	Bapenas/Kementrian PPN

KEGIATAN 5		
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	Bapenas/Kementrian PPN, Kementrian keuangan, Kementrian dalam negeri, KPK, Pemerintah daerah.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mengevaluasi tingkat keselarasan hasil Musrenbang OTSUS Tahun 2026 dengan RAPPP 2025–2029 di seluruh provinsi Tanah Papua. 2. Mengidentifikasi daerah (provinsi/kabupaten) yang belum mengunci hasil Musrenbang dalam sistem SIPPP maupun yang belum menyelesaikan rancangan RKPD. 3. Melaksanakan pendampingan/asistensi langsung kepada pemerintah daerah se-Tanah Papua untuk memperbaiki keselarasan usulan program dengan RAPPP hingga mencapai target 100%. 4. Memastikan sasaran penggunaan dana OTSUS tepat sasaran, yaitu untuk kepentingan Orang Asli Papua (OAP), dengan sumber pendanaan yang jelas dan dapat ditelusuri (audit trail). 5. Memperkuat tata kelola dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana OTSUS melalui kolaborasi Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, KPK, BPKP, dan BP3OKP. 6. Menegaskan peran strategis BP3OKP sebagai pengarah, penyelaras, dan pengawal proses perencanaan-penganggaran-pelaksanaan di daerah.
Hasil / Output Kegiatan	:	**a.Temuan Evaluasi Keselarasan** 1. Rata-rata tingkat keselarasan usulan Musrenbang OTSUS terhadap RAPPP secara nasional (Tanah Papua) tercatat 57,049%. 2. Masih terdapat 11 daerah (10 kabupaten dan 1 provinsi) yang belum mengunci hasil Musrenbang di sistem SIPPP; 6 di antaranya belum menyelesaikan rancangan RKPD. 3. Sebagian besar ketidakselarasan bersumber dari usulan yang bersifat administratif/rutin, pemetaan sumber dana OTSUS dan DTI yang belum jelas, serta kualitas input anggaran yang belum matang. **b. Output Kelembagaan dan Regulasi** 1. Terbitnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Musrenbang OTSUS. 2. Penandatanganan Komitmen Bersama oleh seluruh gubernur, ketua DPRD/perwakilan, Ketua MRP, dan disaksikan Ketua KPK pada Rapat Koordinasi 16 Juli 2026 di Jayapura, mencakup 5 area rencana aksi (perencanaan, penganggaran, tagging sumber dana, pelaksanaan, dan

KEGIATAN 5		
		pelaporan-pertanggungjawaban) dengan 18 rencana aksi turunan. 3. Surat Bappenas kepada 48 kepala daerah (tindak lanjut Rakor 16 Juli 2026) dan surat tanggal 12 Agustus 2026 perihal penyampaian dokumen komitmen bersama, kertas kerja, dan timeline implementasi rencana aksi. 4. Rencana pendampingan/asistensi selama 3 hari ke depan di seluruh ibu kota provinsi Tanah Papua dengan output berupa Berita Acara Perbaikan Hasil Evaluasi Musrenbang OTSUS dan daftar perbaikan usulan program yang diselaraskan dengan RAPPP.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:**	Melaksanakan pendampingan intensif (asistensi) ke seluruh kabupaten/kota se-Tanah Papua selama 3 hari, dengan tim gabungan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menyelesaikan penguncian data di SIPPP dan penyusunan/finalisasi RKPD.
Kesimpulan dan Saran	**:**	**Kesimpulan:** Pelaksanaan Musrenbang OTSUS Tahun 2026 menunjukkan kemajuan dalam hal kelengkapan instrumen perencanaan (RIPPP, RAPPP, dan sistem SIPPP yang terintegrasi dengan SIPD dan SIKD), namun tingkat keselarasan usulan daerah terhadap RAPPP masih di bawah target. Ketidakselarasan sebagian besar bersumber dari praktik perencanaan yang masih bersifat administratif-seremonial serta belum optimalnya koordinasi lintas sistem. BP3OKP telah menjalankan perannya sebagai pengarah, penyelaras, dan pengawal proses perencanaan melalui kerangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK), termasuk melalui program konkret seperti layanan kesehatan bergerak di wilayah 3T. **Saran:** 1. Pemerintah daerah agar segera menuntaskan RKPD dan penguncian SIPPP sesuai batas waktu yang berlaku, mengingat konsekuensi keterlambatan terhadap seluruh siklus perencanaan-penganggaran daerah. 2. Perlu penguatan koordinasi rutin antara BP3OKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan KPK untuk mengawal implementasi 18 rencana aksi yang telah disepakati bersama. 3. Target keselarasan 100% perlu terus dikawal secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten/kota, dengan prioritas pada wilayah yang capaiannya masih rendah.
Dokumentasi	**:**	

KEGIATAN 5
 

Kegiatan VI. Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Musrembang Otonomi Khusus Papua Selatan

Tabel 2.6 Rincian Kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN 6		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	**:**	**Hari/Tanggal:** Kamis 20 Agustus 026 **Waktu:** Pukul 09.00 WIT – se lesai
Lokasi Kegiatan	**:**	Kantor Bupati Papua Selatan
Judul Kegiatan	**:**	Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Musrembang Otonomi Khusus Papua Selatan
Misi / Keterangan	**:**	Pokja Papua Sehat merupakan salah satu dari tiga kelompok kerja utama BP3OKP (bersama Pokja Papua Cerdas dan Pokja Papua Produktif) yang mengemban misi RAPPP di bidang kesehatan antara lain: Mengawal agar seluruh perencanaan dan penganggaran sub kegiatan bidang kesehatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus selaras dengan RAPPP 2025–2029, tepat sasaran bagi OAP, dan bebas duplikasi dengan sumber pendanaan lain (DAU, DTI, APBD).
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	**:**	Dalam pelaksanaan pendampingan evaluasi Musrenbang Otsus, Pokja Papua Sehat BP3OKP menjalankan empat fungsi pokok yang disingkat SHEK, yaitu: **Sinkronisasi** Menyandingkan (tagging) usulan sub kegiatan bidang kesehatan hasil Musrenbang Otsus provinsi dan kabupaten dengan nomenklatur, program percepatan, dan indikator yang tercantum dalam dokumen RAPPP, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan pusat dan daerah. **Harmonisasi**

KEGIATAN 6		
		Menyelaraskan program/kegiatan kesehatan lintas Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya) serta lintas sumber pendanaan (Otsus, DAU, DTI, APBD) agar tidak terjadi duplikasi anggaran maupun kegiatan, misalnya pada pembangunan/operasional Puskesmas dan pengadaan sarana kesehatan. **Evaluasi** Menilai status keselarasan (selaras/tidak selaras) setiap sub kegiatan bidang kesehatan yang diusulkan tiap kabupaten terhadap RAPPP, disertai analisis urgensi, prioritas, volume, dan besaran anggaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan OAP. **Koordinasi** Memfasilitasi forum diskusi dan pendampingan langsung bersama Direktorat Bappenas, KPK, Kemendagri, Kemenkeu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh klarifikasi atas hasil evaluasi, menampung usulan baru/perbaikan, serta merumuskan kesepakatan tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
Pelaksana Kegiatan	**:**	Bapenas/Kementrian PPN
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	**:**	Bapenas/Kementrian PPN, Kementrian keuangan, Kementrian dalam negeri, KPK, Pemerintah daerah.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	1. Memastikan seluruh sub kegiatan bidang kesehatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Selatan dan kabupaten selaras dengan RAPPP 2025–2029. 2. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi sub kegiatan kesehatan yang masih dinilai belum selaras, serta merumuskan solusi berupa perbaikan tagging, revisi substansi, penajaman indikator, atau pengalihan sumber pendanaan. 3. Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus agar tepat sasaran, tidak berulang (duplikatif), dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Orang Asli Papua, termasuk di kampung dan wilayah pesisir/3T. 4. Membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kriteria keselarasan program kesehatan (selaras terhadap sistem/SIPPP maupun terhadap substansi dokumen RAPPP). 5. Menghasilkan Berita Acara Kesepakatan sebagai dasar dan pedoman perbaikan usulan bagi setiap provinsi/kabupaten untuk tahapan perencanaan dan penganggaran berikutnya.
Hasil / Output Kegiatan	**:**	**Provinsi Papua Selatan** Jumlah rekomendasi:380

KEGIATAN 6		
		Jumlah selaras:170 Jumlah belum selaras:210 **Kabupaten Merauke** Jumlah rekomendasi:109 Jumlah selaras:76 Jumlah belum selaras:33 **Kabupaten Boven Digoel** Jumlah rekomendasi:110 Jumlah selaras:61 Jumlah belum selaras:49 **Kabupaten Asmat** Jumlah rekomendasi:147 Jumlah selaras:97 Jumlah belum selaras:50 **Kabupaten Mappi** Jumlah rekomendasi:76 Jumlah selaras:60 Jumlah belum selaras:16 Dari jumlah di atas masih ada beberapa kendala sehingga belum mencapai 100% 1. **Masih banyak sub kegiatan yang bersifat rutin/administratif** yang seharusnya fokus pada prioritas pembangunan 2. **Perbedaan antara pusat dan daerah**, ada kegiatan yang di usulkan daerah di anggap penting /urgen tetapi tidak termasuk di dalam ketergori referensi 3. **Kesalahan tagging sumber dana** di sistem SIPPP sehingga tercatat "tidak selaras" namun masih bisa di dorong menjadi selaras 4. **Selisi nomenklatur** sub kegiatan sama tetapi penamaan berbeda dari referensi yang ada sehingga tercatat "tidak selaras" 5. **Ketimpangan jumlah usulan dan anggaran**, jumlah usulan meningkat dari tahun sebelumnya, beberapa jumlah anggaran yang tidak sesuai kegiatan membuat persentase ketidak selarassn naik. 6. **Timline yang tidak sinkron** RKPD sudah di tetapkan lebih dahulu,sementara proses singkronisasi referensi RAPPP baru berjalan belakangan setelahnya

KEGIATAN 6		
		7. **Duplikasi anggaran** masih ada sub kegiatan pembanguna puskesmas yang belum di pastikan apakah tidak di danai dari sumber pendanaan lain. 8. **Volume satuan** belum sesuai dengan outcome yang di harapkan
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	1. Terhadap sub kegiatan tersebut, BP3OKP memandang perlu untuk mempertahankan beberapa usulan dimaksud mengingat urgensi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan riil pembangunan di daerah, guna dipertimbangkan agar dapat diselaraskan dengan RAPPP 2025-2029 2. Dari setiap sub kegiatan BP3OKP memberikan penegasanh kewajiban labeling dana Otonomi Khusus pada setiap kegiatan 3. Pokja sehat akan memberikan pendampingan lanjutan ke Dinas terkait.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** Secara umum , hasil evaluasi menunjukan bahwa keselarasan usulan sub kegiatan yang bersumber dari dana otonimi khusus terhadap RAPPP 2025-2029 sudah berada pada tingkat cukup baik,namun belum optimal tergantung wilayah Ketidakselarasan yang terjadi bukan di sebabkan oleh ketidak relevanan kegiatan itu sendiri,melainkan lebih banyak di sebabkan pleh perbedaan penilaian teknis antara pusat dan daerah,kesalahan teging sistem,serta referensi yang belum sepenuhnya mengakomodasi konsisi rill di lapangan **Saran** Seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki usulan secara kolaboratifdan berkelanjutan,dengan target akhir keselarasan mencapai 100% agar pemanfaatan Dana Otonomi Khusus benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejateraan masyarakat papua
Dokumentasi	:	
		

KEGIATAN 6
 

KEGIATAN VII. Rapat Koordinasi BP3OKP dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Pelaksanaan dan Pengawasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Wilayah Papua dan Papua Selatan

Tabel 2.7 Rincian Kegiatan I Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan JuLi 2026

KEGIATAN 7		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Rabu, 26 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 09.30 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	:	Kantor BP3OKP
Judul Kegiatan	:	Rapat Koordinasi BP3OKP dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Pelaksanaan dan Pengawasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Wilayah Papua dan Papua Selatan
Misi / Keterangan	:	Misi Pokja Papua Sehat dirumuskan sebagai berikut: 1. Mengawal dan mendampingi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus agar selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) dan tepat sasaran kepada Orang Asli Papua (OAP). 2. Memastikan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dana Otsus sektor kesehatan pada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Papua. 3. Mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui kolaborasi dengan lembaga pengawas seperti BPKP, BPK, dan KPK, tanpa terjadi duplikasi kewenangan.

KEGIATAN 7		
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	**:**	**Sinkronisasi** Menyelaraskan program dan kegiatan bidang kesehatan dalam RKPD/RPJMD kabupaten/kota dan provinsi dengan RAPPP serta sistem interoperabilitas SIPD–SIKD–SIP3, agar setiap kegiatan yang bersumber dari dana Otsus ter-tagging secara jelas **Harmonisasi** Menyelaraskan regulasi dan peran antarlembaga BP3OKP, Sekretariat Eksekutif, Komite Eksekutif, BPKP, BPK, dan KPK agar tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi tugas pengawasan, serta memastikan persepsi yang sama atas ketentuan PP 106/46, PP 107, dan PMK 33 mengenai kewajiban pelibatan BP3OKP oleh pemerintah daerah. **Evaluasi** Melaksanakan pendampingan evaluasi RAPPP dan evaluasi laporan pertanggungjawaban dana Otsus sektor kesehatan **Koordinasi** Membangun koordinasi lintas pemangku kepentingan Bappeda, DPMPTSP/DPMPB, OPD teknis, Sekretariat Eksekutif, Komite Eksekutif, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, BPKP, BPK, dan KPK dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Otsus
Pelaksana Kegiatan	**:**	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	**:**	BPKP,Ketua dan anggota pokja BP3OKP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	1. Menyamakan persepsi antara Pokja Papua Sehat BP3OKP dan BPKP mengenai batas kewenangan dan peran masing-masing lembaga dalam pengawasan pelaksanaan Otsus, agar tidak terjadi duplikasi fungsi pengawasan. 2. Memperoleh akses terhadap laporan hasil audit/pemeriksaan BPKP secara utuh beserta dokumen pendukung (bukan hanya ikhtisar), sebagai referensi Pokja dalam melaksanakan fungsi evaluasi terhadap capaian program kesehatan yang dibiayai dana Otsus. 3. Mendorong keterlibatan aktif BP3OKP/Pokja Papua dalam forum Musrenbang, penyusunan dan evaluasi RAPPP, sebagaimana diamanatkan PP Nomor 107 dan PMK Nomor 33. 4. Mengidentifikasi akar masalah pelaksanaan Otsus bidang kesehatan di lapangan — antara lain validitas data Orang Asli Papua (OAP), tagging anggaran, keterlambatan

KEGIATAN 7		
		pelaporan, dan pergantian pejabat OPD — untuk dirumuskan solusi bersama 5. Memperkuat sinergi antara BP3OKP, Sekretariat Eksekutif, dan lembaga pengawasan (BPKP, BPK, KPK) dalam mengawal percepatan pembangunan kesehatan menuju target Papua Sehat 2041
Hasil / Output Kegiatan	**:**	1. Ditemukan ketidaksinkronan antara penerima manfaat (Orang Asli Papua) dengan output fisik kegiatan, misalnya volume bangunan/fasilitas yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat riil. 2. Laporan penyaluran bantuan (contoh: bibit dan sarana produksi) di empat kabupaten dan satu provinsi pada tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan realisasi penyaluran di lapangan. 3. Estimasi manfaat dana Otsus yang benar-benar sampai kepada masyarakat OAP di lapangan (berdasarkan pengalaman salah satu kabupaten) berkisar 30–40% dari total anggaran, sisanya terserap pada belanja birokrasi dan operasional pendukung. 4. Pergantian pejabat/Kepala OPD kerap menyebabkan hilangnya kontinuitas data akibat belum terintegrasinya sistem dokumentasi dalam satu basis data (government cloud).
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:**	1. BPKP agar menyediakan laporan hasil audit/evaluasi secara lengkap beserta dokumen pendukung (bukan hanya ikhtisar) kepada BP3OKP/Pokja Papua Sehat, sebagai referensi resmi dalam pelaksanaan fungsi evaluasi, sesuai amanat PP 107 dan PMK 33. 2. Mengembangkan instrumen pengukuran dampak (outcome) program kesehatan berbasis data Orang Asli Papua yang lebih valid, dengan mempertimbangkan kolaborasi bersama basis data terpadu , guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. 3. Memperluas cakupan lokus kunjungan dan pendampingan lapangan Pokja Papua Sehat ke seluruh kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Selatan (termasuk Mappi dan Asmat)
Kesimpulan dan Saran	**:**	**Kesimpulan** Kolaborasi antara BP3OKP, BPKP, BPK, dan KPK menjadi kunci untuk menghindari duplikasi pengawasan sekaligus memastikan setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara konkret

KEGIATAN 7		
		demi percepatan pembangunan kesehatan di Papua, sejalan dengan target besar Papua Sehat pada tahun 2041 **Saran** 1. Perlu komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, BPKP, BPK, KPK, dan Kementerian/Lembaga terkait) untuk mematuhi regulasi yang telah ada, khususnya kewajiban pelaporan dan pelibatan BP3OKP, agar fungsi SHEK dapat berjalan optimal. 2. Perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan anggaran operasional Pokja Papua Sehat agar dapat menjangkau seluruh wilayah dampingan secara merata dan berkelanjutan. 3. Diperlukan evaluasi berkala dan sistem pemantauan berbasis data yang terintegrasi agar setiap kebijakan perbaikan dapat diukur dampaknya secara objektif, bukan sekadar berdasarkan asumsi.
Dokumentasi	**:**	
		

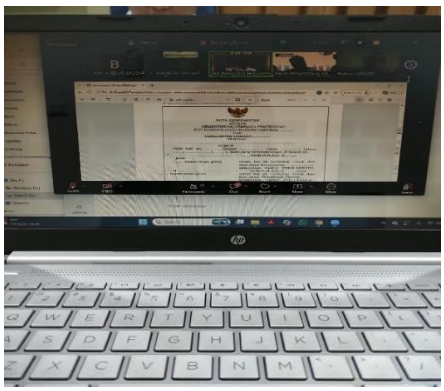
KEGIATAN VIII. Pembahasan MOU dan Perjanjian kerja sama terkait Malaria,Imunisasi dan Kesehatan Ibu Anak

Tabel 2.8 Rincian Kegiatan I Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan JuLi 2026

KEGIATAN 8		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Rabu, 26 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 13.00 WIT – selesai
Lokasi Kegiatan	**:**	Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91285025656?pwd=shcz04N5mUNHRzxcQNXzT33BXLylt2.1

KEGIATAN 8		
Judul Kegiatan	**:**	Pembahasan MOU dan PKS terkait Malaria,Imunisasi dan Kesehatan Ibu Anak
Misi / Keterangan	**:**	1. Mendorong percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak (AKI/AKAB), khususnya di wilayah pelosok dan sangat terpencil di Provinsi Papua Selatan. 2. Mendukung upaya eliminasi malaria dan peningkatan cakupan imunisasi di wilayah Provinsi Papua Selatan. 3. Memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas instansi (Pemerintah Provinsi, TNI/Kodam XVI Pattimura, BKK, dan mitra pembangunan seperti WHO) dalam penanganan masalah kesehatan daerah terpencil.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakans		**Sinkronisasi:** BP3OKP sebagai orkestrator menyinkronkan program eliminasi malaria lintas sektor (Dinas Kesehatan, BKK, TNI, dan mitra pembangunan). **Harmonisasi:** Mengharmonisasikan kebijakan, regulasi, dan alur logistik satu pintu antara provinsi, kabupaten, dan satuan TNI. **Evaluasi:** Mengevaluasi situasi epidemiologi, tantangan pelaporan (Sismal), kepatuhan minum obat, serta faktor perilaku dan lingkungan. **Koordinasi:** Memfasilitasi forum lintas sektor, penyusunan MOU tiga pihak, dan FGD di Boven Digoel.
Pelaksana Kegiatan	**:**	Unicef dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Merauke
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	**:**	BP3OKP Provinsi Papua Selatan / Pokja Papua Sehat; Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke; Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten; unsur TNI dan UNICEF
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	1. Membahas dan menyepakati substansi draf MoU (Nota Kesepakatan) antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kodam XVI/Pattimura, dan BKK secara pasal per pasal. 2. Menyamakan persepsi mengenai istilah hukum yang tepat digunakan (nota kesepakatan/nota kesepahaman) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menindaklanjuti arahan Gubernur Papua Selatan terkait strategi penanganan kesehatan ibu dan anak, eliminasi malaria, dan peningkatan cakupan imunisasi, termasuk penguatan SDM kesehatan di daerah terpencil.

KEGIATAN 8		
		4. Menyepakati rencana tindak lanjut penandatanganan MoU, termasuk koordinasi waktu dengan Gubernur Papua Selatan.
Hasil / Output Kegiatan	**:**	1. Disepakati penggunaan istilah “nota kesepakatan” dalam draf MoU, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Selatan bertindak sebagai pemrakarsa (pemegang karsa) kerja sama, dan mengacu pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 yang tidak lagi menggunakan istilah “nota kesepahaman”. 2. Teridentifikasi tiga pihak yang akan menandatangani MoU, yaitu Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kodam XVI/Pattimura, dan BKK. 3. Tercatat adanya dua pihak yang telah menyampaikan masukan tertulis atas draf MoU/PKS, yaitu Diskes dan BP3LHD, untuk dibahas dan diakomodasi dalam draf berikutnya. 4. Disepakati rencana pembahasan lanjutan untuk draf PKS yang bersifat lebih teknis, melibatkan Dinas Kesehatan, Kodam, dan BKK. 5. Disepakati rencana koordinasi jadwal penandatanganan MoU dengan Gubernur Papua Selatan, dengan opsi pelaksanaan bersamaan dengan agenda penyerahan hibah ambulans untuk Puskesmas dan lima klinik PMI.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:**	1. Perwakilan Kodam XVI/Pattimura agar melaporkan hasil kesepakatan istilah kepada Kasdam IV/Mandala guna memperoleh konfirmasi resmi sebelum penandatanganan. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan bersama Kodam XVI/Pattimura dan BKK agar menjadwalkan rapat lanjutan untuk membahas substansi PKS secara lebih teknis, pasal per pasal. 3. Sekretariat BKK agar mengoordinasikan jadwal Gubernur Papua Selatan untuk penandatanganan MoU, termasuk opsi penggabungan agenda dengan penyerahan hibah ambulans dan klinik PMI. 4. Pokja Papua Sehat agar terus memantau perkembangan data angka kematian ibu dan anak di Papua Selatan sebagai dasar evaluasi capaian program ke depan.
Kesimpulan dan Saran	**:**	**Kesimpulan** 1. Rapat telah berhasil membahas dan menyepakati poin mendasar dalam draf MoU, khususnya terkait penggunaan istilah “nota kesepakatan”, sebagai landasan awal sebelum pembahasan PKS yang lebih teknis.

KEGIATAN 8		
		2. Komitmen dan dukungan Gubernur Papua Selatan terhadap penyelesaian isu kesehatan ibu dan anak, eliminasi malaria, dan peningkatan cakupan imunisasi menjadi modal penting bagi keberlanjutan kerja sama ini. 3. Kerja sama tiga pihak (Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kodam XVI/Pattimura, dan BKK) berpotensi memperkuat penanganan masalah kesehatan di wilayah terpencil Papua Selatan secara lintas sektor. **Saran** 1. Perlu memastikan seluruh pihak, khususnya unsur TNI, memperoleh konfirmasi internal terlebih dahulu agar tidak terjadi kendala administratif menjelang penandatanganan. 2. Perlu dokumentasi dan pengarsipan yang tertib atas seluruh masukan tertulis dan lisan agar proses penyempurnaan draf berjalan transparan dan akuntabel. 3. Pokja Papua Sehat BP3OKP disarankan untuk terus mengawal proses ini hingga tahap penandatanganan dan implementasi, termasuk pemantauan pelaksanaan Peraturan Gubernur/Ranperda terkait pelimpahan wewenang tenaga kesehatan.
Dokumentasi	**:**	
		

KEGIATAN IX. Kunjungan koordinasi Anggota DPR Afirmasi Papua Selatan

Tabel 2.9 Rincian Kegiatan I Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan JuLi 2026

KEGIATAN 9		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Rabu, 27 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 13.00 WIT – selesai

KEGIATAN 9		
Lokasi Kegiatan	**:**	Kantor BP3OKP
Judul Kegiatan	**:**	Kunjungan koordinasi Anggota DPR Afirmasi Papua Selatan
Misi / Keterangan	**:**	1. Berdasarkan hasil koordinasi dan temuan lapangan, Pokja Papua Sehat BP3OKP mengemban misi sebagai berikut: 2. Mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal Papua Selatan, khususnya distrik-distrik dengan geografis sulit (kepulauan, rawa, dan pedalaman). 3. Membangun sinergi lintas pemangku kepentingan — Pemerintah Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, DPR Papua Selatan, gereja/paroki, dan sektor swasta (CSR perusahaan) — dalam percepatan pembangunan kesehatan. 4. Mendukung ketersediaan sarana transportasi dan rujukan medis (ambulans darat dan air) yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing distrik. 5. Bersinergi dengan Pokja Cerdas dan Pokja Produktif dalam kerangka "Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif" untuk pembangunan sumber daya manusia Papua secara menyeluruh.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakans		**Sinkronisasi** 1. Menyinkronkan data dan temuan kondisi kesehatan di lapangan (ketiadaan ambulans, honor nakes tertunggak, keterbatasan obat) dengan program dan kebijakan yang telah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi maupun Kementerian Kesehatan. 2. Menyinkronkan agenda Pokja Papua Sehat dengan agenda Pokja Cerdas dan Pokja Produktif agar kunjungan dan intervensi ke distrik yang sama dapat dilakukan secara terpadu. **Harmonisasi** Mengharmoniskan kepentingan dan peran antar-pemangku kepentingan Dinas Kesehatan, DPR Papua Selatan, tokoh gereja/paroki, dan sektor swasta (CSR) dalam satu arah kebijakan percepatan pembangunan kesehatan. **Evaluasi**

KEGIATAN 9		
		1. Mengevaluasi efektivitas layanan rujukan darurat yang selama ini bergantung pada kendaraan pikap dan ojek berbayar akibat ketiadaan ambulans selama dua tahun terakhir. 2. Mengevaluasi kesenjangan standar pelayanan kesehatan dasar antar-kabupaten (Boven Digoel, Mappi, Asmat, Merauke), termasuk ketersediaan tenaga, obat, dan sarana rujukan. 3. Mengevaluasi capaian dan kendala program yang telah berjalan, seperti pelatihan SDM dan realisasi bantuan ambulans pascakoordinasi dengan Dinas Kesehatan. **Koordinasi** 1. Berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi terkait usulan tenaga dokter spesialis dan percepatan pengiriman kendaraan ambulans. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk menindaklanjuti laporan tenaga honor yang belum dibayar. 3. Mengoordinasikan rencana kunjungan lapangan bersama Pokja Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Pelaksana Kegiatan	**:**	Anggota DPR Afirmasi Papua Selatan
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	**:**	Anggota DPR Afirmasi Papua Selatan dan Kepala BP3OKP dan pokja sehat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	1. Menindaklanjuti keluhan masyarakat dan tenaga kesehatan terkait honor yang belum dibayarkan serta ketiadaan sarana ambulans. 2. Melakukan koordinasi langsung dengan BP3OKP, Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi dan pemangku kepentingan terkait untuk percepatan solusi. 3. Menjajaki dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut (Bio, MAM/Korindo Group, GPA, MNM) untuk mendukung sarana kesehatan dan pelatihan SDM. 4. Memperkuat koordinasi lintas Pokja (Sehat, Cerdas, dan Produktif) dalam agenda kunjungan lapangan bersama.
Hasil / Output Kegiatan	**:**	Temuan Lapangan

KEGIATAN 9		
		1. Tenaga kesehatan di wilayah Bade/Baduy sebagian besar berstatus honor dan mengalami keterlambatan/tidak dibayarkannya honor. 2. Fasilitas kesehatan tidak memiliki mobil ambulans selama kurang lebih dua tahun; layanan rujukan dan penjemputan pasien (termasuk ibu melahirkan) terpaksa menggunakan mobil pikap, dengan masyarakat dibebani biaya ojek hingga Rp100.000 per rujukan. 3. Sistem rujukan berjenjang (Puskesmas → Rumah Sakit Mappi) berjalan lambat, rata-rata 3-4 tahun sejak usulan awal untuk kasus tertentu, dan dibutuhkan koordinasi ulang dengan Dinas Kesehatan. Output/Capaian Konkret 1. Komitmen lisan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi (dr. Roni) untuk mengirimkan 1 (satu) unit mobil ambulans dalam waktu dekat. 2. Kesepakatan untuk menjadwalkan kunjungan bersama Pokja Sehat, Pokja Cerdas, dan Pokja Produktif ke wilayah Bade/Baduy, dengan agenda diajukan minimal dua minggu sebelumnya. 3. Terselenggaranya program pelatihan public speaking, kepemimpinan, dan komputer bagi generasi muda Papua di Distrik 4. Rencana pendekatan kepada perusahaan MAM (anak perusahaan Korindo Group) untuk realisasi dana CSR, termasuk dukungan ambulans dan pelatihan keterampilan (mekanik/teknik) bagi masyarakat lokal.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**:**	1. Menjadwalkan kunjungan lapangan bersama Pokja Sehat, Cerdas, dan Produktif ke Bade/Baduy 2. Melakukan cross-check sistem rujukan Puskesmas–Rumah Sakit dengan Kepala Dinas Kesehatan
Kesimpulan dan Saran	**:**	**Kesimpulan** Kondisi layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil Papua Selatan masih menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi sarana transportasi rujukan (ambulans), kesejahteraan tenaga kesehatan honorer, dan efektivitas sistem rujukan berjenjang. **Saran**

KEGIATAN 9		
		Disarankan agar hasil kunjungan dan koordinasi ini turut dilaporkan secara berjenjang kepada pemangku kebijakan terkait guna mendapatkan dukungan kebijakan dan anggaran
Dokumentasi	**:**	
 		

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan sembilan kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan selama Bulan Agustus 2026, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap 2 masih tertinggal dari target waktu yang ditetapkan, dengan kendala utama pada penyelesaian RAP/RAB perubahan dan validasi SILPA di sejumlah daerah, meskipun kerangka regulasi dan petunjuk teknis penyalurannya telah tersedia secara memadai.
3. Tingkat keselarasan usulan Musrenbang Otsus terhadap RAPPP 2025-2029 secara nasional di Tanah Papua tercatat 57,05%, sementara di Provinsi Papua Selatan baru mencapai sekitar 44,7% (170 dari 380 rekomendasi), dengan variasi capaian antar kabupaten (Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi), sehingga masih memerlukan pendampingan lanjutan.
4. Koordinasi antar lembaga pengawas (BP3OKP, BPKP, BPK, dan KPK) perlu terus diperkuat agar tidak terjadi duplikasi fungsi pengawasan, sekaligus memastikan temuan lapangan seperti ketidaksesuaian output fisik dengan penerima manfaat dapat ditindaklanjuti secara konkret.
5. Pembahasan MoU dan PKS lintas sektor terkait penanganan malaria, imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kodam XVI/Pattimura, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan telah mencapai kesepakatan substansi awal, namun masih memerlukan proses finalisasi hukum dan administratif sebelum penandatanganan.
6. Rencana Kunjungan lapangan ke wilayah terpencil (Kabupaten Mappi) menemukan kondisi layanan kesehatan dasar yang masih memprihatinkan, antara lain ketiadaan ambulans, honor tenaga kesehatan honorer yang tertunggak, dan sistem rujukan berjenjang yang belum berjalan efektif.

Secara umum, seluruh kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada Bulan Agustus 2026 telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan berbagai kesepakatan serta rekomendasi tindak lanjut. Namun demikian, tantangan implementasi di tingkat daerah, baik dari sisi administratif, kelembagaan, maupun sarana pelayanan kesehatan dasar, masih memerlukan pengawalan yang konsisten agar pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di bidang kesehatan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan Orang Asli Papua.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan kesimpulan di atas, Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian RAP/RAB perubahan dan validasi SILPA oleh pemerintah daerah yang belum menyalurkan Dana Otsus/DTI Tahap 2, disertai pendampingan teknis intensif dari Pokja Papua Sehat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
3. Mengintensifkan pendampingan penyelarasan usulan Musrenbang Otsus dengan RAPPP 2025-2029 hingga mencapai target keselarasan 100%, dengan prioritas pada kabupaten yang capaiannya masih rendah.
4. Memperkuat koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara BP3OKP dengan lembaga pengawas (BPKP, BPK, dan KPK) guna menghindari duplikasi pengawasan dan mempercepat tindak lanjut temuan.
5. Mempercepat finalisasi dan penandatanganan MoU serta PKS terkait malaria, imunisasi, dan kesehatan ibu dan anak agar implementasi program dapat segera berjalan.
6. Memperluas jangkauan kunjungan dan pendampingan lapangan Pokja Papua Sehat ke seluruh kabupaten/kota di wilayah Papua Selatan, termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil, serta menindaklanjuti secara konkret persoalan honor tenaga kesehatan dan ketersediaan sarana rujukan (ambulans).s

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BADAN PENGARAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
PROVINSI PAPUA SELATAN

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA SEHAT

BULAN
AGUSTUS 2026

"Papua Selatan Sehat, Mandiri dan Sejahtera"

















JAMINAN KESEHATAN ORANG ASLI PAPUA

PENINGKATAN UMUR HARAPAN HIDUP

PENURUNAN STUNTING

ELIMINASI MALARIA

SINKRONISASI • HARMONISASI • EVALUASI • KOORDINASI (SHEK)

Bersama Mewujudkan Papua Sehat, Mandiri dan Sejahtera

LAPORAN HASIL KEGIATAN

ANGGOTA POKJA PAPUA SEHAT BP3OKP

PROVINSI PAPUA SELATAN

BULAN AGUSTUS 2026

Disusun oleh:

dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT PROVINSI PAPUA SELATAN
MERAUKE, 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL KEGIATAN
dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.
ANGGOTA POKJA PAPUA SEHAT BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN
BULAN AGUSTUS 2026

INDIKATOR SASARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA SEHAT
Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, Jumlah Kabupaten/Kota yang Eliminasi Malaria

Laporan ini telah diperiksa, dievaluasi, dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan bulanan Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan.

Merauke, 2 September 2026
Penyusun,
Anggota Pokja Papua Sehat
BP3OKP Provinsi Papua Selatan

dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.

Mengetahui,
Kepala BP3OKP Papua Selatan

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA • DAERAH OTONOMI KHUSUS PAPUA
SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Bulanan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan Bulan Agustus Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Papua Sehat dalam melaksanakan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan.

Selama Bulan Agustus Tahun 2026, Pokja Papua Sehat telah melaksanakan delapan kegiatan strategis, meliputi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Selatan bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, menghadiri pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Papua Selatan, telaah dan desk pendampingan perbaikan hasil evaluasi Musrenbang Otsus Tahun 2026, forum pendampingan lanjutan penyelarasan usulan Musrenbang Otsus se-Tanah Papua, rapat koordinasi sinergi pengawasan Dana Otonomi Khusus bersama BPKP, pembahasan dan finalisasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sinergi pengendalian malaria, imunisasi, dan penurunan kematian ibu-bayi (dua tahap), serta audiensi bersama Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi mengenai kondisi pelayanan kesehatan di wilayah Bade, Kabupaten Mappi. Uraian lengkap seluruh kegiatan disajikan pada Bab II laporan ini.

Laporan ini diharapkan menjadi media dokumentasi, instrumen monitoring dan evaluasi, serta bahan masukan bagi Anggota BP3OKP, Pemerintah Pusat dan Daerah, DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan yang berpihak kepada Orang Asli Papua.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat selama Bulan Agustus Tahun 2026. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada periode berikutnya.

Merauke, 3 September 2026
Penyusun,
Anggota Pokja Papua Sehat
BP3OKP Provinsi Papua Selatan



dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
RINGKASAN EKSEKUTIF 6
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 Maksud dan Tujuan 8
1.1.1 Maksud 8
1.1.2 Tujuan 8
1.2 Ringkasan Kelembagaan 8
1.2.1 Landasan Hukum 8
1.2.2 Definisi 9
1.2.3 Struktur Kelembagaan 9
1.2.4 Tugas dan Fungsi 9
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan 10
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 10
1.2.7 Sarana dan Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 11
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN 12
2.1 Pelaksanaan Kegiatan 12
Kegiatan I. 12
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA SELATAN BERSAMA KOMISI II DPR RI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 12
Kegiatan II. 16
RAPAT PEMBAHASAN DAN PENAJAMAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) SINERGI PENGENDALIAN MALARIA, IMUNISASI, DAN PENURUNAN KEMATIAN IBU-BAYI 16
Kegiatan III. 19
MENGHADIRI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN 19
Kegiatan IV. 21
DESK PENDAMPINGAN PERBAIKAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN MUSRENBANG OTSUS TAHUN 2026 (USULAN TAHUN 2027) PROVINSI PAPUA SELATAN DAN KABUPATEN 21
Kegiatan V 26
FORUM PENDAMPINGAN LANJUTAN PENYELARASAN USULAN MUSRENBANG OTSUS SE-TANAH PAPUA 26
Kegiatan VI. 29
RAPAT KOORDINASI BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN DENGAN BPKP TENTANG SINERGI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS 29
Kegiatan VII. 32

RAPAT LANJUTAN (DARING) PEMBAHASAN DAN FINALISASI KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) SINERGI PENGENDALIAN MALARIA, IMUNISASI, DAN PENURUNAN KEMATIAN IBU-BAYI 32

Kegiatan VIII..... 35

AUDIENSI DAN KOORDINASI BERSAMA ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA SELATAN JALUR AFIRMASI MENGENAI KONDISI PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH BADE, KABUPATEN MAPPI, DAN PENGUATAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR 35

BAB III PENUTUP..... 41

3.1 Kesimpulan..... 41

3.2 Saran..... 41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada Bulan Agustus Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam memberikan pengkajian, pemantauan, evaluasi, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung percepatan pembangunan kesehatan melalui implementasi Otonomi Khusus Papua. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif bersama Komisi II DPR RI, DPR Provinsi Papua Selatan, kementerian/lembaga (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, KPK, BPKP, LKPP), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, TNI (Kodam XXIV/Mandala Trikora), Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, serta pemangku kepentingan lainnya.

Selama Bulan Agustus 2026, Pokja Papua Sehat melaksanakan delapan kegiatan utama, yaitu mengikuti evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Selatan pada usia tiga tahun bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada 11 Agustus 2026; rapat pembahasan dan penajaman Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengendalian malaria, imunisasi, dan penurunan kematian ibu-bayi secara luring di Kantor BKK Kelas II Merauke pada 12 Agustus 2026; menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 14 Agustus 2026; Desk Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 (usulan tahun 2027) untuk Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, serta Mappi pada 20 Agustus 2026 di Merauke, termasuk telaah form perbaikan usulan daerah dan bahan asistensi; forum pendampingan lanjutan penyelarasan usulan se-Tanah Papua pada 24 Agustus 2026; rapat koordinasi sinergi pengawasan Dana Otsus bersama BPKP pada 26 Agustus 2026; rapat lanjutan secara daring (Zoom) untuk pembahasan dan finalisasi Kesepakatan Bersama dan PKS pada 26 Agustus 2026; serta audiensi bersama Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi mengenai kondisi pelayanan kesehatan di wilayah Bade, Kabupaten Mappi pada 28 Agustus 2026.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan kemajuan nyata dalam pengawalan keselarasan usulan daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Rata-rata keselarasan usulan Musrenbang Otsus se-Tanah Papua baru mencapai 57,49%. Melalui desk pendampingan tanggal 20 dan 24 Agustus 2026, keselarasan usulan tahun 2027 meningkat: Provinsi Papua Selatan dari 170 menjadi 180 usulan selaras (dari total 380 usulan); Kabupaten Merauke dari 76 menjadi 78 usulan selaras (dari 109 usulan, tingkat keselarasan terbaik sekitar 70%); Kabupaten Boven Digoel dari 61 menjadi 69 usulan selaras (dari 110 usulan); Kabupaten Mappi dari 60 menjadi 64 dan selanjutnya 69 usulan selaras (dari 76 usulan); sedangkan Kabupaten Asmat masih pada 97 usulan selaras dari 147 usulan. Batas penyampaian perbaikan usulan disepakati tanggal 28 Agustus 2026 melalui pemutakhiran pada aplikasi SIPPP, untuk selanjutnya dibahas pada forum Rencana Anggaran Program (RAP) September-November 2026 sebelum penetapan APBD Desember 2026.

Sejumlah isu prioritas bidang kesehatan teridentifikasi, antara lain usulan strategis yang belum selaras atau salah penandaan (tagging), seperti Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat RSUD Merauke sebesar Rp3,42 miliar; tiga usulan besar Dinas Kesehatan dan RSUD Boven Digoel (Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp1,97 miliar, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Rp9,26 miliar, dan Operasional RSUD Rp4,66 miliar) yang substansinya selaras namun salah tagging; kebutuhan pelayanan rujukan berjenjang Kabupaten Mappi sebesar Rp7,1 miliar dengan biaya carter pesawat Rp50-60 juta sekali penerbangan; operasional 17 puskesmas Mappi yang melayani 162 kampung; iuran premi PBI bagi 1.500 jiwa Orang Asli Papua sebesar Rp756 juta; serta Operasional Pelayanan Puskesmas Kabupaten Asmat sebesar Rp67,77 miliar. Pada aspek tata kelola, rapat koordinasi bersama BPKP mengonfirmasi sejumlah persoalan, antara lain kewajiban pelaporan pemerintah daerah kepada BP3OKP yang belum

pernah dipenuhi tepat waktu, kendala kodifikasi anggaran di Kabupaten Boven Digoel, penyerapan Kabupaten Merauke sekitar 50%, serta perkiraan bahwa baru 30-44% dana yang tersalur di Kabupaten Asmat benar-benar sampai kepada masyarakat. Melalui forum evaluasi DOB bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, Pokja Papua Sehat juga menyuarakan dampak kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah terhadap belanja kesehatan, perlindungan kepesertaan PBI-JKN Orang Asli Papua dari penonaktifan, kebutuhan fasilitasi pembahasan regulasi BPJS Kesehatan bagi rumah sakit tipe D, kekurangan tenaga kesehatan, serta percepatan pembangunan rumah sakit rujukan provinsi. Audiensi bersama Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi pada 28 Agustus 2026 menambah temuan lapangan dari wilayah Bade, Kabupaten Mappi, yang menjadi sentra pelayanan lima distrik: rumah sakit setempat sekitar dua tahun tidak memiliki ambulans sehingga pasien, termasuk ibu bersalin, diangkut dengan mobil pikap dan ojek berbayar; tenaga kesehatan honorer belum dibayar; ketersediaan obat dan kuota rujukan terbatas; serta data kependudukan dan kepesertaan JKN pekerja perusahaan belum tertib.

Pada aspek kerja sama lintas sektor, Pokja Papua Sehat mengawal penajaman Kesepakatan Bersama tiga pihak antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kodam XXIV/Mandala Trikora, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tentang sinergi penguatan pengendalian malaria, peningkatan cakupan imunisasi, serta percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, dengan sasaran eliminasi malaria Kabupaten Merauke tahun 2028 menuju eliminasi nasional 2030. Pembahasan dilaksanakan dua tahap: secara luring di Kantor BKK Kelas II Merauke pada 12 Agustus 2026 dan rapat lanjutan secara daring melalui Zoom pada 26 Agustus 2026. BP3OKP ditempatkan pada peran koordinatif sesuai fungsi SHEK dalam Perjanjian Kerja Sama, dan memberikan masukan substantif berupa pemutakhiran dasar hukum (Perpres Nomor 102 Tahun 2025, RIPPP, RAPPP, dan PP Nomor 106 Tahun 2021).

Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, Pokja Papua Sehat memberikan rekomendasi strategis yang menitikberatkan pada percepatan perbaikan dan penyelarasan usulan kesehatan daerah dengan RAPPP 2025-2029, termasuk perbaikan tagging sumber dana; kelengkapan target keluaran yang terukur (volume, satuan, lokasi, pagu, dan penerima manfaat by name by address) dengan prioritas Orang Asli Papua; percepatan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan PKS pengendalian malaria-imunisasi-KIA beserta pelaksanaan Rencana Aksi 100 Hari; perlindungan kepesertaan PBI-JKN Orang Asli Papua serta percepatan pembangunan rumah sakit rujukan provinsi dan pemenuhan tenaga kesehatan daerah 3T; penguatan pengawasan Dana Otsus bidang kesehatan bersama BPKP dan KPK; pemenuhan ambulans yang sesuai kondisi geografis bagi wilayah Bade dan Kabupaten Boven Digoel, pembayaran honor tenaga kesehatan, serta tindak lanjut usulan dokter spesialis bagi wilayah Bade, termasuk penjajakan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); serta penguatan fungsi SHEK melalui pemutakhiran data pada SIPPP dan pergeseran metode kerja Pokja menuju kerja berbasis data dan analisis akar masalah hingga determinan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Bulan Agustus 2026 menegaskan bahwa percepatan pembangunan kesehatan Orang Asli Papua memerlukan perencanaan yang selaras dengan RIPPP dan RAPPP, tata kelola dan pengawasan Dana Otsus yang akuntabel dan tepat sasaran, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP3OKP, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Laporan Bulanan Pokja Papua Sehat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Papua Sehat dalam melaksanakan fungsi SHEK terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan.

Laporan ini juga menjadi media dokumentasi pelaksanaan kegiatan, bahan monitoring dan evaluasi, serta sarana penyampaian rekomendasi strategis kepada Anggota BP3OKP dan para pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.

1.1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan bulanan Pokja Papua Sehat adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat selama Bulan Agustus Tahun 2026.
2. Mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan.
3. Mengidentifikasi isu strategis, tantangan, dan peluang pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Anggota BP3OKP, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta pembangunan kesehatan yang berpihak kepada Orang Asli Papua.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan Hukum

Pelaksanaan tugas Pokja Papua Sehat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025.
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

1.2.2 Definisi

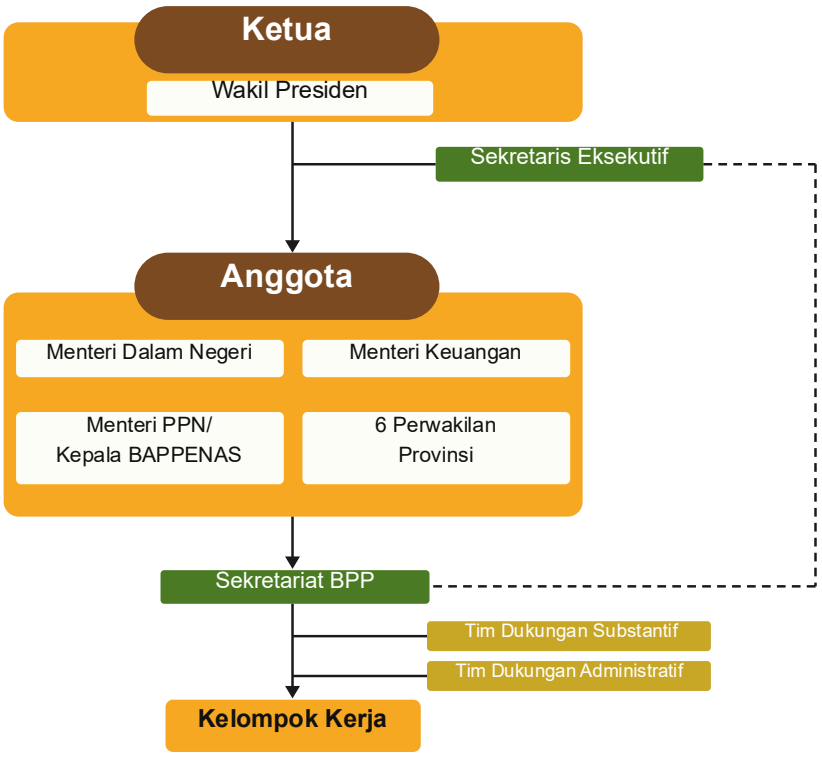
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kelompok Kerja (Pokja) Papua Sehat merupakan unit kerja pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan yang menjalankan fungsi SHEK pada bidang kesehatan guna mendukung percepatan pembangunan kesehatan bagi Orang Asli Papua.

1.2.3 Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) beserta kedudukan Kelompok Kerja Papua Sehat pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan digambarkan sebagaimana bagan organisasi Badan Pengarah Papua.



1.2.4 Tugas dan Fungsi

Pokja Papua Sehat merupakan bagian dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang mendukung pelaksanaan tugas BP3OKP melalui fungsi SHEK terhadap kebijakan

dan program pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk:

1. Mendukung sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Melakukan harmonisasi program pembangunan kesehatan dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMD;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan dana otonomi khusus bidang kesehatan;
4. Menyusun rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan bagi anggota BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan kesehatan.

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Selama Bulan Agustus Tahun 2026, Pokja Papua Sehat melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan, meliputi:

1. Partisipasi dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan pada usia tiga tahun serta penyampaian isu strategis pembiayaan dan pelayanan kesehatan;
2. Pendampingan perbaikan dan penyelarasan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Otsus Tahun 2026 (usulan tahun 2027) dengan RAPPP 2025-2029 pada tingkat provinsi dan kabupaten;
3. Penguatan tata kelola dan pengawasan Dana Otonomi Khusus bidang kesehatan bersama BPKP;
4. Fasilitasi kerja sama lintas sektor pengendalian malaria, peningkatan cakupan imunisasi, serta penurunan kematian ibu dan bayi;
5. Penguatan koordinasi kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan serta penyerapan aspirasi Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi mengenai pelayanan kesehatan di wilayah terpencil;
6. Penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pelaksanaan fungsi SHEK.

Ruang lingkup tersebut diwujudkan melalui delapan kegiatan utama yang dilaksanakan selama Bulan Agustus 2026.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar SDM sesuai struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

NO.	UNIT KERJA & JABATAN	URAIAN	JLH ORG
1.	Pimpinan	Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA)	1. POKJA Papua Sehat; 2. POKJA Papua Cerdas; 3. POKJA Papua Produktif; 4. POKJA Papua Polhukam (belum terisi)	2 org; 2 org; 2 org; - org

NO.	UNIT KERJA & JABATAN	URAIAN	JLH ORG
3.	Pendukung Administratif dan Substantif	Tim Kerja dari KPPN/DJPb Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan	5 org
4.	Staf/Karyawan	Staf/karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP yaitu karyawan PPNPN	3 org

1.2.7 Sarana dan Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP, tersedia sarana dan prasarana utama pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Daftar sarana dan prasarana pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

NO.	URAIAN	SAT	VOL
1.	Bangunan Kantor	gdg	1
2.	Ruangan: Front Office; Ruang Rapat; Ruang Tamu; Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP PPS; Ruang Kerja Anggota POKJA dan Staf; Ruang Dapur; Kamar Mandi & Toilet	ruang	masing-masing 1
3.	Meja dan kursi kerja Pimpinan (3 kursi + 1 meja); meja dan kursi sofa ruang pimpinan; meja dan kursi sofa ruang tamu; meja dan kursi Front Office; kitchen set	set	masing-masing 1
4.	Meja Anggota POKJA dan Staf	unit	1
5.	Kursi POKJA dan Staf	unit	6
6.	Smart TV	unit	2
7.	TIK Starlink (digunakan bersama)	unit	1
8.	Laptop	unit	4
9.	Printer; Hardisk Eksternal 1 TB; Kulkas; Dispenser; Kompor Listrik	unit	masing-masing 1
10.	ATK dan Peralatan Makan	-	tersedia

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat pada laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama Bulan Agustus Tahun 2026. Selama periode tersebut, Pokja Papua Sehat mengikuti dan melaksanakan delapan kegiatan utama sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi SHEK. Rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Kegiatan I.
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA SELATAN BERSAMA KOMISI II DPR RI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tabel 2.1 Rincian Kegiatan I Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN I		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Selasa, 11 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 10.00 WIT - selesai (sesi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah pada pagi hingga siang hari, dilanjutkan sesi dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat pada sore hari)
Lokasi Kegiatan	:	Merauke, Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA SELATAN PADA USIA TIGA TAHUN BERSAMA KOMISI II DPR RI DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Misi / Keterangan	:	**Papua Sehat:** Penyampaian isu strategis pembiayaan dan pelayanan kesehatan daerah otonom baru (dampak kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah terhadap belanja kesehatan, kepesertaan PBI-JKN Orang Asli Papua, regulasi BPJS Kesehatan bagi rumah sakit tipe D, kebutuhan rumah sakit rujukan provinsi, serta pemenuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil) dan penyerapan aspirasi kesehatan masyarakat. **Papua Cerdas:** Isu pendidikan yang mengemuka dalam forum (angka putus sekolah, kekurangan guru di pedalaman, pembiayaan pegawai PPPK). **Papua Produktif:** Isu ekonomi masyarakat (kenaikan harga kebutuhan pokok, kegagalan panen petani, infrastruktur jalan distrik dan kampung).
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Sinkronisasi:** Menyelaraskan capaian pembangunan kesehatan daerah otonom baru dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 2 Tahun 2021, serta RIPPP dan RAPPP.

KEGIATAN I		
		Harmonisasi: Memadukan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah dengan kebijakan kementerian/lembaga di tingkat pusat. **Evaluasi:** Mengikuti penilaian penyelenggaraan pemerintahan DOB pada usia tiga tahun, khususnya aspek pelayanan dasar bidang kesehatan. **Koordinasi:** Menyampaikan masukan langsung kepada Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri serta menampung aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Pelaksana Kegiatan	:	Komisi II DPR RI (Bapak Indra Jaya, S.T., Anggota Komisi II DPR RI daerah pemilihan Papua Selatan) bersama Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan serta Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah), difasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	:	Unsur Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Sekretariat Daerah dan OPD); pimpinan DPR Papua Selatan; Majelis Rakyat Papua (MRP); Bupati Merauke, Bupati Asmat, Bupati Mappi, dan Bupati Boven Digoel; BP3OKP Provinsi Papua Selatan (dr. Ira Nova - Pokja Papua Sehat. Fredy Sumbung – Pokja Papua Cerdas); tokoh perempuan, tokoh agama dan adat, yayasan/lembaga swadaya masyarakat, tenaga pendamping desa, serta masyarakat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mengikuti evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan pada usia tiga tahun sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2022. 2. Menyampaikan isu strategis pembiayaan dan pelayanan kesehatan Provinsi Papua Selatan kepada Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. 3. Menyerap aspirasi masyarakat, khususnya bidang kesehatan, sebagai bahan pelaksanaan fungsi SHEK.
Hasil / Output Kegiatan	:	Kegiatan menghasilkan poin-poin utama sebagai berikut: 1. Evaluasi tiga tahun DOB dilaksanakan terhadap aspek-aspek: penegasan batas daerah (termasuk segmen batas antarkabupaten yang belum tuntas), penyusunan rencana tata ruang wilayah, penyusunan APBD dan laporan keuangan, pembentukan perangkat daerah dan pengisian jabatan ASN (sejumlah jabatan pimpinan tinggi dan pelaksana masih lowong, sebagian ASN masih tercatat pada provinsi induk), pembentukan MRP, pemberian hibah dari daerah induk dan kabupaten cakupan, penyerahan aset dan P3D, pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan (kantor gubernur, rumah susun, jalan sekitar 125

KEGIATAN I		
		km di Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat), serta pelayanan publik; hasil evaluasi akan dilaporkan kepada DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Presiden. 2. Teridentifikasi hibah dukungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dari kabupaten cakupan yang belum sepenuhnya terealisasi (antara lain Kabupaten Merauke: komitmen sekitar Rp20 miliar, baru ditransfer Rp2 miliar pada 2023, dan dianggarkan Rp5 miliar pada APBD 2026) serta permasalahan penyerahan aset antar daerah (termasuk aset provinsi induk di wilayah Papua Selatan seperti Hotel Asmat di Merauke dan pencatatan aset ganda) yang memerlukan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri. 3. Pokja Papua Sehat menyampaikan masukan bidang kesehatan: (a) kebijakan efisiensi/pengurangan Transfer ke Daerah berdampak besar pada belanja kesehatan daerah, termasuk risiko tidak terbayarnya obat, bahan medis habis pakai, dan klaim pelayanan, sehingga pemerintah pusat diminta menyiapkan strategi mitigasi; (b) penonaktifan peserta PBI-JKN oleh pusat membebani PBI daerah, sehingga jaminan kesehatan bagi Orang Asli Papua diminta tidak dinonaktifkan, termasuk mengakomodasi kelahiran baru; (c) perlunya fasilitasi Kementerian Dalam Negeri untuk duduk bersama BPJS Kesehatan membahas regulasi yang memberatkan rumah sakit tipe D (RSUD Boven Digoel, Mappi, dan Asmat), mengingat klaim BPJS merupakan sumber utama pendapatan operasional rumah sakit; serta (d) usulan penguatan pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis Papua Selatan. 4. Aspirasi masyarakat bidang kesehatan pada sesi dialog antara lain: waktu tunggu pelayanan rumah sakit yang lama; kekurangan dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan dokter gigi; kebutuhan rumah sakit rujukan provinsi agar masyarakat tidak berobat ke luar provinsi; bangunan puskesmas prototipe bantuan Kementerian Kesehatan di Tanah Merah (Boven Digoel) yang tidak berfungsi karena persoalan lahan/tanah adat; minimnya peminat program penempatan tenaga kesehatan karena faktor keamanan; kasus ibu bersalin yang meninggal dalam perjalanan rujukan; serta mahalnya biaya transportasi rujukan dari kampung. 5. Tanggapan forum menegaskan kembali kerangka kebijakan: alokasi Dana Otsus sebesar 2,25% dari plafon DAU nasional (1% bersifat block grant dan 1,25% bersifat spesifik dengan ketentuan paling sedikit 30% untuk pendidikan dan paling sedikit 20% untuk kesehatan); kebijakan pemerintah pusat agar setiap kecamatan/distrik memiliki puskesmas; dorongan penyusunan standar penghasilan dan jaminan keamanan bagi guru dan tenaga

KEGIATAN I		
		kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); serta peningkatan tipe rumah sakit provinsi. 6. Terkonfirmasi tindak lanjut usulan pembangunan rumah sakit provinsi: Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah beraudiensi dengan Menteri Kesehatan (Februari 2026) dan menyiapkan lahan, dengan usulan pembangunan didanai APBN/Kementerian Kesehatan; surat telaahan telah disampaikan dan memerlukan tindak lanjut. 7. Seluruh masukan dan aspirasi dicatat Komisi II DPR RI untuk dilaporkan dalam rapat di DPR RI dan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2022.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. Pemerintah pusat menyiapkan strategi mitigasi dampak kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah terhadap belanja kesehatan daerah otonom baru. 2. Kepesertaan jaminan kesehatan (PBI-JKN) Orang Asli Papua dilindungi dari penonaktifan dan mengakomodasi bayi baru lahir. 3. Kementerian Dalam Negeri dan Anggoat DPR RI memfasilitasi pembahasan bersama BPJS Kesehatan atas regulasi yang memberatkan rumah sakit tipe D di Papua Selatan. 4. Percepatan pembangunan rumah sakit rujukan provinsi melalui dukungan Kementerian Kesehatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan daerah 3T dengan standar penghasilan dan jaminan keamanan. 5. Penyelesaian serah terima aset antar daerah dan realisasi hibah pendanaan dari kabupaten cakupan sesuai komitmen. **Rencana Tindak Lanjut** 1. Mengawal tindak lanjut surat telaahan usulan pembangunan rumah sakit provinsi kepada Kementerian Kesehatan. 2. Menghimpun data dan aspirasi kesehatan hasil forum sebagai bahan analisis dan rekomendasi Pokja Papua Sehat dalam fungsi SHEK. 3. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan menindaklanjuti isu kepesertaan PBI dan pembiayaan rumah sakit tipe D.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** 1. Evaluasi tiga tahun DOB menegaskan kemajuan kelembagaan Provinsi Papua Selatan sekaligus pekerjaan rumah besar pada pembiayaan kesehatan, ketersediaan SDM kesehatan, dan rumah sakit rujukan provinsi.

KEGIATAN I		
		2. Forum evaluasi menjadi saluran resmi penyampaian isu kesehatan Pokja Papua Sehat dan aspirasi masyarakat kepada DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. **Saran** 1. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat menindaklanjuti aspirasi hasil evaluasi secara terukur dan berbasis data. 2. BP3OKP mengawal tindak lanjut lintas kementerian/lembaga atas isu pembiayaan kesehatan, kepesertaan JKN Orang Asli Papua, dan pembangunan rumah sakit rujukan provinsi.
Dokumentasi	:	 
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

Kegiatan II.
RAPAT PEMBAHASAN DAN PENAJAMAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) SINERGI PENGENDALIAN MALARIA, IMUNISASI, DAN PENURUNAN KEMATIAN IBU-BAYI

Tabel 2.2 Rincian Kegiatan II Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN II		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Rabu, 12 Agustus 2026 **Pelaksanaan:** secara luring (tatap muka)
Lokasi Kegiatan	:	Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Merauke, Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	RAPAT PEMBAHASAN KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) "SINERGI DALAM PENGUATAN PENGENDALIAN MALARIA, PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI, SERTA PERCEPATAN PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI DI PROVINSI PAPUA SELATAN"

KEGIATAN II		
Misi / Keterangan	:	**Papua Sehat:** Fasilitasi kerja sama tiga pihak (Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kodam XXIV/Mandala Trikora, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke) menuju eliminasi malaria Kabupaten Merauke tahun 2028 sebagai bagian eliminasi nasional 2030, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, dan penurunan AKI-AKB, dengan tagline "Untuk Setiap Anak Anim Ha Sehat".
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Sinkronisasi:** Menyelaraskan draf Kesepakatan Bersama dan PKS dengan regulasi Otonomi Khusus (RIPPP, RAPPP, PP 106/2021) serta hasil Komitmen Bersama Merauke 24 Juni 2026 dan Rakor Survei Migrasi Malaria 24 Juli 2026. **Harmonisasi:** Memadukan peran Pemerintah Provinsi, TNI (Kesdam), BKK, dan mitra pembangunan dalam satu kerangka kerja sama strategis dan teknis-operasional. **Evaluasi:** Menelaah rumusan maksud-tujuan, ruang lingkup, indikator kinerja utama, jangka waktu, dan mekanisme koordinasi pada draf dokumen. **Koordinasi:** Memberikan masukan substantif BP3OKP dan menyepakati proses penyempurnaan draf menuju penandatanganan.
Pelaksana Kegiatan	:	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke (tuan rumah) bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Selatan, Kesdam XXIV/Mandala Trikora, dan BP3OKP Provinsi Papua Selatan melalui Pokja Papua Sehat
Peserta Kegiatan	:	Perwakilan tiga pihak calon penandatangan (Dinkes-PPKB Provinsi Papua Selatan; Kesdam XXIV/Mandala Trikora; BKK Kelas II Merauke) dan anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP; draf Kesepakatan Bersama (MoU) dan draf PKS beserta lampiran indikator kinerja utama, matriks peran (RACI), dan peta wilayah prioritas
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membahas dan menajamkan draf Kesepakatan Bersama serta PKS sebagai tindak lanjut Komitmen Bersama Merauke 24 Juni 2026 dan Rakor Survei Migrasi Malaria 24 Juli 2026. 2. Merumuskan peran BP3OKP dalam kerja sama sesuai fungsi SHEK. 3. Menyampaikan masukan substantif BP3OKP atas dasar hukum dan keselarasan dokumen dengan RIPPP/RAPPP.
Hasil / Output Kegiatan	:	Pembahasan menghasilkan penajaman kerangka kerja sama sebagai berikut: 1. Kerangka Kesepakatan Bersama disepakati memuat sasaran eliminasi malaria Kabupaten Merauke tahun 2028 (API < 1 per 1.000 penduduk) menuju eliminasi nasional 2030, penurunan

KEGIATAN II		
		API terukur di distrik prioritas (Ulilin, Ilwayab, Merauke), peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan desa UCI, serta percepatan penurunan kematian ibu dan bayi. 2. Ruang lingkup kerja sama mencakup delapan bidang: pengendalian malaria dan percepatan eliminasi; penguatan imunisasi; percepatan penurunan kematian ibu-bayi; dukungan strategis TNI (jaringan Kesdam hingga Babinsa dan pos perbatasan); dukungan kekarantinaan kesehatan (surveilans pintu masuk negara pada enam wilayah kerja BKK di empat kabupaten dan reaktivasi surveilans migrasi malaria); data dan kesehatan digital; pengembangan kapasitas; serta pendekatan One Health. 3. PKS dirancang sebagai turunan teknis-operasional dengan sasaran terukur, antara lain sinkronisasi logistik-pelaporan minimal 95% (2027), imunisasi dasar lengkap dan desa UCI minimal 90% (2030), penurunan AKI 40% dan AKB 30% (2030), persalinan di fasilitas kesehatan minimal 95%, serta alokasi belanja kesehatan APBD minimal 10%; jangka waktu kerja sama dirancang 5 tahun. 4. Disepakati penyusunan Rencana Aksi 100 Hari sebagai turunan pertama, dengan prioritas reaktivasi surveilans migrasi malaria, pengawasan minum obat Primaquine 14 hari bagi personel Satgas TNI, rekonsiliasi logistik-kasus, serta penegakan sistem satu pintu distribusi logistik malaria. 5. Peran BP3OKP dirumuskan sebagai fasilitator koordinasi, sinergi, dan pengawasan implementasi sesuai fungsi SHEK (bukan pelaksana teknis), dengan hak memperoleh data, laporan pelaksanaan, dan capaian indikator, serta menyampaikan rekomendasi kepada para pihak. 6. BP3OKP menyampaikan masukan substantif penyempurnaan dasar hukum: penambahan RIPPP (Perpres Nomor 24 Tahun 2023), RAPPP (Perpres Nomor 107 Tahun 2025), dan PP Nomor 106 Tahun 2021, serta pemutakhiran Perpres Nomor 121 Tahun 2022 jo. Perpres Nomor 102 Tahun 2025; pemanfaatan Dana Otsus dalam pembiayaan kerja sama harus selaras RIPPP/RAPPP. 7. Teridentifikasi bagian draf yang masih perlu dirapikan (penomoran pasal, konsistensi label para pihak, pasal objek kerja sama, dan finalisasi angka sasaran) untuk disempurnakan pada pembahasan lanjutan.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. Draf disirkulasikan kepada seluruh pihak untuk masukan tertulis, dengan pelibatan Biro Hukum Setda dan Bagian Hukum Kodam dalam penyempurnaan dasar hukum.

KEGIATAN II		
		2. Penandatanganan diupayakan segera agar Rencana Aksi 100 Hari dapat berjalan pada tahun 2026. **Rencana Tindak Lanjut** 1. Melaksanakan rapat lanjutan pembahasan dan finalisasi draf bersama seluruh pihak. 2. Pokja Papua Sehat mengawal pengintegrasian isu kesehatan lintas batas dan surveilans pintu masuk negara dalam ruang lingkup PKS.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** Rapat di Kantor BKK Kelas II Merauke menyepakati kerangka substansi Kesepakatan Bersama dan PKS tiga pihak beserta peran koordinatif BP3OKP, dan menghasilkan daftar penyempurnaan draf untuk pembahasan lanjutan. **Saran** Para pihak menyiapkan masukan tertulis secara cermat agar pembahasan lanjutan dapat langsung mengarah pada finalisasi dan penandatanganan.
Dokumentasi	:	 
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

Kegiatan III.
MENGHADIRI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

Tabel 2.3 Rincian Kegiatan III Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN III		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Jumat, 14 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 13.00 WIT - selesai
Lokasi Kegiatan	:	Aula Utama Lantai 1, Kantor Gubernur Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN

KEGIATAN III		
Misi / Keterangan	:	Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif: Penguatan jejaring koordinasi kelembagaan antara BP3OKP dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik pada perangkat daerah Provinsi Papua Selatan, termasuk perangkat daerah pengampu urusan kesehatan, sebagai mitra pelaksanaan fungsi SHEK.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Koordinasi:** Menghadiri undangan resmi Gubernur Papua Selatan dan membangun komunikasi kelembagaan dengan pejabat perangkat daerah yang baru dilantik. **Harmonisasi:** Memastikan kesinambungan koordinasi program percepatan pembangunan kesehatan dengan kepemimpinan baru perangkat daerah.
Pelaksana Kegiatan	:	Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Gubernur Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T.); dihadiri unsur BP3OKP Provinsi Papua Selatan termasuk Pokja Papua Sehat dan Papua Cerdas
Peserta Kegiatan	:	Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, unsur forkopimda, undangan kelembagaan termasuk BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Memenuhi undangan resmi Gubernur Papua Selatan. 2. Membangun jejaring koordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik, khususnya perangkat daerah mitra kerja Pokja Papua Sehat.
Hasil / Output Kegiatan	:	1. Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sesuai susunan acara resmi. 2. Terbangunnya komunikasi awal BP3OKP dengan pejabat perangkat daerah yang baru dilantik sebagai mitra koordinasi program Papua Sehat, khususnya menjelang masa perbaikan usulan Musrenbang Otsus dan pembahasan RAP 2027.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	1. Menindaklanjuti perkenalan kelembagaan dengan koordinasi teknis kepada perangkat daerah pengampu urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Memastikan kesinambungan data dan program pada masa transisi pejabat agar tidak menghambat perbaikan usulan Musrenbang Otsus dan pelaksanaan Dana Otsus bidang kesehatan.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** Kehadiran BP3OKP pada pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama memperkuat hubungan kelembagaan dengan Pemerintah

KEGIATAN III		
		Provinsi Papua Selatan pada momentum pergantian kepemimpinan perangkat daerah. **Saran** Rotasi dan pergantian pejabat perlu disertai serah terima data program dan Dana Otsus yang tertib agar kesinambungan perencanaan dan pelaporan tetap terjaga.
Dokumentasi	:	 
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

Kegiatan IV.
DESK PENDAMPINGAN PERBAIKAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN MUSRENBANG OTSUS TAHUN 2026 (USULAN TAHUN 2027) PROVINSI PAPUA SELATAN DAN KABUPATEN

Tabel 2.4 Rincian Kegiatan IV Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN IV		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Kamis, 20 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 08.00 WIT - 22.00 WIT (lima sesi berurutan: Provinsi Papua Selatan pada pagi hari; Kabupaten Merauke pada siang hari; Kabupaten Boven Digoel pada sore hari; Kabupaten Asmat; dan Kabupaten Mappi pada malam hari secara daring)
Lokasi Kegiatan	:	Merauke, Provinsi Papua Selatan (luring dan daring)
Judul Kegiatan	:	DESK PENDAMPINGAN PERBAIKAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN MUSRENBANG OTONOMI KHUSUS TAHUN 2026 UNTUK USULAN TAHUN 2027, PROVINSI PAPUA SELATAN DAN KABUPATEN MERAUKE, BOVEN DIGOEL, ASMAT, SERTA MAPPI
Misi / Keterangan	:	**Papua Sehat:** Pengawalan keselarasan usulan bidang kesehatan (JKN/PBI, operasional puskesmas dan rumah sakit, pelayanan rujukan, KB dan ketahanan keluarga, penurunan stunting, bantuan sosial kelompok rentan) dengan RAPPP 2025-2029.

KEGIATAN IV		
		Papua Cerdas: Pengawalan usulan pendidikan (biaya personil peserta didik, beasiswa, sarana pendidikan) pada desk Papua Cerdas. **Papua Produktif:** Pengawalan usulan ekonomi produktif (perikanan, pertanian, pemberdayaan ekonomi OAP) pada desk Papua Produktif.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Sinkronisasi:** Menyelaraskan usulan program/kegiatan/sub kegiatan daerah tahun 2027 dengan RAPPP 2025-2029 dan referensi sub kegiatan Bappenas melalui aplikasi SIPPP. **Harmonisasi:** Memadukan hasil Musrenbang Otsus dengan alur perencanaan daerah (RKPD, KUA-PPAS, APBD) dan interoperabilitas sistem SIPD-SIPPP-SIKD. **Evaluasi:** Menilai keselarasan, kualitas, kelengkapan target keluaran, kewajaran anggaran, dan ketepatan sasaran Orang Asli Papua atas usulan tiap daerah. **Koordinasi:** Berkoordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KPK, LKPP, dan pemerintah daerah untuk menyepakati berita acara dan batas waktu perbaikan.
Pelaksana Kegiatan	:	Kementerian PPN/Bappenas (Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Anang Budi Gunawan, beserta tim teknis) selaku pemimpin desk; didampingi BP3OKP Provinsi Papua Selatan (Anggota BPP Yoseph Yanawo Yolmen bersama Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif)
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	Bappenas; KPK; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; LKPP; Perencana Ahli Utama Bappenas; BP3OKP Provinsi Papua Selatan (dr. Ira Nova - Pokja Papua Sehat); Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Kepala Bappeda dan OPD); Bupati Mappi; Bupati Boven Digoel; Sekretaris Daerah Merauke; Bappeda dan OPD empat kabupaten (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, DPPKB/DP3A, Inspektorat, dan lainnya). Sumber dokumen: Form Perbaikan Usulan Daerah (Kementerian PPN/Bappenas) untuk Provinsi Papua Selatan serta Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi; Bahan Pegangan Tim Asistensi (Bahan Lengkap RIPPP, RAPPP, SIPPP, dan Musrenbang Otsus; Buku RAPPP 2025-2029; Buku RIPPP 2022-2041)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mendampingi pemerintah daerah memperbaiki usulan hasil Musrenbang Otsus Tahun 2026 yang belum selaras RAPPP 2025-2029. 2. Mengawal usulan bidang kesehatan strategis agar tidak kehilangan pendanaan Otsus akibat kesalahan tagging atau nomenklatur. 3. Menyepakati berita acara, mekanisme perbaikan melalui SIPPP, dan batas waktu penyampaian perbaikan.

KEGIATAN IV		
		4. Meminta materi hasil Musrenbang provinsi dan kabupaten/kota diberikan kepada BP3OKP agar Pokja dapat mendampingi perbaikan per tema. 5. Menelaah form perbaikan usulan daerah dan bahan pegangan tim asistensi Bappenas (RIPPP 2022-2041, RAPPP 2025-2029, dan mekanisme SIPPP) sebagai dasar pendampingan per desk.
Hasil / Output Kegiatan	:	Desk pendampingan menghasilkan kesepakatan dan capaian keselarasan sebagai berikut: 1. Rata-rata keselarasan usulan Musrenbang Otsus se-Tanah Papua terhadap RAPPP 2025-2029 baru mencapai 57,49%, sehingga seluruh direktur Bappenas bersama KPK, Kemenkeu, dan Kemendagri disebar ke enam provinsi se-Tanah Papua untuk pendampingan; sesi Papua Selatan dilaksanakan di Merauke. 2. Provinsi Papua Selatan: dari 380 usulan tahun 2027 (naik dari 153 pada 2026), 170 selaras dan 210 belum selaras; melalui desk, 10 usulan didorong selaras sehingga menjadi 180 selaras; sekitar 110-112 berkas perbaikan tambahan masih direview Bappenas. 3. Kabupaten Merauke: dari 109 usulan, 76 selaras dan 33 belum; 2 usulan didorong selaras menjadi 78 (tingkat keselarasan terbaik, sekitar 70%); teridentifikasi 16-18 sub kegiatan salah tagging sumber dana (ter-tagging DAU padahal seharusnya Otsus) yang diproses melalui berita acara. 4. Kabupaten Boven Digoel: dari 110 usulan, 61 selaras dan 49 belum; 8 dari 9 usulan perbaikan disepakati selaras sehingga menjadi 69; tiga usulan besar Dinas Kesehatan/RSUD (Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp1,97 miliar, Pengelolaan Jaminan Kesehatan Rp9,26 miliar, Operasional RSUD Rp4,66 miliar) dinyatakan selaras secara substansi dan hanya memerlukan perbaikan tagging. 5. Kabupaten Mappi (sesi malam, dipimpin langsung Bupati): dari 76 usulan, 60 selaras dan 16 belum; 4 usulan ditelaah selaras menjadi 64. Dibahas usulan pelayanan rujukan pasien OAP Rp7,1 miliar (rujukan berjenjang kampung-distrik-RS Kepi-RS Merauke/Jayapura/Makassar/Solo, termasuk carter pesawat Rp50-60 juta sekali penerbangan), operasional 17 puskesmas yang melayani 162 kampung (BBM transportasi sungai sekitar Rp2,3 miliar; pembangunan 1 unit gedung puskesmas sekitar Rp14 miliar), iuran premi PBI bagi sekitar 1.500 jiwa OAP (Rp756 juta), serta bantuan sosial pemulangan jenazah Rp8 miliar untuk sekitar 1.200 orang, alat bantu disabilitas Rp404 juta, dan permakanan lansia Rp644 juta yang diminta KPK dilengkapi data penerima manfaat. 6. Kabupaten Asmat: 147 usulan dengan 97 selaras dan 50 belum selaras; mayoritas usulan Papua Sehat berada pada Dinas Sosial (total sekitar Rp5,4 miliar) dan DP3A-KB; Operasional Pelayanan

KEGIATAN IV		
		Puskesmas Rp67,77 miliar menjadi fokus perbaikan tagging agar tertarik ke SIPPP. 7. KPK menekankan lima uji kualitas program (urgensi, prioritas, dampak, sasaran OAP, kewajaran anggaran), kewajiban data penerima manfaat by name by address, larangan duplikasi anggaran (Otsus vs DAK/DAU/APBD), target keluaran tidak boleh sekadar berupa "dokumen", serta kewajiban labeling/tagging Otsus sesuai 18 poin kesepakatan rakor Jayapura 16 Juli 2026. 8. Berita acara tiap sesi menyepakati: batas penyampaian perbaikan 21-28 Agustus 2026; pemutakhiran hasil perbaikan pada aplikasi SIPPP; usulan di luar RAPPP namun masih dalam koridor PP 107/2021 dan PMK 33/2024 ditampung untuk diputuskan pemerintah pusat pada forum evaluasi RAP (September-November 2026) sebelum penetapan APBD Desember 2026. 9. Pokja Papua Sehat menyampaikan permintaan agar materi hasil Musrenbang provinsi dan kabupaten diberikan kepada BP3OKP untuk pendampingan per tema, serta menitipkan agar usulan bertema kesehatan yang belum selaras diprioritaskan untuk ditelaah dan didorong keselarasannya. 10. Telaah form perbaikan usulan daerah menunjukkan kondisi awal usulan yang direkomendasikan namun tidak selaras RAPPP: Provinsi Papua Selatan 210 usulan, Kabupaten Asmat 50, Boven Digoel 49, Merauke 33, dan Mappi 16 usulan. Pada versi revisi hasil asistensi Tim Bappenas: form Boven Digoel terisi 9 usulan perbaikan dengan 8 disetujui (termasuk 4 usulan bidang Papua Sehat senilai total Rp16,49 miliar); form provinsi terisi 10 usulan dan seluruhnya disetujui (termasuk Pengembangan Rumah Sakit Rp2 miliar); form Asmat terisi 48 baris namun baru 3 disetujui (termasuk Operasional Pelayanan Puskesmas Rp67,77 miliar); serta form Mappi terisi penuh 16 usulan yang didominasi bidang kesehatan (12 dari 16 usulan, termasuk paket usulan Dinas Kesehatan senilai Rp24,77 miliar). 11. Bahan pegangan tim asistensi menegaskan kerangka kerja pendampingan: RAPPP 2025-2029 (Perpres 107/2025) memuat 19 program percepatan, dua di antaranya misi Papua Sehat (Pelayanan Kesehatan Bergerak serta Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan); setiap usulan wajib dilengkapi 14 atribut pada SIPPP (misi, program/sub program percepatan, kode sub kegiatan, sumber dana, target volume-satuan, indikasi pagu, lokasi, dan lainnya); serta SIPPP interoperabel dengan SIPD (Kemendagri) dan SIKD-Otsus (Kemenkeu).

KEGIATAN IV		
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. Memperbaiki tagging program/sub program/sub kegiatan dan sumber dana (menghindari tagging DAU untuk kegiatan yang didanai Otsus). 2. Melengkapi target keluaran (volume dan satuan), lokasi, pagu, serta penjelasan manfaat bagi Orang Asli Papua pada setiap usulan. 3. Memastikan data penerima manfaat tersedia (JKN/PBI, bantuan pemulangan jenazah, disabilitas, lansia) sebagai dasar penajaman usulan, verifikasi manfaat OAP, dan bahan pengawasan KPK/BP3OKP. 4. Mengoordinasikan usulan Papua Sehat lintas OPD (Dinkes, RSUD, Dinsos, DP3A-KB, Dukcapil, PUPR) agar terintegrasi dan berbagi peran, karena Papua Sehat bukan hanya urusan Dinas Kesehatan. 5. Menggunakan kondisi geografis Papua Selatan (kampung terpencil, sungai, pesisir, perbatasan, keterbatasan transportasi) sebagai dasar penilaian urgensi dan kewajaran biaya pelayanan kesehatan. **Rencana Tindak Lanjut** 1. Mendampingi OPD provinsi dan kabupaten menyelesaikan perbaikan usulan hingga batas waktu 28 Agustus 2026. 2. Memutakhirkan hasil perbaikan dalam SIPPP sebagai basis pencatatan dan pengawalan usulan Musrenbang Otsus. 3. Menyusun berita acara dan mengawal pembahasan usulan koridor PP 107/PMK 33 pada forum evaluasi RAP September-November 2026.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** 1. Desk pendampingan berhasil meningkatkan keselarasan usulan tahun 2027 pada seluruh daerah dampingan dan mengidentifikasi bahwa sebagian besar ketidakselarasan usulan kesehatan disebabkan kesalahan tagging dan nomenklatur, bukan substansi. 2. Target akhir keselarasan 100% harus dicapai secara substantif dan berkualitas, bukan sekadar penyesuaian tagging administratif. **Saran** 1. Pemerintah daerah menuntaskan perbaikan tepat waktu dan menjadikan RAPPP 2025-2029 sebagai rujukan wajib penyusunan program kesehatan pada seluruh sumber pendanaan. 2. Integrasi validasi sistem SIPD-SIPPP-SIKD diusulkan sejak tahap input agar usulan tidak selaras tersaring lebih awal pada tahun berikutnya.

KEGIATAN IV		
		Infografis hasil desk pendampingan Papua Sehat Musrenbang Otsus Tahun 2026: 
Dokumentasi	:	 
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

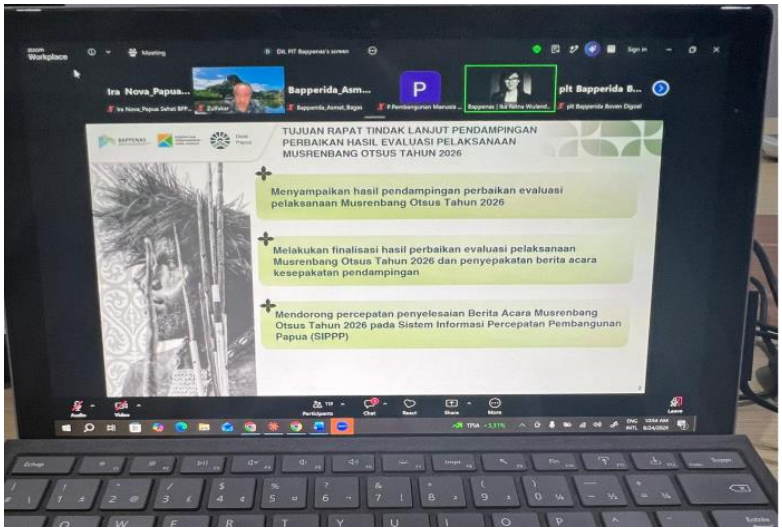
Kegiatan V.
FORUM PENDAMPINGAN LANJUTAN PENYELARASAN USULAN MUSRENBANG OTSUS SE-TANAH PAPUA

Tabel 2.5 Rincian Kegiatan V Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN V		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Senin, 24 Agustus 2026 **Waktu:** Pagi hari - selesai (daring melalui Zoom dengan breakout room/desk per daerah)
Lokasi Kegiatan	:	Daring (diikuti dari Merauke); peserta pemerintah daerah se-Tanah Papua
Judul Kegiatan	:	FORUM PENDAMPINGAN LANJUTAN PERBAIKAN KESELARASAN USULAN MUSRENBANG OTSUS DENGAN RAPPP 2025-2029 SE-TANAH PAPUA

KEGIATAN V		
Misi / Keterangan	:	**Papua Sehat:** Pengawalan lanjutan usulan kesehatan (operasional puskesmas, pelayanan rujukan, permakanan stunting dan lansia, usulan RSUD/Rumah Sakit Bersalin, pemberdayaan perempuan) pada sesi desk per daerah. **Papua Cerdas dan Papua Produktif:** Pengawalan usulan pendidikan dan ekonomi produktif pada desk masing-masing.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Sinkronisasi:** Melanjutkan penyelarasan usulan daerah dengan RAPPP 2025-2029 melalui SIPPP menjelang batas perbaikan 28 Agustus 2026. **Harmonisasi:** Menyepakati perlakuan atas usulan dalam koridor PP 106/PP 107 dan PMK 33 yang belum memiliki referensi RAPPP melalui berita acara. **Evaluasi:** Memantau capaian keselarasan per pemerintah daerah dan permasalahan tagging/sistem. **Koordinasi:** Berkoordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, dan KPK serta menyampaikan titipan Badan Pengarah Papua agar pelaksanaan Musrenbang Otsus daerah diverifikasi.
Pelaksana Kegiatan	:	Pemerintah Pusat (Bappenas bersama Kemendagri, Kemenkeu, dan KPK); diikuti BP3OKP dan pemerintah daerah se-Tanah Papua
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	Direktur Bappenas dan tim; perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, KPK; perwakilan Badan Pengarah Papua (BP3OKP); Bappeda/Baperida Provinsi Papua Selatan; OPD Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappi; serta pemerintah daerah lain se-Tanah Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Memantau kemajuan perbaikan keselarasan usulan tiap pemerintah daerah menjelang batas waktu 28 Agustus 2026. 2. Menyelesaikan permasalahan teknis (tagging sumber dana, penarikan data antar sistem, usulan tanpa referensi RAPPP). 3. Mengawal usulan kesehatan Papua Selatan agar terakomodasi dalam RAP 2027.
Hasil / Output Kegiatan	:	Forum menghasilkan pemutakhiran capaian dan kesepakatan sebagai berikut: 1. Secara nasional (se-Tanah Papua): 30 dari 48 pemerintah daerah telah mencapai keselarasan 100% dan menandatangani berita acara; 11 pemerintah daerah masih memerlukan pendampingan lanjutan; 5 pemerintah daerah masih pada tahap penyelesaian rancangan RKPD. Tingkat keselarasan Provinsi Papua Selatan disebut masih rendah dan diharapkan meningkat. 2. Kabupaten Mappi: setelah perbaikan lanjutan, jumlah usulan selaras meningkat menjadi 69 (dari 64 hasil desk 20 Agustus),

KEGIATAN V		
		antara lain melalui perbaikan enam usulan pendidikan serta verifikasi satuan keluaran usulan kesehatan (satuan "dokumen" diganti satuan penerima manfaat). 3. Kabupaten Merauke: sekitar 31 kegiatan belum sesuai RAPPP dan sekitar 16-18 sub kegiatan pada 5 OPD salah tagging sumber dana sehingga tidak tertarik ke SIPPP; disepakati pengiriman ulang daftar sub kegiatan untuk diproses melalui berita acara. Pada kegiatan pemberdayaan perempuan, satu usulan selaras dipertahankan dan usulan "layanan pengaduan masyarakat" dikeluarkan. 4. Kabupaten Asmat: usulan selaras difinalisasi menjadi sekitar 100-101 item, termasuk penyelarasan enam sub kegiatan pendidikan menjadi "penyediaan biaya personil peserta didik"; dicatat pula usulan yang hilang akibat pemutakhiran referensi antar tahun. 5. Kabupaten Boven Digoel: 15 dari 16 usulan yang belum selaras berhasil diselaraskan; klarifikasi usulan RSUD dan Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Bersalin) dinyatakan valid dan bukan duplikasi; dicatat pemisahan rekening kegiatan permakanan untuk sasaran stunting dan lansia. 6. Kesepakatan mekanisme: hanya usulan selaras dan direkomendasikan yang ditarik ke SIKD; usulan tidak selaras namun masih dalam koridor PP 106/PP 107 dan PMK 33 serta bukan daftar negatif dicatat dalam berita acara beserta matriks lampiran untuk diputuskan pada forum evaluasi RAP bersama Kemenkeu dan Kemendagri; usulan bernilai kecil disarankan dialihkan ke sumber pendanaan selain Otsus; kelengkapan lokasi, OPD pelaksana, dan rincian usulan wajib dipenuhi; daerah didorong memilih kegiatan strategis berdampak besar bagi Orang Asli Papua.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. Pemerintah daerah segera mengunci berita acara dan memutakhirkan data agar dapat ditarik ke SIPPP/SIKD sebelum 28 Agustus 2026. 2. Integrasi validasi sistem SIPD-SIPPP-SIKD diberlakukan sejak tahap input pada siklus perencanaan berikutnya. **Rencana Tindak Lanjut** 1. Pokja Papua Sehat mendampingi OPD kesehatan kabupaten/provinsi menuntaskan perbaikan dan kelengkapan data hingga 28 Agustus 2026. 2. Mengawal pembahasan usulan koridor PP 106/PP 107 dan PMK 33 (antara lain rujukan pasien OAP dan operasional puskesmas) pada forum evaluasi RAP.

KEGIATAN V		
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** Pendampingan lanjutan mempercepat perbaikan keselarasan usulan daerah Papua Selatan, dengan kemajuan nyata pada Kabupaten Mappi, Boven Digoel, dan Asmat, meskipun keselarasan provinsi masih perlu ditingkatkan. **Saran** Pemerintah daerah memprioritaskan kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada Orang Asli Papua dan menuntaskan kelengkapan data usulan sebelum batas waktu.
Dokumentasi	:	
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

Kegiatan VI.
RAPAT KOORDINASI BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN DENGAN BPKP TENTANG SINERGI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS

Tabel 2.6 Rincian Kegiatan VI Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN VI		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Rabu, 26 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 09.15 WIT - sekitar 12.00 WIT
Lokasi Kegiatan	:	Kantor BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan, Merauke
Judul Kegiatan	:	RAPAT KOORDINASI SINERGI PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS ANTARA BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN DAN BPKP
Misi / Keterangan	:	**Papua Sehat:** Penguatan pengawasan pemanfaatan Dana Otsus bidang kesehatan agar berdampak langsung pada indikator kesehatan Orang Asli Papua.

KEGIATAN VI		
		Papua Cerdas dan Papua Produktif: Pengawasan pemanfaatan Dana Otsus bidang pendidikan dan ekonomi dalam kerangka kerja sama yang sama.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Sinkronisasi:** Menyelaraskan peran pengawasan BPKP dengan fungsi SHEK BP3OKP berdasarkan UU 2/2021, PP 106/2021, PP 107/2021, Perpres 121/2022 jo. Perpres 102/2025, dan PMK 33/2024. **Harmonisasi:** Memadukan agenda pengawasan BPKP dengan agenda monitoring BP3OKP per tahapan penyaluran Dana Otsus. **Evaluasi:** Membahas temuan tata kelola Dana Otsus per kabupaten dan kendala pelaporan pemerintah daerah. **Koordinasi:** Menyepakati mekanisme berbagi laporan hasil pengawasan dan lokus pengawasan tahun 2026.
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP Provinsi Papua Selatan (tuan rumah)
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Selatan (pimpinan rapat); dr. Ira Nova (Pokja Papua Sehat); anggota Pokja Papua Cerdas; tim perwakilan BPKP yang membawahi wilayah Papua/Papua Selatan (sekitar 4 orang)
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membahas pembagian peran dan kolaborasi pengawasan Dana Otsus antara BP3OKP dan BPKP. 2. Meminta akses laporan hasil pengawasan BPKP sebagai referensi pelaksanaan fungsi SHEK. 3. Menyampaikan kondisi tata kelola Dana Otsus per kabupaten di Papua Selatan.
Hasil / Output Kegiatan	:	Rapat koordinasi menghasilkan poin-poin utama sebagai berikut: 1. BP3OKP meminta BPKP menyampaikan laporan/ikhtisar hasil pengawasan Dana Otsus sebagai referensi fungsi SHEK; BPKP menjelaskan bahwa laporan individual ditujukan kepada penanggung jawab, sehingga selama ini baru ikhtisar yang dapat dibagikan; disepakati penguatan mekanisme berbagi informasi. 2. Disampaikan capaian kolaborasi pengawasan BP3OKP bersama aparat penegak hukum berdasarkan hasil audit, berupa pengembalian ke kas negara sekitar Rp16,867 miliar. 3. Lokus pengawasan BPKP tahun 2026 adalah Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan; BP3OKP menitipkan agar Kabupaten Boven Digoel dan Mappi juga menjadi perhatian pengawasan. 4. Dibahas kondisi per daerah: Boven Digoel telah salur sejak Februari namun pelaksanaan Tahap II terkendala kodifikasi anggaran internal (contoh: dana kegiatan pemberdayaan perempuan

KEGIATAN VI		
		Rp1 miliar belum dapat dimanfaatkan); penyerapan Merauke sekitar 50%; di Asmat diperkirakan baru 30-44% dari dana yang tersalur benar-benar sampai kepada masyarakat; di Mappi terdapat aset tanah/bangunan yang belum dimanfaatkan. 5. Dibahas tindak lanjut 18 poin kesepakatan rapat koordinasi pencegahan korupsi di Jayapura 16 Juli 2026 (bersama KPK/BPKP), termasuk kewajiban labeling/tagging kegiatan Otsus dan transparansi melalui papan informasi Otsus, serta capaian keselarasan interoperabilitas Musrenbang 2026 se-Papua yang baru sekitar 57%. 6. Diidentifikasi kendala kelembagaan: kewajiban laporan pemerintah daerah kepada BP3OKP paling lambat 31 Maret belum pernah dipenuhi; rotasi ASN menyebabkan hilangnya data; serta keterbatasan dukungan administrasi anggaran sekretariat. 7. Diinformasikan rencana peluncuran aplikasi SERIUS (pendataan Orang Asli Papua terintegrasi) pada 1 September 2026 dan rencana integrasi data Dukcapil (penanda OAP), serta rencana pengiriman instrumen umpan balik kepada OPD enam kabupaten dengan tenggat pengisian sekitar 7 September 2026.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. BPKP membagikan laporan/ikhtisar hasil pengawasan kepada BP3OKP dan merekomendasikan pemerintah daerah melibatkan BP3OKP sesuai regulasi. 2. Pengecekan labeling/tagging kegiatan Otsus dilakukan hingga ke lapangan sesuai 18 poin kesepakatan Jayapura. **Rencana Tindak Lanjut** 1. BP3OKP lebih proaktif menyurati pemerintah daerah sebelum turun monitoring pada setiap tahapan penyaluran, tanpa menunggu undangan. 2. Menindaklanjuti usulan pelatihan/penyegaran pengawasan dari BPKP bagi anggota Pokja. 3. Mengirimkan instrumen umpan balik kepada OPD enam kabupaten dengan tenggat sekitar 7 September 2026 sebagai bahan reviu.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** Rapat memperjelas pembagian peran pengawasan Dana Otsus antara BPKP (pengawasan intern) dan BP3OKP (fungsi SHEK) serta membuka mekanisme berbagi informasi hasil pengawasan untuk memperkuat pengawalan Dana Otsus bidang kesehatan.

KEGIATAN VI		
		Saran Pemerintah daerah memenuhi kewajiban pelaporan kepada BP3OKP tepat waktu dan menindaklanjuti hasil pengawasan agar pemanfaatan Dana Otsus semakin tepat sasaran bagi Orang Asli Papua.
Dokumentasi	:	 
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

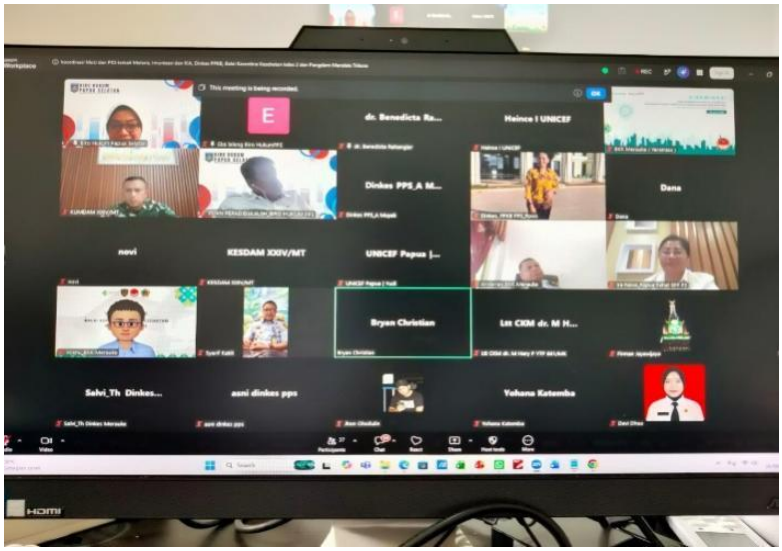
Kegiatan VII.
RAPAT LANJUTAN (DARING) PEMBAHASAN DAN FINALISASI KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) SINERGI PENGENDALIAN MALARIA, IMUNISASI, DAN PENURUNAN KEMATIAN IBU-BAYI

Tabel 2.7 Rincian Kegiatan VII Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN VII		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Rabu, 26 Agustus 2026 **Waktu:** Pukul 13.00 WIT - selesai (dua sesi pembahasan) **Pelaksanaan:** secara daring melalui Zoom Meeting
Lokasi Kegiatan	:	Daring (Zoom Meeting), diikuti dari Merauke, Provinsi Papua Selatan
Judul Kegiatan	:	RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DAN FINALISASI KESEPAKATAN BERSAMA SERTA PERJANJIAN KERJA SAMA "SINERGI DALAM PENGUATAN PENGENDALIAN MALARIA, PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI, SERTA PERCEPATAN PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI DI PROVINSI PAPUA SELATAN" (LANJUTAN RAPAT 12 AGUSTUS 2026)
Misi / Keterangan	:	**Papua Sehat:** Fasilitasi kerja sama tiga pihak (Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kodam XXIV/Mandala Trikora, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke) menuju eliminasi malaria Kabupaten Merauke tahun 2028 sebagai bagian eliminasi nasional 2030, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, dan penurunan AKI-AKB, dengan tagline "Untuk Setiap Anak Anim Ha Sehat".

KEGIATAN VII		
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Sinkronisasi:** Menyelaraskan draf Kesepakatan dan PKS dengan regulasi Otsus (usulan penambahan dasar hukum RIPPP/Perpres 24/2023, RAPPP/Perpres 107/2025, PP 106/2021, serta pemutakhiran Perpres 121/2022 jo. Perpres 102/2025). **Harmonisasi:** Memadukan peran Pemprov, TNI (Kesdam), BKK, mitra pembangunan, dan BP3OKP dalam satu kerangka kerja sama teknis-operasional. **Evaluasi:** Menelaah rumusan ruang lingkup, indikator kinerja utama, jangka waktu, dan mekanisme koordinasi draf dokumen. **Koordinasi:** Memfasilitasi kesepakatan antar pihak dan menetapkan jadwal finalisasi.
Pelaksana Kegiatan	:	Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB serta Biro Hukum) bersama Kodam XXIV/Mandala Trikora (Kesdam), BKK Kelas II Merauke, dan BP3OKP Provinsi Papua Selatan melalui Pokja Papua Sehat
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	Perwakilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Selatan; Biro Hukum Setda; Kesdam XXIV/Mandala Trikora dan Bagian Hukum Kodam; BKK Kelas II Merauke; Pokja Papua Sehat BP3OKP; draf MoU dan PKS beserta lampiran indikator kinerja utama
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Menindaklanjuti hasil rapat 12 Agustus 2026 di Kantor BKK Kelas II Merauke dengan menajamkan ruang lingkup, terminologi, dan tujuan Kesepakatan Bersama serta memisahkan materi teknis ke dalam PKS. 2. Memfinalkan rumusan peran BP3OKP yang bersifat koordinatif sesuai fungsi SHEK dalam PKS. 3. Menyempurnakan dasar hukum dan menetapkan jadwal finalisasi serta rencana penandatanganan.
Hasil / Output Kegiatan	:	Pembahasan menghasilkan kesepakatan penajaman dokumen sebagai berikut: 1. Ruang lingkup kerja sama diperluas dari Kabupaten Merauke menjadi seluruh Provinsi Papua Selatan, mencakup pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara, dengan target eliminasi malaria Merauke tahun 2028 (API < 1 per 1.000 penduduk) sebagai kontribusi menuju eliminasi nasional 2030. 2. Terminologi disepakati: istilah "kesepakatan" digunakan konsisten sebagai pengganti "nota kesepahaman"; penulisan masyarakat adat menggunakan bentuk "Anim Ha"; istilah yang tidak muncul pada batang tubuh dihapus.

KEGIATAN VII		
		3. Materi teknis (sistem logistik satu pintu, peran pihak non-penandatangan, Rencana Aksi 100 Hari) dipindahkan dari Kesepakatan ke PKS yang lebih operasional; peran BP3OKP diatur dalam PKS dengan sifat koordinatif (fungsi SHEK, bukan pelaksana teknis) dan tidak mengikat secara hukum. 4. Dasar hukum disempurnakan Biro Hukum: pemutakhiran Perpres 121/2022 dengan Perpres 102/2025; penyesuaian rujukan UU Kesehatan; verifikasi dasar hukum bersama Bagian Hukum Kodam; BP3OKP memberi masukan penambahan RIPPP (Perpres 24/2023), RAPPP (Perpres 107/2025), dan PP 106/2021. 5. Dukungan TNI difokuskan pada Kesehatan Kodam (Kesdam); Babinsa berperan sebagai penghubung wilayah, bukan pelaksana tugas kesehatan langsung; penyebutan mitra spesifik diganti frasa umum "organisasi internasional". 6. Jangka waktu PKS disusun dengan asumsi 5 tahun (menunggu konsultasi pimpinan); fokus awal PKS adalah imunisasi dasar bayi dan surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis) dengan target eksplisit sesuai standar WHO. 7. Jadwal disepakati: masukan atas draf melalui tautan track changes paling lambat Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 11.00; rapat finalisasi Sabtu, 29 Agustus 2026 pukul 13.00.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. Percepatan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan PKS agar Rencana Aksi 100 Hari (reaktivasi surveilans migrasi malaria, pengawasan minum obat Primaquine 14 hari bagi Satgas, rekonsiliasi logistik-kasus) segera berjalan. 2. Pembiayaan pelaksanaan memanfaatkan multi-sumber (APBN, APBD dengan belanja kesehatan minimal 10%, Dana Otsus selaras RIPPP/RAPPP, mitra pembangunan). **Rencana Tindak Lanjut** 1. Seluruh pihak menyampaikan masukan draf paling lambat 28 Agustus 2026 pukul 11.00; Biro Hukum merekapitulasi masukan dan menyempurnakan dasar hukum. 2. Tim hukum merumuskan klausul peran koordinatif BP3OKP dalam PKS; rapat finalisasi dilaksanakan 29 Agustus 2026.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** 1. Kerangka kerja sama tiga pihak untuk eliminasi malaria, imunisasi, dan penurunan AKI-AKB semakin matang dengan pemisahan yang jelas antara Kesepakatan Bersama (strategis) dan PKS (teknis-operasional).

KEGIATAN VII		
		2. BP3OKP berperan sebagai fasilitator koordinasi dan pengawasan implementasi sesuai fungsi SHEK, dengan hak memperoleh data dan laporan capaian indikator. **Saran** Para pihak menjaga jadwal finalisasi dan segera menetapkan focal point serta Tim Koordinasi Bersama agar implementasi tidak ter-tunda.
Dokumentasi	:	
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

Kegiatan VIII.
AUDIENSI DAN KOORDINASI BERSAMA ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA SELATAN JALUR AFIRMASI MENGENAI KONDISI PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH BADE, KABUPATEN MAPPI, DAN PENGUATAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Tabel 2.8 Rincian Kegiatan VIII Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Bulan Agustus 2026

KEGIATAN VIII		
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	**Hari/Tanggal:** Jumat, 28 Agustus 2026 **Pelaksanaan:** secara luring (tatap muka)
Lokasi Kegiatan	:	Kantor BP3OKP Provinsi Papua Selatan, Merauke
Judul Kegiatan	:	AUDIENSI DAN KOORDINASI BERSAMA ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA SELATAN JALUR AFIRMASI MENGENAI KONDISI PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH BADE, KABUPATEN MAPPI, DAN PENGUATAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR
Misi / Keterangan	:	**Papua Sehat:** Penyerapan temuan lapangan mengenai pelayanan kesehatan di wilayah Bade, Kabupaten Mappi (ketiadaan ambulans,

KEGIATAN VIII		
		honor tenaga kesehatan yang belum dibayar, keterbatasan obat, kuota rujukan berjenjang, serta kebutuhan dokter spesialis), kondisi serupa di Kabupaten Boven Digoel, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pekerja perusahaan, serta data kependudukan sebagai dasar perencanaan kesehatan. **Papua Cerdas:** Program pelatihan berbicara di depan umum (public speaking), kepemimpinan, dan komputer bagi anak putus sekolah, pemuda, guru, dan pegawai distrik di wilayah Bade yang dijalankan Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi bersama Paroki Bade dan Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), kebutuhan perangkat laptop, serta kendala sertifikat tanah fasilitas pendidikan. **Papua Produktif:** Penjajakan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan perkebunan di sekitar Bade untuk ambulans dan pelatihan tenaga kerja lokal, isu royalti dan hak ulayat, serta penyiapan SDM lokal agar terserap industri.
Tugas dan Fungsi yang Dilaksanakan	:	**Sinkronisasi:** Menyelaraskan aspirasi dan temuan Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi dengan agenda kunjungan kerja Pokja, sasaran Papua Sehat dalam RIPPP/RAPPP, serta kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi. **Harmonisasi:** Memadukan peran DPR Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Mappi, Dinas Kesehatan Provinsi, gereja (Paroki Bade), perusahaan (melalui CSR), dan BP3OKP dalam satu rencana tindak lanjut. **Evaluasi:** Menilai kondisi pelayanan kesehatan Bade sebagai sentra lima distrik, khususnya transportasi rujukan, pembayaran honor tenaga kesehatan honorer, ketersediaan obat, dan kuota rujukan. **Koordinasi:** Menyepakati surat BP3OKP kepada perusahaan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi, serta rencana kunjungan kerja bersama seluruh Pokja ke Bade.
Pelaksana Kegiatan	:	BP3OKP Provinsi Papua Selatan (Kepala BP3OKP Papua Selatan bersama Pokja Papua Sehat) selaku penerima audiensi Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi
Peserta Kegiatan / Sumber Dokumen	:	Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi; Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC; Anggota Pokja Papua Sehat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Menyerap aspirasi dan temuan lapangan Anggota DPR jalur afirmasi mengenai pelayanan kesehatan di wilayah Bade dan Kabupaten Mappi pada umumnya.

KEGIATAN VIII		
		2. Menyepakati langkah advokasi pemenuhan ambulans, pembayaran honor tenaga kesehatan, ketersediaan obat, dan dokter spesialis kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi. 3. Merencanakan kunjungan kerja bersama seluruh Pokja ke Bade serta menjajaki dukungan CSR perusahaan dan kolaborasi program pemberdayaan masyarakat.
Hasil / Output Kegiatan	:	Audiensi menghasilkan temuan dan kesepakatan sebagai berikut: 1. Bade merupakan sentra pelayanan bagi lima distrik dengan puluhan ribu penduduk (daftar pemilih tetap sekitar 17.000 pemilih, belum termasuk anak-anak). Puskesmas di Bade sekitar dua tahun tidak memiliki ambulans; antar-jemput pasien, termasuk ibu bersalin, menggunakan mobil pick up atau ojek dengan biaya sekitar Rp100.000 yang dibebankan kepada pasien; pasien dari kampung diangkat dari perahu ke atas mobil pikap; jenazah diangkut dengan gerobak atau pikap dan sempat viral di media sosial. 2. Tenaga kesehatan honorer di Bade, termasuk dokter, belum menerima pembayaran honor; ketersediaan obat terbatas; kuota rujukan berjenjang dari puskesmas ke rumah sakit di Kepi (Mappi) yang ditanggung Dinas Kesehatan hanya sekitar tiga sampai empat kali per tahun akibat kebijakan efisiensi. Kondisi tersebut telah dilaporkan kepala puskesmas dalam laporan bulanan selama tujuh bulan terakhir. 3. Program Wakil Presiden untuk pendayagunaan dokter spesialis telah diinformasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi agar mengusulkan kebutuhan Bade; status usulan belum diketahui dan akan ditelusuri Pokja Papua Sehat, termasuk nama dokter yang diusulkan. 4. Tindak lanjut cepat: koordinasi Anggota DPR dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi menghasilkan komitmen pengiriman satu unit ambulans ke Bade (menunggu jadwal kapal). Disepakati bahwa jenis kendaraan kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi geografis sungai dan pesisir di Mappi, Boven Digoel, dan Asmat; satu unit dinilai belum mencukupi. 5. Disepakati kunjungan kerja bersama seluruh Pokja (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) ke Bade pada September 2026 setelah kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, dengan pemberitahuan dua minggu sebelumnya serta koordinasi dengan Puskesmas Bade dan Polsek setempat; sekolah di wilayah tersebut akan dipantau secara berkelanjutan. 6. Kemitraan CSR: BP3OKP akan menyurati manajemen dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar Bade, yaitu PT

KEGIATAN VIII		
		MAM (Korindo Group) dan PT Bio Inti Agrindo, untuk beraudiensi guna memperoleh dukungan berupa ambulans, perangkat laptop pelatihan, dan pelatihan tenaga kerja lokal (mekanik/teknik) agar pemuda setempat terserap industri kelapa sawit. Dicatat pula isu royalti dan pembayaran hak ulayat yang dinilai sangat rendah (sekitar Rp2.500.000) serta perlunya presentasi CSR perusahaan kepada masyarakat Bade, yang akan didorong bersama Anggota DPR jalur afirmasi dan MRP. 7. Program Anggota DPR jalur afirmasi berupa pelatihan berbicara di depan umum, kepemimpinan, dan komputer bagi anak putus sekolah, pemuda, guru, dan pegawai distrik telah dilaksanakan dua kali di tingkat distrik dan dilaporkan kepada Wakil Presiden. Pelatihan berikutnya dipusatkan di Paroki Bade bersama ISKA dengan pastor sebagai instruktur, dan Pokja Papua Cerdas dapat berkontribusi sebagai pengajar; kebutuhan laptop akan diusahakan melalui dukungan Gubernur dan CSR perusahaan. 8. Kependudukan dan JKN: data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di kabupaten tidak berjalan optimal meskipun Dana Otsus juga dialokasikan bagi Dukcapil; sebagai contoh daftar pemilih Boven Digoel sekitar 36.000 pemilih stagnan bertahun-tahun, Distrik Ninati lebih dari 700 pemilih tanpa penambahan, Mappi sekitar 77.000, dan Merauke lebih dari 200.000. Ribuan pekerja perusahaan (PT Bio Inti Agrindo sekitar 5.000-10.000 orang) ber-KTP luar Papua dan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan domisili di luar Papua Selatan sehingga tidak tercatat sebagai penduduk Papua Selatan. Diusulkan pendataan besar-besaran melalui Dukcapil dan perusahaan, layanan pencatatan sipil di tingkat distrik (seperti di Kaimana dan Fakfak), serta masukan kepada KPU dan DPR; isu ini akan dibawa ke pembahasan Rencana Anggaran Program (RAP) Dana Otsus berikutnya. 9. Isu lain yang dicatat: kendala pengurusan sertifikat tanah untuk fasilitas pendidikan di Bade, kekosongan jabatan pada perangkat daerah Kabupaten Mappi, serta perlunya penguatan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Mappi.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	:	**Rekomendasi** 1. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi memastikan ambulans Bade segera tiba dan menambah kendaraan kesehatan yang sesuai kondisi geografis (termasuk ambulans air), termasuk bagi Kabupaten Boven Digoel. 2. Pemerintah Kabupaten Mappi menyelesaikan pembayaran honor tenaga kesehatan, mencukupi ketersediaan obat, dan meninjau kuota rujukan yang ditanggung Dinas Kesehatan.

KEGIATAN VIII		
		3. Usulan dokter spesialis melalui program Wakil Presiden ditindaklanjuti dan dipantau realisasinya. 4. BP3OKP menyurati perusahaan perkebunan di sekitar Bade untuk dukungan CSR bidang kesehatan dan pelatihan tenaga kerja lokal, dengan pendampingan Anggota DPR jalur afirmasi dan MRP. 5. Penertiban data kependudukan dan kepesertaan JKN pekerja perusahaan melalui pendataan bersama Dukcapil, layanan pencatatan sipil di distrik, dan pemanfaatan Dana Otsus yang dialokasikan bagi Dukcapil. **Rencana Tindak Lanjut** 1. Melaksanakan kunjungan kerja bersama seluruh Pokja ke Bade pada September 2026 setelah kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat pada 6-13 September 2026. 2. Mengirimkan surat permohonan audiensi kepada manajemen PT MAM dan PT Bio Inti Agrindo serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi mengenai ambulans, honor tenaga kesehatan, dan obat. 3. Menelusuri status usulan dokter spesialis Kabupaten Mappi dan menyampaikan isu kependudukan-JKN sebagai bahan pembahasan RAP Dana Otsus serta koordinasi dengan KPU dan DPR Provinsi Papua Selatan.
Kesimpulan dan Saran	:	**Kesimpulan** 1. Wilayah Bade sebagai sentra lima distrik menghadapi persoalan mendasar pelayanan kesehatan: ketiadaan ambulans selama sekitar dua tahun, honor tenaga kesehatan yang belum dibayar, keterbatasan obat dan rujukan, serta kebutuhan dokter spesialis. 2. Audiensi menghasilkan komitmen konkret (pengiriman ambulans, kunjungan kerja bersama, dan penjajakan CSR perusahaan) serta membuka jalur kolaborasi BP3OKP dengan DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi dalam mengawal pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. **Saran** 1. Pemerintah daerah menempatkan pemenuhan transportasi rujukan dan hak tenaga kesehatan di wilayah terpencil sebagai prioritas Dana Otsus bidang kesehatan. 2. Pokja Papua Sehat menjadikan temuan Bade sebagai bahan analisis akar masalah dan rekomendasi kepada Bupati Mappi, Gubernur, dan kementerian terkait sesuai kewenangan.

KEGIATAN VIII		
Dokumentasi	:	 
Penyusun Laporan Kegiatan	:	**dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M.**

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan selama Bulan Agustus Tahun 2026 menunjukkan terlaksananya fungsi SHEK dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang kesehatan. Delapan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan berbagai informasi strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Selatan.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian selama Bulan Agustus meliputi: hasil evaluasi tiga tahun daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan yang menyoroti pembiayaan kesehatan (dampak efisiensi Transfer ke Daerah, kepesertaan PBI-JKN Orang Asli Papua, regulasi BPJS Kesehatan bagi rumah sakit tipe D), kekurangan tenaga kesehatan, dan kebutuhan rumah sakit rujukan provinsi; peningkatan keselarasan usulan program kesehatan daerah tahun 2027 dengan RAPPP 2025-2029 (rata-rata keselarasan se-Tanah Papua baru 57,49%, dengan kemajuan hasil desk pendampingan pada Provinsi Papua Selatan serta Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat); perbaikan kesalahan tagging sumber dana pada usulan kesehatan strategis; kelengkapan target keluaran dan data penerima manfaat by name by address dengan prioritas Orang Asli Papua; penajaman kerja sama tiga pihak menuju eliminasi malaria Kabupaten Merauke tahun 2028, peningkatan cakupan imunisasi, dan penurunan AKI-AKB; penguatan pengawasan dan tata kelola Dana Otsus bidang kesehatan bersama BPKP, termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan pemerintah daerah dan ketepatan sasaran pemanfaatan dana bagi Orang Asli Papua; serta temuan lapangan dari wilayah Bade, Kabupaten Mappi (ketiadaan ambulans, honor tenaga kesehatan yang belum dibayar, keterbatasan obat dan rujukan, serta ketidaktertiban data kependudukan dan kepesertaan JKN pekerja perusahaan) yang disampaikan Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi.

Pelaksanaan kegiatan juga memperkuat kemitraan antara BP3OKP dan Komisi II DPR RI, Anggota DPR Provinsi Papua Selatan jalur afirmasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, KPK, BPKP, LKPP, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, Kodam XXIV/Mandala Trikora, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Sejalan dengan arahan pimpinan BP3OKP, metode kerja Pokja bergeser menuju kerja berbasis data dan analisis akar masalah hingga determinan kesehatan masyarakat.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Bulan Agustus 2026, Pokja Papua Sehat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menuntaskan perbaikan dan pemutakhiran usulan kesehatan tahun 2027 pada aplikasi SIPPP sesuai berita acara paling lambat 28 Agustus 2026, serta mengawal pembahasannya pada forum evaluasi RAP September-November 2026 hingga penetapan APBD Desember 2026, dengan target keselarasan 100% yang substantif.
2. Setiap usulan dan kegiatan kesehatan berdana Otsus dilengkapi target keluaran terukur (volume, satuan, lokasi, pagu) dan data penerima manfaat by name by address dengan prioritas Orang Asli Papua, serta diberi label/tagging Otsus sesuai kesepakatan pencegahan korupsi.
3. Para pihak segera memfinalisasi dan menandatangani Kesepakatan Bersama serta PKS sinergi pengendalian malaria, peningkatan cakupan imunisasi, dan penurunan kematian ibu-bayi, dan melaksanakan Rencana Aksi 100 Hari termasuk reaktivasi surveilans migrasi malaria.

4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil evaluasi tiga tahun DOB, khususnya perlindungan kepesertaan PBI-JKN Orang Asli Papua, fasilitasi pembahasan regulasi BPJS Kesehatan bagi rumah sakit tipe D, percepatan pembangunan rumah sakit rujukan provinsi, serta pemenuhan tenaga kesehatan daerah 3T dengan standar penghasilan dan jaminan keamanan.
5. Memperkuat kolaborasi pengawasan Dana Otsus dengan BPKP dan KPK, termasuk berbagi laporan hasil pengawasan, monitoring per tahapan penyaluran, dan pemenuhan kewajiban pelaporan pemerintah daerah kepada BP3OKP tepat waktu.
6. Memperkuat pelaksanaan fungsi SHEK melalui kerja berbasis data dan analisis determinan kesehatan (air bersih, sanitasi, PHBS), pelibatan Tim Penggerak PKK kabupaten dan mitra pembangunan seperti UNICEF, serta penyusunan rekomendasi yang konkret dan diarahkan kepada pihak yang berwenang.
7. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi memastikan ketersediaan ambulans yang sesuai kondisi geografis, pembayaran honor tenaga kesehatan, kecukupan obat, dan kuota rujukan bagi rumah sakit dan puskesmas di wilayah Bade dan sekitarnya, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel menangani kondisi serupa di wilayahnya; BP3OKP menindaklanjuti penjajakan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta kunjungan kerja bersama seluruh Pokja ke Bade pada September 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

BP3OKP
BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
PROVINSI PAPUA SELATAN

PAPUA CERDAS
Mencerdaskan Papua, Membangun Masa Depan

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA CERDAS BP3OKP PAPUA SELATAN

Bersinergi Mewujudkan Papua Selatan Cerdas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan



KOLABORASI
Bersama membangun Papua Selatan

AKSELERASI
Mempercepat inovasi dan pelayanan

INOVASI
Melahirkan gagasan dan solusi baru

BERDAMPAK
Memberi manfaat nyata untuk masyarakat

PERIODE BULAN
AGUSTUS
2026

Sekretariat BP3OKP
Provinsi Papua Selatan
Merauke

www.bp3okp.papuaselatan.go.id

#PapuaCerdas
Cerdas Membangun Papua Selatan

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL KEGIATAN
POKJA PAPUA CERDAS BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN
BULAN AGUSTUS 2026

PROGRAM PERCEPATAN MISI PAPUA CERDAS

Pengembangan Sekolah Terbuka, Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari, Pengembangan Sekolah Berpola Asrama, Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

Laporan ini telah diperiksa, dievaluasi, dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan bulanan Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan.

Merauke, 01 September 2026

Penyusun,
Anggota Pokja Papua Cerdas
BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Jaswadi, S.Pd., M.Pd

Mengetahui:
Kepala BP3OKP Papua Selatan

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
SEKRETARIAT
BP3OKP MERAUKE

Yoseph Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pokja Papua Cerdas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan Bulan Agustus Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan dalam menjalankan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) atas berbagai kebijakan, program, dan kegiatan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Selatan. Sepanjang bulan Agustus 2026, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh agama, masyarakat, serta mitra pembangunan, guna memperkuat sinergi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur, sejalan dengan implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.

Laporan ini menyajikan tujuan kegiatan, hasil yang dicapai, output strategis, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut, dengan harapan dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten, BP3OKP, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, Bappenas, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan selama periode pelaporan.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan laporan maupun pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.

Merauke, 03 September 2026
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
RINGKASAN EKSEKUTIF 5
BAB I 7
PENDAHULUAN 7
1.1 Maksud dan Tujuan 7
1.1.1 Maksud 7
1.1.2 Tujuan 7
1.2 Ringkasan Kelembagaan 7
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan 7
1.2.2 Definisi 8
1.2.3 Struktur Kelembagaan 8
1.2.4 Tugas dan Fungsi 8
1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan 9
1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 10
1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan 10
BAB II 12
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN 12
2.1 Pelaksanaan Kegiatan 12
KEGIATAN 1 12
KEGIATAN 2 15
KEGIATAN 3 17
KEGIATAN 4 20
KEGIATAN 5 23
KEGIATAN 6a 26
KEGIATAN 6b 28
KEGIATAN 7 30
KEGIATAN 8 33
BAB III 39
PENUTUP 39
3.1 Kesimpulan 39
3.2 Saran 40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kegiatan Bulanan Pokja Papua Cerdas — Bulan Agustus 2026 ini menyajikan pelaksanaan tugas Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang dilaksanakan oleh Anggota Pokja Papua Cerdas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan sepanjang bulan Agustus 2026. Selama periode ini, Pokja Papua Cerdas telah melaksanakan dan/atau mendampingi 10 (sepuluh) kegiatan strategis yang mencakup aspek keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, pelestarian bahasa dan budaya, kenegaraan, pendidikan tinggi, serta pengawasan Dana Otonomi Khusus.

Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Koordinasi percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun Anggaran 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (5 Agustus 2026), di mana teridentifikasi bahwa capaian penyaluran se-wilayah Papua masih jauh tertinggal dari target dan Papua Selatan baru mencatatkan realisasi di satu dari lima kabupaten.
- Rapat koordinasi dengan Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Kabupaten Merauke (3 Agustus 2026) dalam rangka persiapan menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026 di Jayapura, yang menghasilkan kesepakatan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kongres.
- Kehadiran pada Rapat Paripurna DPR Papua Selatan (10–11 Agustus 2026) dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc, dengan capaian penting berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LPP APBD TA 2025, meskipun masih terdapat catatan fraksi terkait pengelolaan SiLPA dan percepatan penanganan stunting.
- Kehadiran pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (14 Agustus 2026), termasuk pelantikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang baru sebagai mitra kerja strategis Pokja Papua Cerdas.
- Partisipasi dalam Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera dan Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 2026).
- Kuliah Tamu bertema "Ketimpangan dan Transformasi Ekonomi antar Wilayah di Indonesia" bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus (19 Agustus 2026), sebagai kontribusi BP3OKP dalam penguatan wawasan akademik mahasiswa dan sivitas akademika Papua Selatan.
-

Pendampingan sebagai Tim Asistensi pada Sesi Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 (20 Agustus 2026) untuk Desk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, di mana rata-rata usulan yang belum selaras dengan RAPPP 2025–2029 di kelima wilayah tersebut masih cukup tinggi (berkisar 21%–55%).

- Koordinasi dengan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua terkait Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke (26 Agustus 2026).

Secara umum, seluruh kegiatan pada bulan Agustus 2026 terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib, serta menghasilkan sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan menjadi dasar penguatan koordinasi lintas sektor pada periode berikutnya. Tantangan utama yang perlu menjadi perhatian bersama adalah percepatan penyaluran Dana Otsus/DTI, peningkatan keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan RAPPP 2025–2029, serta penguatan tata kelola dan pengawasan pengelolaan Dana Otonomi Khusus secara transparan dan akuntabel.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Maksud dari laporan bulanan ini disusun agar mempermudah POKJA dalam menginventarisir kegiatan Program Kerja yang tersusun dalam kalender tahunan dan rencana kegiatan setiap bulannya yang telah dilaksanakan dan juga menginventarisir pemenuhan kegiatan yang bersumber dari kegiatan kemitraan POKJA Papua Cerdas BPP PPS.

1.1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaporan bulanan dari Kelompok Kerja Papua Cerdas Badan Pengarah Provinsi Papua Selatan, adalah:

1. Menyajikan catatan kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP PPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK dalam bulan berjalan.
2. Mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK dalam membantu Anggota BPP PPS.
3. Memberikan masukan strategis untuk penguatan koordinasi lintas OPD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peran SHEK.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
5. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
6. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.

7. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

1.2.2 Definisi

1. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2. Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2: Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan

Struktur organisasi BP3OKP dipimpin oleh Ketua BPP (dijabat oleh Wakil Presiden RI), membawahi Anggota Badan Pengarah Papua (terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta 6 Anggota Perwakilan Provinsi Papua), Sekretaris Badan Pengarah Papua, dan Komite Eksekutif. Perwakilan Provinsi Papua terdiri dari: Ali Kunam Yoku (Provinsi Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanawo Yolmen (Papua Selatan), Petrus Wamla (Papua Tengah), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalauw (Papua Barat Daya). Sekretariat Badan Pengarah Papua membawahi Kelompok Kerja (Pokja) di masing-masing provinsi, termasuk Kelompok Ahli.

1.2.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:

- Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;

- Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
- Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program. Adapun ruang lingkup kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP PPS dalam pelaksanaan Otsus Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara umum, sebagai berikut:

- Sinkronisasi Program dan Kebijakan — menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus; menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- Harmonisasi Data dan Informasi — bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data; menyusun basis data yang komprehensif dan up-to-date terkait hasil evaluasi dan monitoring program Otsus di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
- Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program — melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Pokja Papua Cerdas; menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan.
- Koordinasi Internal dan Eksternal — melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya; menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang.
- Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya — melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program; mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.
- Pelaporan dan Transparansi — mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk

masyarakat Papua Selatan; menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

1.2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung dengan SDM sebagaimana Tabel 1.1 berikut.

No.	Unit Kerja & Jabatan	Jumlah
1.	Pimpinan: Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan	1 org
2.	Kelompok Kerja (POKJA) — POKJA Papua Sehat	2 org
	Kelompok Kerja (POKJA) — POKJA Papua Cerdas	2 org
	Kelompok Kerja (POKJA) — POKJA Papua Produktif	2 org
	Kelompok Kerja (POKJA) — POKJA Papua Polhukam	- org
3.	Pendukung Administratif dan Substantif: Tim Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke Provinsi Papua Selatan	5 org
4.	Staf/Karyawan yang diperbantukan kepada BP3OKP (karyawan PPNPN)	3 org

1.2.7 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP, tersedia sarana dan prasarana utama pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagaimana Tabel 1.2 berikut.

No.	Uraian	Sat.	Vol.
1.	Bangunan Kantor	Gedung	1
2.	Ruangan: Front Office, Ruang Rapat, Ruang Tamu, Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP PPS, Ruang Kerja Anggota Pokja dan Staf, Ruang Dapur, Kamar Mandi & Toilet	Ruang	7
3.	Meja dan Kursi Kerja Pimpinan (3 kursi + 1 meja)	set	1
	Meja dan kursi sofa ruang pimpinan	set	1
	Meja dan kursi sofa ruang tamu	set	1
	Meja Anggota Pokja dan Staf	unit	1
	Kursi Pokja dan Staf	unit	6
	Meja dan kursi Front Office	set	1
	Smart TV	unit	2

No.	Uraian	Sat.	Vol.
	TIK Starlink (digunakan bersama)	unit	1
	Laptop	unit	4
	Printer	unit	1
	Hardisk Eksternal 1 TB	unit	1
	Kitchen Set	set	1
	Kulkas	unit	1
	Dispenser	unit	1
	Kompor Listrik	unit	1
	ATK	-	Tersedia
	Peralatan Makan	-	Tersedia

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas pada laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III bulan Agustus tahun 2026, dengan rincian 10 (sepuluh) kegiatan sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

KEGIATAN 1

Judul Kegiatan	Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Rabu, 5 Agustus 2026 Pukul : 12.00 – Selesai
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Undangan Rapat Virtual (Zoom Meeting) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026, tanggal 5 Agustus 2026 (Meeting ID: 932 0059 9707)
Lokasi Kegiatan	Ruang rapat/command center Kantor BP3OKP Provinsi Papua Selatan, diikuti secara daring (virtual) melalui aplikasi Zoom Meeting
Misi/Keterangan	Mendukung percepatan dan penertiban penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI bagi seluruh provinsi di wilayah Papua agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Tugas dan Fungsi	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait penyaluran dan penyerapan Dana Otsus dan DTI, sebagai bagian dari fungsi Pokja Papua Cerdas dalam mendukung tugas BP3OKP.
Pelaksana Kegiatan	Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (penyelenggara/command center); Perwakilan BP3OKP dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya; Perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-wilayah Papua yang menjadi penerima Dana Otsus dan DTI; Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan.

Tujuan Pelaksanaan	Membahas percepatan penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang capaiannya masih tertinggal dari target (45% paling lambat Juni 2026); Menyampaikan syarat dan mekanisme penyaluran Tahap I–III serta ketentuan penempatan APBD apabila RAP/RAB tidak diajukan; Mendorong percepatan penyusunan RAP perubahan/RAB serta validasi integrasi RAB-APBD sebagai dasar pencairan; Menyosialisasikan pentingnya pemisahan rekening khusus (tagging) Otsus/DTI dan pemetaan SILPA/SILVA; Memonitor status penyaluran per provinsi dan kabupaten/kota se-Papua.
Hasil/Output Kegiatan	Per Juli 2026, dari 48 pemerintah daerah penerima, 9 pemda telah menyalurkan Tahap II Tahun Anggaran 2026, sedangkan 39 pemda lainnya belum menyalurkan; Provinsi Papua Tengah mencatat capaian tertinggi (4 dari 9 kabupaten telah salur: Puncak, Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya), diikuti Papua (2/10), Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya (masing-masing 1), serta Papua Selatan (1/5, yakni Kabupaten Asmat); Provinsi Papua Barat tercatat belum ada pemda yang menyalurkan (0/8); Teridentifikasi kendala terkait dokumen syarat salur, SILPA/SILVA yang belum terpetakan, serta perlunya penyusunan RAP perubahan di sejumlah daerah; Ditegaskan pentingnya integrasi sistem SIP3/SIPD/SIAKD agar laporan realisasi dapat tereproduksi otomatis dan mempercepat proses validasi.
Rekomendasi & RTL	BP3OKP Provinsi Papua Selatan agar mendorong dan mendampingi kabupaten/kota di wilayahnya (khususnya yang belum salur) untuk segera melengkapi laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran sebagai syarat salur Tahap II; Melakukan koordinasi lanjutan dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait penyusunan RAP perubahan/RAB dan validasi integrasi RAB-APBD; Mendorong penerapan tagging/rekening khusus Otsus dan DTI di tingkat kabupaten/kota guna memperjelas audit trail; Menjadwalkan monitoring dan evaluasi berkala pada Agustus–September 2026 untuk memastikan percepatan penyaluran mencapai target; Melaporkan perkembangan hasil pendampingan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut berikutnya.

Dokumentasi Kegiatan	Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan mengikuti Rapat Percepatan Penyaluran Otsus/DTI secara virtual bersama Kemendagri; suasana ruang rapat/command center saat mengikuti paparan 'Peran Strategis Kemendagri'; diskusi internal tim Pokja Papua Cerdas selama rapat berlangsung; paparan materi 'Potret RAP & Penyaluran Penerimaan dalam Rangka Otsus' (skema Tahap I-III penyaluran).

Dokumentasi/Link Dokumen
:



Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan mengikuti Rapat Percepatan Penyaluran Otsus/DTI secara virtual bersama Kemendagri.



Suasana ruang rapat/command center saat mengikuti paparan 'Peran Strategis Kemendagri'.



Diskusi internal tim Pokja Papua Cerdas selama rapat berlangsung.



Paparan materi 'Potret RAP & Penyaluran Penerimaan dalam Rangka Otsus' (skema Tahap I-III penyaluran).

KEGIATAN 2

Judul Kegiatan	Rapat Koordinasi Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan bersama Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Merauke
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Senin, 3 Agustus 2026 Pukul : 13.00-16.00 WIT
Dasar Pelaksanaan	Insidentil: Koordinasi Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan bersama Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Kabupaten Merauke dalam rangka membahas kesiapan menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026 di Jayapura
Lokasi Kegiatan	Ruang Rapat Kantor BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Koordinasi persiapan menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026
Pelaksana Kegiatan	Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan	Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan, dan Pengurus Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Kabupaten Merauke.
Tujuan Pelaksanaan	Membahas kesiapan Provinsi Papua Selatan dalam menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026 di Jayapura, serta menjalin sinergi dengan KSBN Merauke dalam pelestarian bahasa dan budaya daerah.
Hasil/Output Kegiatan	Disepakati untuk segera melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pra-Kongres pada bulan Agustus 2026 sebagai forum persiapan menghadapi Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026 di Jayapura. FGD Pra-Kongres akan menghadirkan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Balai Bahasa, Balai Guru Penggerak (BGTK), Bappeda, praktisi budaya, dan KSBN Merauke. Estimasi jumlah peserta FGD Pra-Kongres sebanyak 30 orang.
Rekomendasi & RTL	Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan segera menyusun rencana teknis dan jadwal pelaksanaan FGD Pra-Kongres pada bulan Agustus 2026. Melakukan koordinasi dan mengirimkan undangan kepada Dinas Pendidikan, Disporapar, Balai Bahasa, BGTK, Bappeda, praktisi budaya, dan KSBN Merauke sebagai peserta FGD. Menyiapkan bahan dan materi pembahasan terkait pelestarian bahasa daerah sebagai masukan pada Kongres Nasional Bahasa Daerah Tahun 2026 di Jayapura. Melaporkan hasil FGD Pra-Kongres kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.

Dokumentasi Kegiatan	Dokumentasi pertemuan di Kantor BP3OKP Provinsi Papua Selatan bersama pengurus KSBN Kabupaten Merauke.

Dokumentasi/Link Dokumen
:





KEGIATAN 3

Judul Kegiatan	Rapat Paripurna DPR Papua Selatan dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc (Hari Pertama)
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Senin, 10 Agustus 2026 (Hari ke-1 dari 2 hari) Pukul : 10.00 WIT – Selesai
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Undangan Rapat Paripurna dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, perihal Undangan Rapat
Lokasi Kegiatan	Ruang Rapat Utama DPR Papua Selatan, Kawasan Pusat Pemerintah Papua Selatan, KTM Salor - Distrik Kurik, Merauke
Misi/Keterangan	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPR Papua Selatan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dan Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Cerdas, dan Pokja Produktif BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Sekretaris Daerah, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, unsur Forkopimda (Pangdam XXIV Mandala Trikora, Dankodaeral XI Merauke, Danlanud J.A Dimara Merauke, Kapolda Papua), Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan, para Staf Ahli dan Asisten Gubernur, Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan, serta pimpinan Perangkat Daerah/OPD lingkup Provinsi Papua Selatan sesuai daftar undangan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026.
Tujuan Pelaksanaan	Mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc, sebagai bagian dari tugas Pokja Papua Cerdas mewakili BP3OKP Papua Selatan.
Hasil/Output Kegiatan	Rapat Paripurna dibuka secara resmi, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Sambutan Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, SH, menyampaikan bahwa Rapat Paripurna diselenggarakan dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc, dan mengajak seluruh peserta mengikuti pembahasan secara aktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sambutan Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rapat Paripurna serta menekankan pentingnya pertanggungjawaban

	pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus mendorong percepatan pembahasan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Komisi Hukum Ad Hoc disampaikan oleh Dr. Safaruddin, ST, MT. Rangkaian acara pembukaan ditutup dengan doa. Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan (Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dan Pokja Produktif Marthinus Kendom, SP., MP.) hadir dan mengikuti jalannya Rapat Paripurna.
Rekomendasi & RTL	Melanjutkan mengikuti Rapat Paripurna pada hari kedua, Selasa, 11 Agustus 2026 pukul 10.00 WIT di Ruang Sidang DPR Papua Selatan, Salor, Merauke. Mencermati perkembangan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc sebagai bahan masukan BP3OKP Papua Selatan. Melaporkan hasil rapat kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.
Dokumentasi Kegiatan	Suasana penyampaian sambutan pada pembukaan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan, Salor, Merauke; suasana Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc; perwakilan Pokja Papua Cerdas dan Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Selatan menghadiri Rapat Paripurna.

Dokumentasi/Link Dokumen	:



Suasana penyampaian sambutan pada pembukaan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan, Salor, Merauke.



Suasana Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc.



Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dari Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan mengikuti Rapat Paripurna.



Perwakilan Pokja Papua Produktif BP3OKP Papua Selatan menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua Selatan.

KEGIATAN 4

Judul Kegiatan	Rapat Paripurna DPR Papua Selatan Hari Kedua: Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Gubernur Papua Selatan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Selasa, 11 Agustus 2026 (Hari ke-2 dari 2 hari) Pukul : 10.00 WIT – Selesai
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Undangan Rapat Paripurna dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, perihal Undangan Rapat (rangkaian hari kedua, Senin s.d. Selasa, 10 s.d. 11 Agustus 2026)
Lokasi Kegiatan	Ruang Sidang DPR Papua Selatan, Salor, Distrik Kurik, Merauke
Misi/Keterangan	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menghadiri dan mengikuti kelanjutan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dan Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Sekretaris Daerah, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, unsur Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPR Papua Selatan beserta fraksi-fraksi, para Staf Ahli dan Asisten Gubernur, Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan, serta pimpinan Perangkat Daerah/OPD lingkup Provinsi Papua Selatan sesuai daftar undangan Nomor 005/297/DPR-PS/VIII/2026.
Tujuan Pelaksanaan	Mengikuti agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Papua Selatan serta Jawaban Gubernur Papua Selatan atas pandangan umum tersebut, sebagai kelanjutan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Komisi Hukum Ad Hoc.
Hasil/Output Kegiatan	Skors Rapat Paripurna dicabut oleh Ketua DPR Papua Selatan, dan sidang dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR Papua Selatan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc. Pemandangan umum disampaikan secara berurutan oleh juru bicara masing-masing fraksi, yaitu: Fraksi PDI Perjuangan (Paskalis Letsoin), Fraksi NasDem (Simon Salle), Fraksi Gerindra (gabungan Partai Gerindra dan PKB), Fraksi Golkar, Fraksi Keadilan dan Persatuan (gabungan PKS dan PPP), Fraksi Transformasi Papua Sejahtera, dan Utusan Khusus Afirmasi. Secara umum, mayoritas fraksi menyampaikan apresiasi

	kepada Gubernur Papua Selatan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain apresiasi, beberapa fraksi turut menyampaikan catatan dan sorotan, di antaranya terkait pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta penanganan stunting yang dinilai masih berjalan lambat, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Setelah rehat makan siang, sidang dilanjutkan pukul 14.00 WIT dengan agenda Jawaban Gubernur Papua Selatan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, sebagai tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap pandangan, saran, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi. Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan (Jaswadi, S.Pd., M.Pd. dan Pokja Produktif Marthinus Kendom, SP., MP.) hadir dan mengikuti keseluruhan rangkaian sidang hari kedua.
Rekomendasi & RTL	Mendokumentasikan poin-poin pandangan umum fraksi dan jawaban Gubernur sebagai bahan referensi BP3OKP Papua Selatan dalam mendukung tindak lanjut kebijakan daerah. Mencermati tindak lanjut catatan fraksi terkait pengelolaan SiLPA dan percepatan penanganan stunting, khususnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Pokja Papua Cerdas. Melaporkan hasil Rapat Paripurna hari pertama dan kedua secara menyeluruh kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.
Dokumentasi Kegiatan	Suasana sidang lanjutan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan hari kedua di Ruang Sidang DPR Papua Selatan, Salor, Merauke; Asisten 1 mewakili Gubernur pada Rapat Paripurna hari kedua; perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan mengikuti jalannya sidang bersama Asisten 1 Setda Papsel.

Dokumentasi/Link Dokumen
:



Suasana sidang lanjutan Rapat Paripurna DPR Papua Selatan hari kedua di Ruang Sidang DPR Papua Selatan, Salor, Merauke.



Asisten 1 Mewakili Gubernur pada Rapat

	Paripurna hari kedua.
 *Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan mengikuti jalannya sidang dari ruang peserta.*	 *Suasana ruang sidang dengan layar agenda Rapat Paripurna, Salor, 11 Agustus 2026.*
 *Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan bersama Asisten 1 Setda Papsel di Kantor DPR Papua Selatan.*	 *Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan di lokasi Rapat Paripurna, Salor, 11 Agustus 2026.*

KEGIATAN 5

Judul Kegiatan	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Jumat, 14 Agustus 2026 Pukul : 13.00 WIT – Selesai
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Undangan Gubernur Papua Selatan perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Surat Tugas Nomor: - , Tanggal 14 Agustus 2026
Lokasi Kegiatan	Aula Utama Lantai 1, Kantor Gubernur Papua Selatan
Misi/Keterangan	Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menghadiri dan mengikuti kegiatan pelantikan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	Gubernur Papua Selatan (Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT), Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan (Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Sc.), para pejabat yang dilantik, serta undangan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan	Mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Hasil/Output Kegiatan	Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung khidmat, dengan susunan acara: Pembukaan, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Doa, Pembacaan Keputusan Gubernur, Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji, Sambutan Gubernur Papua Selatan, Menyanyikan Lagu Tanah Papua, dan Penutup. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik pada jabatan baru, di antaranya: (a) Soleman Yamburmias, S.Pd., M.Kes — dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan; (b) Bonifasius Bupits, S.Sos., M.Si — menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Selatan; (c) Florentina Kakare, S.Sos — menjadi Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan; (d) Dr. Paskalis Prayitno, AP., M.Si — menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan; (e) Edy Purwanto, S.Sos — menjadi Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan; (f) Dr. Aloysius Pasauran, SH., MH — menjadi Kepala

	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Selatan menyampaikan pesan dan arahan kepada pejabat yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Perwakilan Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan (Jaswadi, S.Pd., M.Pd.) hadir dan mengikuti keseluruhan rangkaian acara pelantikan.
Rekomendasi & RTL	Mencatat pejabat yang baru dilantik sebagai mitra kerja Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Selatan, khususnya Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Menindaklanjuti koordinasi dengan pejabat terkait dalam mendukung program percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.
Dokumentasi Kegiatan	Prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Utama Kantor Gubernur Papua Selatan; sesi ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik; foto bersama pejabat yang dilantik dan tamu undangan.

Dokumentasi/Link Dokumen



Prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Utama Kantor Gubernur Papua Selatan.



Sesi ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik seusai acara.



Foto bersama pejabat yang dilantik dan tamu undangan di Aula Utama Kantor Gubernur Papua Selatan.



Profil pejabat yang dilantik: Soleman Yamburmias, S.Pd., M.Kes.

 *Profil pejabat yang dilantik: Bonifasius Bupits, S.Sos., M.Si.*	 *Profil pejabat yang dilantik: Florentina Kakare, S.Sos.*
 *Profil pejabat yang dilantik: Dr. Paskalis Prayitno, AP., M.Si.*	 *Profil pejabat yang dilantik: Edy Purwanto, S.Sos.*
 *Profil pejabat yang dilantik: Dr. Aloysius Pasauran, SH., MH.*	

KEGIATAN 6a

Judul Kegiatan	Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 Provinsi Papua Selatan
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Senin, 17 Agustus 2026 Pukul : 07.30 WIT - 16.00 WIT
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Undangan Gubernur Papua Selatan perihal Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
Lokasi Kegiatan	Stadion Katalpal, Merauke, Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	Kepala BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menghadiri dan mengikuti Upacara Pengibaran serta Penurunan Bendera Merah Putih mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	Kepala BP3OKP beserta Jaswadi, S.Pd. dan Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, unsur Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pimpinan Tinggi Pratama, TNI/POLRI, Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan beserta jajaran Pokja, serta pimpinan Perangkat Daerah/OPD dan tamu undangan lingkup Provinsi Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan	Mengikuti rangkaian Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, sebagai wujud partisipasi dan kehadiran BP3OKP Papua Selatan dalam kegiatan kenegaraan.
Hasil/Output Kegiatan	Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan secara khidmat pada pukul 07.30 WIT di Stadion Katalpal, Merauke, diikuti oleh unsur Forkopimda, Pimpinan Tinggi Pratama, TNI/POLRI, serta seluruh tamu undangan. Kepala BP3OKP beserta Pokja Papua Cerdas (Jaswadi, S.Pd. dan Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.) hadir dan mengikuti jalannya upacara dengan tertib. Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dilaksanakan pada pukul 16.00 WIT di lokasi yang sama, diikuti kembali oleh seluruh rombongan BP3OKP. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar dari awal hingga akhir acara.
Rekomendasi & RTL	Melanjutkan kehadiran pada rangkaian Malam Resepsi Kenegaraan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada malam harinya.

	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan dokumentasi dan tindak lanjut.
Dokumentasi Kegiatan	Foto bersama di panggung kehormatan latar backdrop HUT Ke-81 RI; peserta mengikuti jalannya Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Stadion Katalpal, Merauke; foto bersama tamu undangan usai pelaksanaan upacara.



Foto bersama di panggung kehormatan latar backdrop HUT Ke-81 RI.



Peserta mengikuti jalannya Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Stadion Katalpal, Merauke.



bersama tamu undangan mengikuti jalannya upacara.



pada area tangga panggung kehormatan upacara.



Foto bersama tamu undangan usai pelaksanaan upacara.

KEGIATAN 6b

Judul Kegiatan	Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 Provinsi Papua Selatan
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Senin, 17 Agustus 2026 Pukul : 19.00 WIT - Selesai
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Undangan Gubernur Papua Selatan perihal Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
Lokasi Kegiatan	Ballroom Swissbel Hotel, Merauke, Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	Kepala BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menghadiri Malam Resepsi Kenegaraan mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	Kepala BP3OKP beserta Jaswadi, S.Pd. dan Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	Gubernur Papua Selatan, unsur Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan beserta jajaran Pokja, serta tamu undangan VVIP lingkup Provinsi Papua Selatan.
Tujuan Pelaksanaan	Menghadiri Malam Resepsi Kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, sebagai bentuk partisipasi BP3OKP dalam kegiatan kenegaraan sekaligus mempererat silaturahmi dengan unsur pimpinan daerah.
Hasil/Output Kegiatan	Malam Resepsi Kenegaraan berlangsung di Ballroom Swissbel Hotel, Merauke, dihadiri oleh Gubernur Papua Selatan, unsur Forkopimda, Pimpinan Tinggi Pratama, serta tamu undangan VVIP. Kepala BP3OKP beserta Pokja Papua Cerdas (Jaswadi, S.Pd., M.Pd.) turut hadir dan mengikuti rangkaian acara resepsi. Rombongan BP3OKP turut berfoto bersama pasukan pengibar bendera serta unsur pimpinan daerah sebagai bentuk dokumentasi kegiatan. Kegiatan berlangsung khidmat, tertib, dan lancar hingga selesai.
Rekomendasi & RTL	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan dokumentasi dan tindak lanjut. Menindaklanjuti hasil silaturahmi dan koordinasi dengan unsur pimpinan daerah untuk mendukung program kerja BP3OKP selanjutnya.

Dokumentasi Kegiatan	Suasana Malam Resepsi Kenegaraan di Ballroom Swissbel Hotel, Merauke; foto bersama pasukan pengibar bendera pada Malam Resepsi Kenegaraan; Kepala Dinas Pendidikan Papua Selatan bersama Pokja Papua Cerdas pada Malam Resepsi Kenegaraan.

Dokumentasi/Link Dokumen



Suasana Malam Resepsi Kenegaraan di Ballroom Swissbel Hotel, Merauke.



foto bersama pasukan pengibar bendera pada Malam Resepsi Kenegaraan.



Pokja Cerdas bersama pasukan pengibar bendera.



Kadisdik Papsel bersama Pokja Papua Cerdas pada Malam Resepsi Kenegaraan.

KEGIATAN 7

Judul Kegiatan	Kuliah Tamu Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus dengan tema "Ketimpangan dan Transformasi Ekonomi antar Wilayah di Indonesia"
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Rabu, 19 Agustus 2026 Pukul : 13.00 WIT - 17.00 WIT
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Undangan Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus Nomor 673/DST/UN52.2/TU.02.02/2026 tanggal 13 Agustus 2026, perihal Undangan Kuliah Tamu Surat Tugas Nomor: - , Tanggal 19 Agustus 2026
Lokasi Kegiatan	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Musamus, Merauke
Misi/Keterangan	Kepala BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menghadiri dan mengikuti Kuliah Tamu dari BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	Yoseph Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC (Kepala BP3OKP Papua Selatan) beserta Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. dan Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas, BP3OKP Provinsi Papua Selatan)
Peserta Kegiatan	Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus, narasumber Dr. Fajri Muharja, S.E., M.Si., Koordinator APSEPI Wilayah Maluku & Papua Romualdus Turu Putra Maro Djanggo, M.Si., Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan beserta Pokja Papua Cerdas, unsur Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, pimpinan perbankan, STIE Yapis Merauke, alumni Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unmus, dosen, serta mahasiswa Universitas Musamus.
Tujuan Pelaksanaan	Menghadiri dan mengikuti Kuliah Tamu dengan tema "Ketimpangan dan Transformasi Ekonomi antar Wilayah di Indonesia", sebagai bagian dari tugas Pokja Papua Cerdas mewakili BP3OKP Papua Selatan dalam mendukung pengembangan wawasan ekonomi pembangunan wilayah Papua Selatan.
Hasil/Output Kegiatan	Kegiatan Kuliah Tamu dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Romualdus T.P.M Djanggo, M.Si., diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unmus. Pemaparan materi disampaikan oleh narasumber Dr. Fajri Muharja, S.E., M.Si. (Ketua APSEPI) dengan dipandu oleh moderator Dr. Elly Noer, S.E., M.M., membahas kesenjangan dan transformasi ekonomi antarwilayah di Indonesia serta tantangan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia termasuk Papua Selatan.

	Kepala BP3OKP, Yoseph Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC, turut memberikan motivasi kepada seluruh peserta, khususnya para mahasiswa, tentang pentingnya memiliki impian dan cita-cita dengan berlandaskan pada tiga modal utama, yaitu agama, attitude (sikap), dan budi pekerti. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif yang berlangsung hangat, dengan antusiasme tinggi dari peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, serta undangan dari instansi pemerintah dan perbankan. Kepala BP3OKP beserta Pokja Papua Cerdas (Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. dan Jaswadi, S.Pd., M.Pd.) hadir dan turut aktif mengikuti jalannya kuliah tamu dari awal hingga akhir. Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan dan plakat kepada narasumber, serta sesi foto bersama seluruh peserta dan undangan.
Rekomendasi & RTL	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan dokumentasi dan tindak lanjut. Menjadikan materi kuliah tamu mengenai ketimpangan dan transformasi ekonomi antarwilayah sebagai bahan masukan dalam mendukung perumusan kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Selatan. Menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Universitas Musamus serta APSEPI dalam kegiatan akademik dan pengembangan ekonomi daerah selanjutnya.

Dokumentasi Kegiatan	Foto bersama Kepala BP3OKP, Pokja Papua Cerdas, dan seluruh peserta Kuliah Tamu di Gedung PKM Universitas Musamus; Kepala BP3OKP memberikan motivasi dan solusi nyata kepada mahasiswa dalam sesi diskusi interaktif; foto bersama panitia usai kegiatan Kuliah Tamu.

Dokumentasi Kegiatan



Foto bersama Kepala BP3OKP, Pokja Papua Cerdas, dan seluruh peserta Kuliah Tamu di Gedung PKM Universitas Musamus.



Suasana Ruangan Kuliah Tamu "Ketimpangan dan Transformasi Ekonomi antar Wilayah di Indonesia".



Kepala BP3OKP memberikan motivasi dan solusi nyata kepada mahasiswa dalam sesi diskusi interaktif.



Kepala BP3OKP dan Pokja Papua Cerdas mengikuti jalannya kuliah tamu.



Suasana sesi tanya jawab dan diskusi interaktif bersama peserta.



Foto bersama Kepala BP3OKP, Pokja Papua Cerdas, dan panitia usai kegiatan Kuliah Tamu.

KEGIATAN 8

Judul Kegiatan	Sesi Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 — Desk Provinsi Papua Selatan, meliputi Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Kamis, 20 Agustus 2026 Pukul : 08.00 WIT s.d. 20.30 WIT
Dasar Pelaksanaan	Undangan/Surat: Surat Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-18232/D.02/PP.03.03/08/2026 tanggal 13 Agustus 2026, perihal Undangan Tim Asistensi Sesi Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 Surat Tugas Nomor: - , Tanggal 20 Agustus 2026
Lokasi Kegiatan	Kantor Bupati Merauke (Breakout Room 6), dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting (Meeting ID: 830 8362 5395)
Misi/Keterangan	Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan selaku Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Selatan/Tim Asistensi, beserta Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, dan Pokja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menghadiri dan mendampingi jalannya Sesi Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026, selaku Tim Asistensi/Anggota Badan Pengarah Papua yang mewakili Provinsi Papua Selatan, dalam rangka memastikan keselarasan usulan Musrenbang Otsus 2026 dengan RAPPP 2025–2029
Pelaksana Kegiatan	Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC (Kepala BP3OKP); Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. dan Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas); dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M. dan Ratmika Pasorong (Pokja Papua Sehat); Marthinus Kendom, S.P., M.P. (Pokja Papua Produktif)
Peserta Kegiatan	Tim Asistensi Pusat: Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah serta Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; serta unsur Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat sesuai jadwal desk masing-masing.
Tujuan Pelaksanaan	Mengklarifikasi hasil evaluasi keselarasan usulan Musrenbang Otsus Tahun 2026 dengan RAPPP 2025–2029 (rata-rata nasional 57,49%), membantu Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dan kabupaten dampingannya memperbaiki usulan yang direkomendasikan namun belum selaras, serta menyepakati hasil perbaikan dan rencana tindak lanjutnya

	melalui Berita Acara Kesepakatan.
Hasil/Output Kegiatan	Kegiatan diawali dengan registrasi, sambutan Pemerintah Daerah, arahan pengantar oleh Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, serta penyampaian hasil review oleh Ketua Tim Asistensi. Pembahasan dilaksanakan berjenjang per desk dengan alokasi waktu ± 90 menit per Provinsi/Kabupaten, dimulai dari Desk Provinsi Papua Selatan (09.00–10.30 WIT), dilanjutkan Desk Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Berdasarkan rekapitulasi Bappenas per 18 Agustus 2026: Provinsi Papua Selatan 380 subkegiatan dengan 210 usulan (55,26%) belum selaras; Kabupaten Merauke 112 usulan dengan 33 usulan (30,28%) belum selaras; Kabupaten Boven Digoel 137 usulan dengan 49 usulan (44,55%) belum selaras; Kabupaten Mappi 105 usulan dengan 16 usulan (21,05%) belum selaras; dan Kabupaten Asmat 283 usulan dengan 50 usulan (34,01%) belum selaras. Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Selatan telah mengunci Berita Acara Musrenbang Otsus pada SIPPP sehingga pembahasan dapat dilaksanakan. Tim BP3OKP Provinsi Papua Selatan hadir dan aktif mendampingi jalannya pembahasan pada seluruh sesi desk yang menjadi tanggung jawab Provinsi Papua Selatan. Setiap sesi diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan atas hasil perbaikan usulan yang telah dibahas bersama Pemerintah Daerah dan Tim Asistensi.
Rekomendasi & RTL	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan dokumentasi dan tindak lanjut. Mengawal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan agar usulan yang telah diperbaiki dituangkan secara konsisten hingga tahap RAP Awal Tahun 2027. Memperkuat koordinasi antara BP3OKP, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan keselarasan penuh (100%) program dan kegiatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus dengan RAPPP 2025–2029, serta dampaknya secara langsung kepada Orang Asli Papua (OAP).

Dokumentasi Kegiatan	Foto bersama Tim Asistensi, unsur Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dan Tim BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada pembukaan kegiatan; suasana pembahasan Desk Kabupaten/Kota bersama Tim Asistensi dan Pemerintah Daerah; Tim BP3OKP Provinsi Papua Selatan mengikuti jalannya pembahasan dari awal hingga akhir.

Dokumentasi Kegiatan		
 *Foto bersama Tim Asistensi, unsur Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dan Tim BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada pembukaan kegiatan.*	 *Foto bersama Bupati Boven peserta pada Sesi Desk Provinsi Papua Selatan.*	 *Suasana ruang pertemuan saat pembahasan perbaikan usulan berlangsung.*
 *Peserta mengikuti penyampaian arahan narasumber secara daring melalui tayangan layar.*	 *Suasana pembahasan Desk Kabupaten/Kota bersama Tim Asistensi dan Pemerintah Daerah.*	 *Tim BP3OKP Provinsi Papua Selatan mengikuti jalannya pembahasan dari awal hingga akhir.*
 *Tim Pokja BP3OKP mendokumentasikan poin-poin hasil pembahasan.*	 *Suasana ruang pertemuan pada sesi pembahasan lanjutan.*	 *Suasana keseluruhan ruang rapat saat sesi pembahasan berlangsung.*

KEGIATAN 9

Judul Kegiatan	Pertemuan Koordinasi antara BP3OKP Provinsi Papua Selatan dengan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke
Waktu Pelaksanaan	Hari/Tgl : Rabu, 26 Agustus 2026 Pukul : 10.00 WIT - Selesai
Dasar Pelaksanaan	Insidentil: Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Papua Nomor PE.09.02/ST-712/PW26/3.1/2026 tanggal 3 Agustus 2026 dan Surat Nomor PE.09.02/S-711/PW26/3.1/2026 tanggal 3 Agustus 2026 hal Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke
Lokasi Kegiatan	Ruang Rapat BP3OKP Papua Selatan, Jl. Prajurit No. 1, Merauke
Misi/Keterangan	Seluruh Pokja BP3OKP Provinsi Papua Selatan (Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, dan Pokja Papua Produktif) beserta Kepala BP3OKP Papua Selatan
Tugas dan Fungsi	Menerima kunjungan dan mengikuti pertemuan koordinasi dengan Tim BPKP Perwakilan Provinsi Papua terkait pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 di Kabupaten Merauke, mewakili BP3OKP Papua Selatan
Pelaksana Kegiatan	Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC (Kepala BP3OKP); Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. dan Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas); dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M. dan Ratmika Pasorong (Pokja Papua Sehat); Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Produktif)
Peserta Kegiatan	Pihak BP3OKP Papua Selatan: Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC (Kepala BP3OKP); Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng. (Pokja Papua Cerdas); Jaswadi, S.Pd., M.Pd. (Pokja Papua Cerdas); dr. Ira Nova Olyvia Jowangkay, M.K.M. (Pokja Papua Sehat); Ratmika Pasorong (Pokja Papua Sehat); Marthinus Kendom, SP., MP. (Pokja Papua Produktif). Pihak Tim BPKP Perwakilan Provinsi Papua (Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-712/PW26/3.1/2026): Hendro Wibowo (Penanggung Jawab); Dian Hidayati (Pengendali Teknis); Adhi Satriyanto, Fajar Kurniawan, Abimelek Gobai, Muhammad Lukman A (Anggota Tim).
Tujuan Pelaksanaan	Membahas pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke, serta membangun koordinasi dan kolaborasi antara BP3OKP dan BPKP sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pengawasan pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
Hasil/Output Kegiatan	Pertemuan dibuka dan dihadiri oleh seluruh Pokja BP3OKP Papua Selatan beserta Kepala BP3OKP Papua Selatan, serta Tim BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

	Tim BPKP menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, yaitu melaksanakan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke sesuai Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-712/PW26/3.1/2026. Berlangsung diskusi yang aktif antara BP3OKP dan BPKP, dengan berbagai saran dan pendapat dari kedua belah pihak terkait pengawasan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Masing-masing Pokja BP3OKP menyampaikan informasi perkembangan program dan kegiatan di bidang tugasnya (Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif) yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Otsus. Kedua belah pihak menyepakati bahwa BP3OKP dan BPKP akan berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
Rekomendasi & RTL	BP3OKP dan BPKP akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam pengawasan Dana Otonomi Khusus. Pokja BP3OKP agar menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan oleh Tim BPKP dalam pelaksanaan program di bidang masing-masing. Melaporkan hasil pertemuan kepada pimpinan BP3OKP Provinsi Papua Selatan sebagai bahan tindak lanjut.
Dokumentasi Kegiatan	Pertemuan koordinasi BP3OKP Papua Selatan dengan Tim BPKP di ruang rapat BP3OKP; diskusi antara Pokja BP3OKP dan Tim BPKP terkait Evaluasi Dana Otsus; Kepala BP3OKP dan Pokja bersama Tim BPKP dalam pertemuan koordinasi.



Pertemuan koordinasi BP3OKP Papua Selatan dengan Tim BPKP di ruang rapat BP3OKP.



Diskusi antara Pokja BP3OKP dan Tim BPKP terkait Evaluasi Dana Otsus.

	
Suasana pertemuan koordinasi BP3OKP dan BPKP.	*Kepala BP3OKP dan Pokja bersama Tim BPKP dalam pertemuan koordinasi.*

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Triwulan III bulan Agustus Tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan berhasil memperkuat komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BP3OKP, Bappenas, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 secara terintegrasi.
2. Tercapai kesepahaman bahwa keberhasilan percepatan pembangunan Papua sangat bergantung pada sinkronisasi dokumen perencanaan, mulai dari RAPPP, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD hingga Musrenbang Otonomi Khusus, agar program pusat dan daerah memiliki arah kebijakan yang selaras.
3. Penguatan tata kelola Otonomi Khusus Papua memerlukan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, berbasis data, serta didukung integrasi SIP3, SIPD, dan SIAKD sebagai instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan pembangunan.
4. Percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II TA 2026 di Provinsi Papua Selatan masih tertinggal dari target nasional, dengan baru satu dari lima kabupaten (Asmat) yang telah menyalurkan, sehingga memerlukan pendampingan intensif terhadap penyusunan syarat salur, RAP perubahan/RAB, serta pemetaan SILPA/SILVA.
5. Pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan keuangan daerah berjalan baik, ditandai dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, meskipun masih terdapat catatan strategis dari fraksi DPR Papua Selatan terkait pengelolaan SiLPA dan percepatan penanganan stunting yang perlu ditindaklanjuti.
6. Hasil evaluasi keselarasan usulan Musrenbang Otsus Tahun 2026 dengan RAPPP 2025–2029 pada Desk Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten dampingan (Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat) menunjukkan tingkat ketidakselarasan yang bervariasi antara 21,05% hingga 55,26%, sehingga masih diperlukan perbaikan lebih lanjut agar seluruh program yang dibiayai Dana Otsus benar-benar selaras dengan arah kebijakan RAPPP dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP).
7. Kolaborasi pengawasan antara BP3OKP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan secara keseluruhan.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran strategis untuk ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan:

1. BP3OKP perlu memperkuat pelaksanaan SHEK secara berkala untuk memastikan sinkronisasi kebijakan, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi RAPPP di seluruh wilayah Papua Selatan.
2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar segera mengintegrasikan seluruh prioritas RAPPP ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Musrenbang Otonomi Khusus, sehingga perencanaan pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional.
3. Pemerintah Kabupaten se-Papua Selatan perlu meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyempurnaan data pembangunan, penyelesaian dokumen teknis proyek, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dari tingkat kampung hingga kabupaten.
4. Pemerintah Daerah yang belum menyalurkan Dana Otsus/DTI Tahap II TA 2026 perlu segera melengkapi dokumen persyaratan salur, menyusun RAP perubahan/RAB, serta menerapkan tagging rekening khusus Otsus/DTI agar penyaluran dan pemanfaatan dana dapat dipercepat dan diaudit secara jelas.
5. Pemerintah Provinsi dan DPR Papua Selatan agar menindaklanjuti secara konkret catatan dan rekomendasi fraksi terkait pengelolaan SiLPA serta percepatan penanganan stunting, dengan target dan jadwal penyelesaian yang terukur.
6. BP3OKP bersama Bappenas dan Pemerintah Daerah dampingan agar mengawal secara berkelanjutan tindak lanjut Berita Acara Kesepakatan hasil pendampingan Musrenbang Otsus hingga tahap RAP Awal Tahun 2027, guna mencapai keselarasan penuh (100%) antara usulan daerah dengan RAPPP 2025–2029.
7. BP3OKP, BPKP, dan instansi pengawasan terkait agar terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, termasuk melalui evaluasi triwulanan yang berkelanjutan, guna memastikan akuntabilitas dan dampak nyata Dana Otsus bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

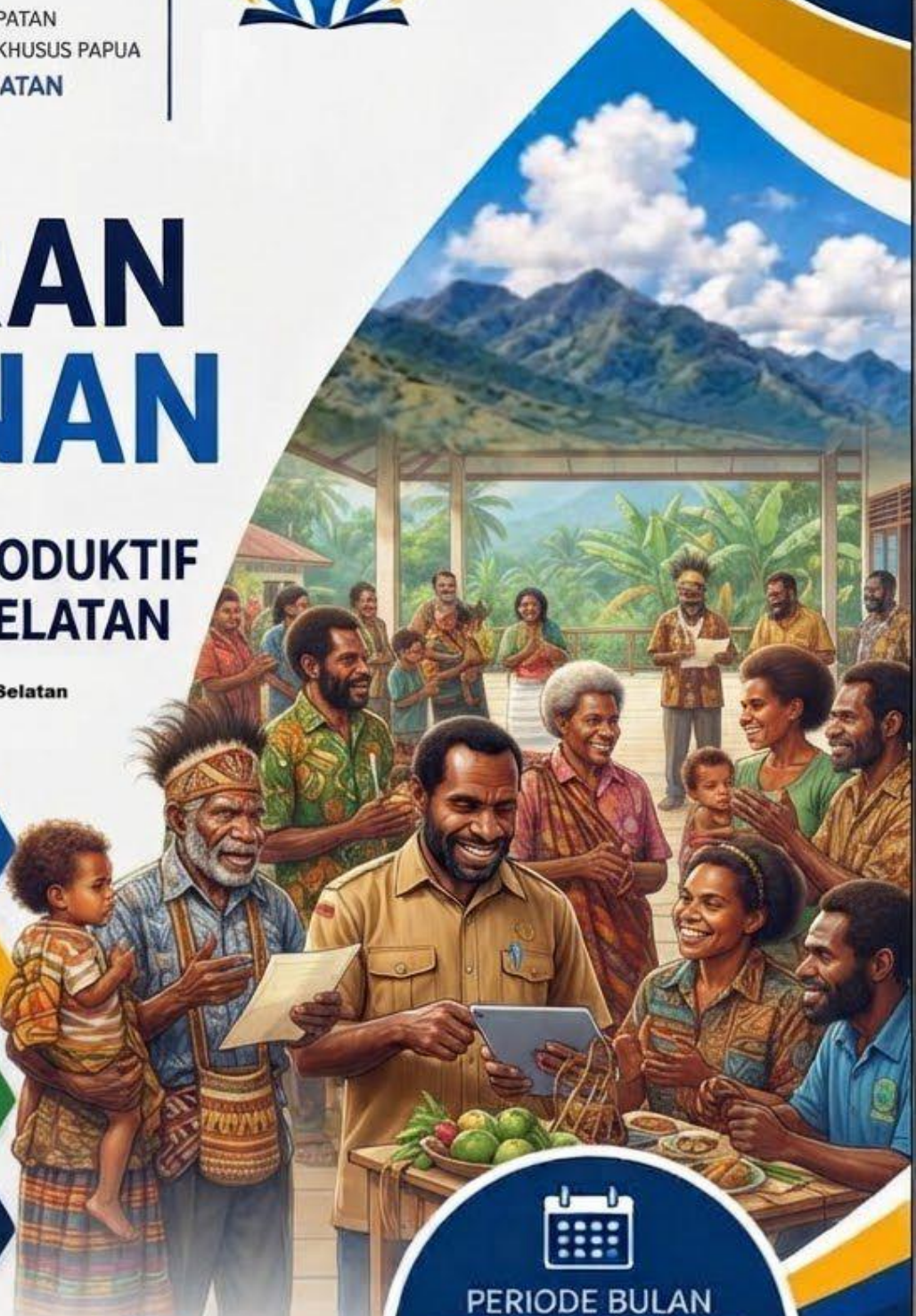
BP3OKP

BADAN PENGARAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
PROVINSI PAPUA SELATAN

LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA PRODUKTIF
BP3OKP PAPUA SELATAN

Bersinergi Membangun Provinsi Papua Selatan yang Produktif



KOLABORASI
Bersama membangon Papua Selatan

AKSELERASI
Mempercepat inovasi dan pelayanan

INOVASI
Melahirkan gagasan dan solusi baru

BERDAMPAK
Memberi manfaat nyata untuk masyarakat

PERIODE BULAN
AGUSTUS
2026

Sekrstariat BP3OKP
Provinsi Papua Selatan
Merauke

www.bp3okp.papuselatan.go.id

#PapuaP

Papua Sela

L E M B A R P E N G E S A H A N

LAPORAN HASIL KEGIATAN
POKJA PAPUA CERDAS BP3OKP PROVINSI PAPUA SELATAN
BULAN AGUSTUS 2026

PROGRAM PERCEPATAN MISI PAPUA PRODUKTIF

BADAN PENGARAH PAPUA

Laporan ini telah diperiksa, dievaluasi, dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan bulanan Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Selatan.

Merauke, 01 September 2026
Penyusun,
Anggota Pokja Papua Produktif
BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Marthinus Kendom

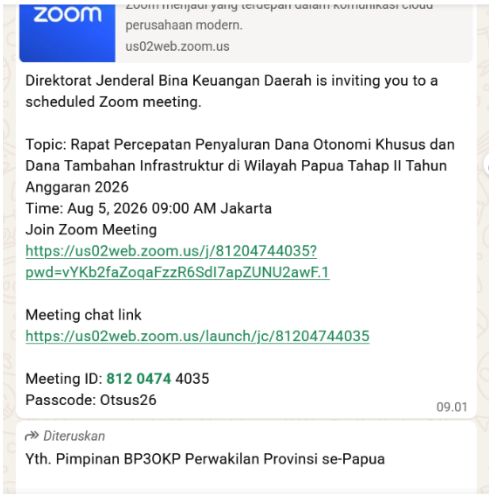
Mengetahui / Menyetujui
Kepala BP3OKP Papua Selatan

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA • OTONOMI KHUSUS
SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Y. Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC
NIP. 999920240117145257

LAPORAN KEGIATAN

KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF

Kegiatan Ke-1 : **Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan Dana DTI Tahap II**	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	**Hari/Tgl : Rabu, 5 Agustus 2026, Pukul 11.00 WIT – selesai**
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
☒ Surat Tugas/Sumber Kegiatan:	
☐ Insidentil : Undangan Rapat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah via zoom meeting	
Surat Tugas	
Undangan Rapat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah via zoom meeting  zoom perusahaan modern. us02web.zoom.us Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026 Time: Aug 5, 2026 09:00 AM Jakarta Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81204744035?pwd=vYKb2faZoqaFzzR6Sdl7apZUNU2awF.1 Meeting chat link https://us02web.zoom.us/launch/jc/81204744035 Meeting ID: 812 0474 4035 Passcode: Otsus26 09.01 Diteruskan Yth. Pimpinan BP3OKP Perwakilan Provinsi se-Papua	Perintah Anggota BP3OKP/Ketua BPP untuk mengikuti Rapat dimaksud
Lokasi Kegiatan	Rapat via Zoom di Ruangan BP3OKP Papua Selatan Jl. Prajurit No. 1 Merauke
Judul Kegiatan	Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026
Misi/Keterangan	Koordinasi antar kementerian dan lembaga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota di Papua terkait progres penyaluran dana otsus tahap II
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	Koordinasi oleh Wamendagri terkait pemenuhan syarat salur dana Otsus Papua Tahap II
Pelaksana Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Peserta Kegiatan/Sumber Dokumen	1. Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M – Wakil Metenri Dalam Negeri; 2. Dr.Velix Fernando Wanggai, S.IP., M.A.P – Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua; 3. Ardimansya, Kepala Subdirektorat yang menangani Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 4. Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI Papua 5. ElisaKambu, S.Sos Gubernur Papua Barat Daya; 6. Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd., M.Sc. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan 7. Pemerintah Provinsi Papua Barat 8. Pemerintah Provinsi PapuaTengah 9. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Evaluasi Progres ***Penyampaian Syarat*** salur dana Otsus Tahap II dan DTI Tahun 2026 Evaluasi Progres ***Penyaluran dana Otsus dan DTI*** Tahap II per 3 Agustus Tahun 2026

Hasil/output Kegiatan

I. Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M – Wakil Metenri Dalam Negeri

Memimpin Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur di Wilayah Papua Tahap II Tahun Anggaran 2026.

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.0.14.4/5162/SJ diterbitkan dalam rangka penyesuaian penggunaan alokasi dana otonomi dan dana tambahan infrastruktur TÂ. 2026 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   Kesatu, Melakukan penyesuaian alokasi dan penggunaan tambahan dana Otsus dan DTI Tahun Anggaran 2026;

   Kedua, Penyesuaian penggunaan dana Otsus dan DTI TA. 2026 diarahkan untuk:
   a. Pendanaan Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur layanan public; dan/atau
   b. Kebutuhan dan prioritas daerah berupa Pembangunan infrastruktur yang mendukung Pembangunan pusat pemerintahan dan/atau sarana pendukung pemerintahan bagi daerah otonom baru;

   Ketiga, Menyesuaikan alokasi dan penggunaan dana Otsus dan DTI TA. 2026 sebagai berikut:
   a. Menyusun RAP penggunaan penerimaan dalam rangka Otsus perubahan;
   b. Melakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA. 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRP atau DPRK; dan,
   c. Apabula tidak melakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan percepatan peribahan APBD TA. 2026.

   Keempat, Menginstruksikan APIP Daerah untuk:
   1. Melakukan reviu atas LaporanKinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Tambahan Alokasi dana Otsus dan DTI TA.2026 sebelum dokumen tersebut disampaikan sebagai syarat penyaluran; dan
   2. Melakukan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan guna memastikan kesesuaian target capaian keluaran, serta mengambil Langkah-langkah tata kelpla yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Kelima, menyusus dan menyampaikan laporan pelaksanaan atas penggunaan tambahan alokasi kedalam laporan tahunan.

2. Progres Penyampaian syarat salur tahap II dan Penyaluran Dana Otsus Tahap II Tahun 2026:



Sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 untuk dana Otsus 1% sudah disalurkankepada 7 Kabupaten; Dana Otsus 1,25% kepada 6 Kabupaten dan DTI kepada 3 Kabupaten;

Bahwa di Provinsi Papua Selatan sampai dengan tanggal 3 Agustus terdapat Kabupaten Asmat yang sudah tersalur dana Otsus Tahap II.

3. Apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya karena langsung menghadiri Rapat dimaksud ini; tetapi kepada Gubernur Papua Barat karena sering tidak hadir dengan alasan yang kurang tepat, maka diperintahkan kepada Gubernur Papua Barat segera menghapat Wamendagri.

II. Ketua KEPP menyampaikan:

1. Satu rencana untuk menyepakati satu data perencanaan sesudah tahun 2029;
2. Kwality Spending: kwalitas belanja dana DTI untuk pembangunan jalan koridor dan sanitasi;
3. Dana DTI untuk ruas-ruas jalan tertentu dan koneksifitas antar wilayah;
4. Terkait penguatan tentang:
   a. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029. Aturan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
      Pokok Pengaturan Perpres 107 Tahun 2025adalah:
      - ✓ Menjadi dokumen acuan strategis operasional 5 tahunan untuk wilayah Papua.
      - ✓ Merupakan turunan langsung dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.
      - ✓ Memuat program prioritas guna mendukung percepatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas di tanah Papua.
      - ✓ Diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
   b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua adalah aturan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 9 Oktober 2025. Aturan ini memberikan keberpihakan dan ruang khusus bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui skema pengadaan yang afirmatif.

III. Ardimansya, Kepala Subdirektorat Dana Otonomi Khusus (Otsus)

1. Pada Tanggal 3 Agustus sudah bertambah 1 Kabupaten, yakni Kabupaten Asmat di Papua Selatan yang menerima penyaluran dana otsus tahap II;
2. Sampai dengan tanggal 3 Agustur terdapat 9 kabupaten/kota yang sudah tersalur dana

otsus tahap II dan 39 kabupaten kota dan provinsi yang belum.



Monitoring Penyaluran Tahap II TA 2025 dan TA 2026

No	Jenis Dana	TA. 2025							TA. 2026
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Pemda	Juli
1	Otsus BG (1%)	0	1	27	15	3	2	48	8
2	Otsus SG (1,25%)	0	1	26	17	4		48	8
3	DTI	0	1	22	15	6	4	48	4
Total		0	3	75	47	13	6		20

Pemda sudah salur Tahap II TA 2026:

A. Prov. Papua Pegunungan (1 / 9)
1) Kab. Yahukimo (salur: 16 Juli 2026)

B. Prov. Papua (2 / 10)
1) Kab. Jayapura (salur: 29 Juli 2026)
2) Kab. Biak Numfor (salur: 29 Juli 2026)

C. Prov. Papua Barat Daya (1 / 7)
1) Kab. Raja Ampat (salur: 29 Juli 2026)

D. Prov. Papua Tengah (4 / 9)
1) Kab. Puncak (salur: 29 Juli 2026)
2) Kab. Dogiyai (salur: 29 Juli 2026)
3) Kab. Paniai (salur: 29 Juli 2026)
4) Kab. Intan Jaya (salur: 30 Juli 2026)

E. Prov. Papua Selatan (1 / 5)
1) Kab. Asmat (salur: 3 Agustus 2026)

F. Prov. Papua Barat (0 / 8)

Sudah salur: 9 Pemda
Belum Salur: 39 Pemda

Bahwa di Provinsi Papua Selatan sampai dengan tanggal 3 Agustus terdapat Kabupaten Asmat yang sudah tersalur dana Otsus Tahap II.

3. Interoperabilitas

Untuk memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas berkolaborasi mengintegrasikan tiga sistem informasi; SIPPP, SIKD-Otsus, dan SIPD. Integrasi ini telah menyederhanakan alur kerja pemerintah daerah, mengurangi duplikasi input data, dan memastikan perencanaan serta penyaluran Dana Otsus lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Dengan adanya interoperabilitas, maka:

1. Realisasi Penyaluran dana Otsus per tanggal 3 Agustus sebesar Rp. 6.839,38M (40,78% dari pagu alokasi;
2. Realisasi Penyaluran Dana Otsus secara *Y-o-Y* lebih tinggi (8,53%) karena adanya implementasi Interoperabilitas yang berdampak pada percepatan penetapan APBD dan Percepatan Penyaluran serta kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur semakin meningkat;
3. Terhadap Pemda di wilayah Papua yang belum memenuhi syarat salur Tahap II telah dilakukan Upaya percepatan penyaluran melalui *one on one meeting*, asistensi, dan koordinasi intensif dengan pemda terkait dengan penyusunan RAP Perubahan dan RAP SiLPA

IV. Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK RI Papua

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan mendorong reformasi tata kelola yang lebih transparan dan terintegrasi. Melalui kolaborasi bersama kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua Raya, KPK menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran Otsus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Telah ditandatangani komitmen bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua Raya bersama DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta kementerian/lembaga terkait untuk menyusun langkah bersama memperkuat tata kelola Dana Otsus dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. KPK berharap hendaknya cermat dalam perencanaan sampai dengan realisasi harus dibeda oleh APIP, khususnya dengan Reksus.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	1. Upaya percepatan penyaluran dana otsus tahap II melalui *one on one meeting*, asistensi, dan koordinasi intensif dengan pemda terkait dengan penyusunan RAP Perubahan dan RAP SiLPA; 2. Tagging SiLPA Efisiensi dan Non Efisiensi harus menggunakan data hasil Audit BPK RI dalam menyususn RAP SiLPA; 3. Salah satu dokumen yang masih belum lengkap dan benar sebagai syarat salur dana otsus tahap II adalah penyerapan anggaran di daerah masih dibawah 50% dari dana otsus tahap I dan capaian output masih dibawah 15%.

Dokumentasi	  Peserta dari BPP Papua Selatan   Peserta dari BPP Papua Wamendagri dan Ktua KEPP  Peserta secara Daring

Kegiatan Ke-2: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/Tgl : Senin – Selasa, 10 – 11 Agustus 2026, Pukul 10.00 WIT – selesai
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
☒ Surat Tugas/Sumber Kegiatan: Undangan Rapat Ketua DPRP Provinsi Papua Selatan Nomor: 005/297/DPR-PS/VIII/2026 Tanggal 6 Agustus 2026	
☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya	
Surat Tugas	
Lokasi Kegiatan	Ruang Rapat Utama DPR Papua Selatan Kawasan Pusat Pemerintah Papua Selatan KTM Salor - Distrik Kurik Merauke
Judul Kegiatan	Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dan Komisi Hukum AD HOC
Misi/Keterangan	Marthinus Kendom, SP., MP – Pokja Papua Produktif mengikuti Rapat Paripurna yang meliputi: Rapat Pleno I: 1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban APBD TA. 2025 oleh Gubernur kepada DPRP Papua Selatan untuk dibahas. 2. Pengajuan dan Pembicaraan Tingkat I Komisi Hukum AD HOC Penjelasan Pengusul: Anggota/pimpinan komisi memberikan penjelasan Raperda inisiatif dalam Rapat Paripurna untuk dibahas Eksekutif Rapat Pleno II: 1. Pandangan Umum Fraksi: DPRD memberikan tanggapan, kritik,

	dan masukan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. 2. Tanggapan Kepala Daerah: Gubernur menyampaikan pendapat atau tanggapan atas Raperda Komisi Hukum Ad Hoc usulan DPRP Papua Selatan Rapat Pleno III: 1. Jawaban Kepala Daerah: Tanggapan balik dari pihak eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi DPRP Papua Selatan. 2. Komisi Hukum Ad Hoc: Pemandangan umum atau jawaban fraksi-fraksi DPRP Papua Selatan terhadap pendapat Gubernur Papua Selatan. Rapat Pleno IV: 1. Pembahasan Pansus/Banggar: Rapat kerja mendalam antara badan anggaran dan eksekutif. 2. Pembahasan intensif materi Raperda dilakukan oleh Komisi Hukum Ad Hoc bersama dengan pejabat yang mewakili gubernur. **Persetujuan Bersama:** Seluruh Fraksi menyetujui raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua Selatan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna. **Pendapat Akhir Fraksi**: Fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap hasil pembahasan di tingkat komisi/pansus atas Raperda Komisi Hukum Ad Hoc dan memproses menjadi perda.
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	Melaksanakan Tusi Lain dengan menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPR Papua Selatan mewakili BP3OKP Papua Selatan sesuai Arahan Anggota BP3OKP/Kepala BPP Papua Selatan.
Pelaksana Kegiatan	Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan
Peserta Kegiatan/Sumber Dokumen	1. Gubernur Provinsi Papua Selatan 2. Ketua Dewan dan Wakil Ketua I, WakilKtua II, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan 3. Anggota DPRP Papua Selatan 4. Forkopinda Provinsi Papua Selatan (Pangdam XXIV Mandala Trikora, Dan Kodaeral XI Merauke, Dan Lanud J.A Dimara Merauke, LO. Polda Papua) 5. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan 6. Anggota BP3OKP Papua Selatan diwakili oleh Pokja Papua Cerdas dan Papua Produktuf 7. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan 8. Pimpinan Organisasi Vertikal Kementerian/Badan Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025 dan Rancangan Perda Komisi Hukum AD HOC Provinsi Papua Selatan 2. Menyaksikan Pembahasan Materi Sidang 3. Mengikuti Penyampaian Tanggapan Fraksi-Fraksi DPRP Papua Selatan 4. Mengikuti Pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRP Papua Selatan
Hasil/output Kegiatan	

Gubernur Provinsi Papua Selatan:

1. Menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rapat Paripurna serta menekankan pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah,
2. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Privinsi Papua Selatan untuk dibahas.
3. Mendorong percepatan pembahasan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc untuk mendukung penguatan tata kelola hukum di Provinsi Papua Selatan

Pandangan Umum Frkasi-Frkasi.

DPRP Papua Selatan terdiri atas 6 fraksi dan 1 Utusan Khusus antara lain:

1. Fraksi Partai Dekrasi Indonesia Perjuangan
2. Frkasi Keadilan dan Persatuan
3. Fraksi Nasdem
4. Fraksi Gerindra dan PKB
5. Frkasi Golkar
6. Fraksi Transformasi Papua Sejahtera
7. Utusan Khusus Afirmasi

Mayoritas fraksi di DPRP Papua Selatan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Selatan terkait:

1. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Merupakan bentuk Transparansi yang dianggap sebagai wujud nyata akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang bersih. Namun tetap berkomitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan memperkuat sistem pengendalian intern, menata administrasi dan pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program-program Pembangunan.
2. Berkat intervensi harga, Gerakan Pangan Murah, dan Panen raya oleh TPID, maka Papua Selatan sukses menstabilkan harga dan dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik I Pengendalian Inflasi Regional Papua 2026. **Penghargaan Nasional:** Atas keberhasilan tata kelola tersebut, Papua Selatan meraih penghargaan Provinsi Terbaik I Kategori Pengendalian Inflasi se-Regional Papua pada pertengahan 2026 berhadiah dana insentif Rp3 miliar.

Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban APBD TA. 2025, yang menjadi sorotan fraksi-fraksi meliputi:

1. Postur APBD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025:

Lampiran I: Peraturan Daerah
Nomor : 01 Tahun 2025
Tanggal: 30 Januari 2025

Pendapatan Daerah	
Pendapatan Asli Daerah	130.993.681.252,00
PendapatanTransfer	1.378.965.316.277,00
Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	20.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	1.529.958.997.529,00
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	1.243.138.117.467,96
Belanja Modal	337.477.754.757,33
Belanja Tidak Terduga	6.127.587.297,00
Belanja Transfer	137.389.542.120,71
Jumlah Belanja	1.724.133.001.643,00
Defisit	194.174.004.114

https://bppkad.papuaselatan.go.id/dokumen/ringkasan-apbd-tahun-anggaran-2025

2. Pendapat Fraksi-Fraksi:
   a) Perlu peningkatan kwalitas belanja APBD
   b) Pencapaian Pembangunan telah tercapai sesuai visi dan misi Gubernur;
   c) Pemeritan daerah perlu lebih serius untuk mengurangi kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi;
   d) Meningkatkan peran OPD penghasil PAD;
   e) PSN tetapdilanjutkan dengan memperhatikan prinsip menghargai hak Masyarakat adat;
   f) Kewenangan OPD terbatas sementara alokasi anggaran sesuai mandatori spending cukup besar menimbulkan SiLPA yang besar;
   g) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 283,99 M hendaknya dibelanjakan lebih serius dalam tahun anggaran 2026 dengan focus pada Upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting.
3. Jawaban Gubernur Papua Selatan yang sampaikan oleh Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesra atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, sebagai tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap pandangan, saran, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi.
4. Gubernur Papua Selatan menyetujui dan mendorong percepatan pembahasan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc untuk mendukung penguatan tata kelola hukum di Provinsi Papua Selatan
5. Kesimpulan Frkasi-Fraksi :

   Menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2026.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi oleh DPRP adalah Menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Memerintah Provinsi Papua Selatan untuk ditetapkan menjadi Perda; Kedepan hendaknya menggunakan instrumen APBD untuk menanggulangan kemiskinan, penurunan stunting dan mnurunkan tingkat pengangguran. Rekomendasi oleh Gubernur: Mendorong percepatan pembahasan Ranperda Komisi Hukum Ad Hoc untuk mendukung penguatan tata kelola hukum di Provinsi Papua Selatan Rekomendasi bagi BP3OKP : Menjadikan masukan fraksi-fraksi sebagai bahan menjalankan fungsi SHEK terhadap pemerintah terkait Tusi BP3OKP dan Anggota Pokja Papua Produktif di provinsi Papua Selatan
Dokumentasi	   Suasana pada Sambutan Jawaban Gumernur oleh Asisten 1  Suasana Undangan di Lantai Dua Ruang Sidang Dewan  Tanggapan Fraksi Dewan Oleh Fraksi Partai-Partai

Kegiatan Ke-3: Upacara Peringatan HUT RI Ke-81	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/Tgl : Senin, 17 Agustus 2026, Pukul 07.00 WIT – selesai
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
☒ Surat Tugas/Sumber Kegiatan: Undangan Panitia Perayaan HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Yang ke 81 Provinsi Papua Selatan	
☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya	
Surat Tugas	
Nomor 49/BPP/PPS/VII/2026 	

GUBERNUR PAPUA SELATAN

Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan, dengan hormat dimohon kehadiran Bpk/Ibu/Sdr/i pada:

UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH
Senin, 17 Agustus 2026, Pukul 07.30 WIT, di Stadion Kataipai Merauke

dan

UPACARA PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH
Senin, 17 Agustus 2026, Pukul 16.00 WIT, di Stadion Kataipai Merauke

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

GUBERNUR PAPUA SELATAN

APOLO SAFANPO, ST., MT

Lokasi Kegiatan	Stadion Katalpal Merauke
Judul Kegiatan	Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kmerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan
Misi/Keterangan	Harmonisasi dengan Pimpinan Pemerintah Provinsi, Forkompimda, TNI/POLRI, Lembaga Kemasyarakatan, Pelajar/Mahasiswa dan masyarakat diprovinsi Papua Selatan dalam Upaca Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih dengan Thema : ***Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.***
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengisi kemerdekaan bangsa serta ikut memperjuangkan cita-cita bangsa.
Pelaksana Kegiatan	Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Merauke
Peserta Kegiatan/Sumber Dokumen	Forkompomda Provinsi, Bupati merauke MRP dan DPRP, Pimpinan Tinggi Pratama TNI dan POLRI BP3OKP/BPP PPS Lembaga Vertikal Pelajar/Mahasiswa Masyarakat

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kmerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan dengan: 1. Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Merah Putih 2. Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan Trikora Merauke, 3. Tabur Bunga di Dermaga Laut Merauke 4. Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Merauke 5. Resepsi Kenegaraan

Hasil/output Kegiatan

Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun diperingati dengan mengusung tema **"Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur"**. Tema ini menggambarkan semangat dan kerja nyata pemerintah mewujudkan cita-cita kebangsaan kita.

Berharapan untuk aparatur negara yang berperan menjalankan roda pemerintahan dapat menjadikan kemerdekaan sebagai momentum meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi antar instansi, dan memperkuat tekad dalam melayani bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya, sekaligus mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat di Provinsi Papua Selatan.

Sebanyak 52 anggota Paskibraka tingkat Provinsi Papua Selatan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Papua Selatan menjalankan tugas mengibarkan Sang Merah Putih. Sebelumnya telah dikukuhkan oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di halaman Gedung Negara Merauke pada 15 Agustus 2026







Foto Bersama Peserta Upacara BP3OKP Papua Selatan

Kegiatan Ke-4: Pleno Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/Tgl : Rabu, 19 Agustus 2026, Pukul 12.00 WIT – selesai

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026

☒ Surat Tugas/Sumber Kegiatan: Undangan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kemeterian/ Bappenas Nomor: T-18228/D.02/PP.03.03/08/2026

☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya

Surat Tugas

Undangan Nomor:

Lokasi Kegiatan	Kantor BP3OKP/BPP Papua Selatan Jl. Prajurit No. 1 Merauke Rapat Via Zoom: *Meeting ID*: 830 8362 5395; Passcode: BAPPENAS
Judul Kegiatan	Sesi Pleno Pembukaan Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026
Misi/Keterangan	BPP hadir untuk memastikan proses tersebut berjalan melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi atau SHEK. BPP tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Justru **memperkuat pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan penyelesaian berbagai hambatan agar program yang sudah direncanakan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan hasil.**
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	Melakukan Fungsi SHEK terhadap Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029 rata-rata sebesar 57% dan yang direkomendasikan dan Tidak Selaras sebesar 43%
Pelaksana Kegiatan	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan di Kementerian PPN/Bappenas
Peserta Kegiatan/Sumber Dokumen	**Provinsi Papua Selatan** 1. Gubernur 2. Bupati 5. Kepala Bappeda/Bapperida Provinsi 6. Kepala Bappeda/Bapperida Kabupaten 7. Kepala OPD Provinsi 8. Kepala OPD Kabupaten
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Sesi Pleno Pembukaan Pendampingan Perbaikan Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029
Hasil/output Kegiatan	

I. Kesepahaman Bersama

Proses perbaikan tata kelola perencanaan pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya terkait penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka percepatan pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri tentang Interoperabilitas Sistem Informasi Otsus Papua tanggal 3 November 2025, serta menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas tanggal 8 Juli 2026 tentang Atensi dalam Rangka Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua.

RAPPP 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk menerjemahkan arah pembangunan Papua dalam RIPPP ke dalam program dan kegiatan yang lebih konkret. RAPPP bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi harus menjadi **acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di Papua**. Bappenas sendiri menegaskan RAPPP sebagai guidance dan acuan agar pembangunan Papua lebih terarah dan terfokus.

II. Arahan Bappenas:

Sesuai mandat kepada Bappenas dalam rangka percepatan pembangunan papua, maka Kementerian PPN/Bappenas telah Menyusun:

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022– 2041 dengan Visi: Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Dan Misi: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif
2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 yang meliputi 19 Program Percepatan Pembangunan Papua mendukung misi Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Prasyarat Pembangunan
3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus pada tingkat kabupatan/kota dan provinsi yang selaras dengan RIPPP dan RAPPP
4. Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) Pembangunan Papua (SIPPP) SIPPP merupakan *platform* terpadu untuk memantau seluruh siklus pembangunan Papua dengan prinsip interoperabilitas yang terintegrasi dengan SIPD (Kemendagri) dan SIKD-Otsus (Kemenkeu).

RAPPP 2025-2029 dilaksanakan melalui musrenbang otsus menggunakan instrumen: Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

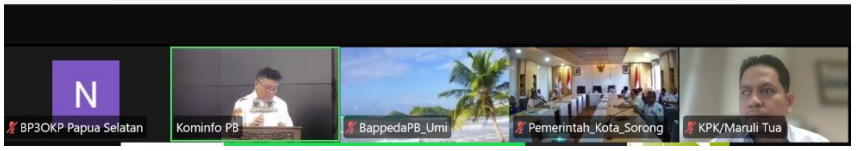
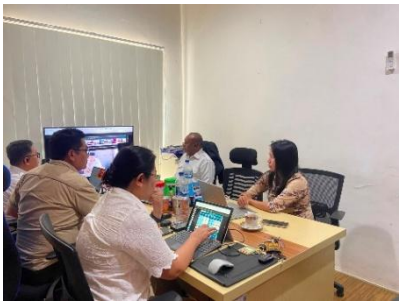
Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus pada tingkat kabupatan/kota dan provinsi, dalam rangka penyusunan program dan kegiatan prioritas yang didanai dari dana otonomi khusus, yang selaras dengan RIPPP dan RAPPP.

SIPPP menjadi knowledge hub untuk memantau perkembangan pembangunan Papua mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan.

SIPPP telah diintegrasikan dengan SIPD (Kemendagri) dan SIKD-Otsus (Kemenkeu) dengan prinsip interoperabilitas (berbagi pakai data).

Untuk menjaga relevansi dan keselarasan dengan dinamika yang ada, dibutuhkan Revisi Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musrenbang Otsus Provinsi Papua

Pelaksanaan Musrenbang Otsus menggunakan SIPPP, mulai dari tahap pengusulan hingga pembahasan.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	1. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Otsus adalah Berita Acara Kesepakatan yang memuat daftar sub kegiatan prioritas dan strategis sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Penerimaan dalam rangka Otsus tahunan. 2. Pendampingan penyelarasan dilakukan melalui tahapan perbaikan usulan oleh Pemerintah Daerah, review dan evaluasi oleh Tim Asistensi, serta pembahasan bersama untuk memastikan kesesuaian usulan dengan arah dan sasaran RAPPP 2025–2029. Proses ini menjadi bagian penting untuk menghasilkan usulan pembangunan daerah yang selarasdengan RAPPP, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. 3. Pembahasan Keselarasan, Kesesuaian, ketidaksesuaian dan perbaikan usulan pemerintah daerah akan dilakukan untuk masing-masing prvinsi dan kabupatenKota.
Dokumentasi	   BPP Papua Selatan pada Zoom: Marthinus, Fredi, Jaswadi, dr. Ira, dan  BPP Papua Selatan pada Zoom: Marthinus, Fredi, Jaswadi, dr. Ira, dan Ratmika

Kegiatan Ke-5: Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/Tgl : Kamis dan Jumat, 20 dan 21 Agustus 2026, Pukul 08.00 WIT – selesai
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
☒ Surat Tugas/Sumber Kegiatan: Undangan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kemeterian/ Bappenas Nomor: T-18232/D.02/PP.03.03/08/2026	
☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya	
Surat Tugas	

Undangan Nomor	
Lokasi Kegiatan	Kantor Bupati Merauke Jl. Brawijaya Merauke (tbc) (Breakout Room 6)
Judul Kegiatan	Asistensi Sesi Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026
Misi/Keterangan	BPP hadir untuk memastikan proses tersebut berjalan melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi atau SHEK. BPP tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Justru memperkuat pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan penyelesaian berbagai hambatan agar Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029 dapat mencapai 100%
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	Melakukan Fungsi SHEK terhadap Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029 dapat mencapai 100% %
Pelaksana Kegiatan	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan di Kementerian PPN/Bappenas
Peserta Kegiatan/Sumber Dokumen	**Provinsi Papua Selatan** 1. Bupati Mappi (via Daring) 2. Bupati Boven Digoel 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke 4. Kepala Bappeda/Bapperida Provinsi 5. Kepala Bappeda/Bapperida Kabupaten 6. Kepala OPD Provinsi 7. Kepala OPD Kabupaten

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Asistensi Sesi Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 agar Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029 dapat mencapai 100%

Hasil/output Kegiatan

FOKUS PERBAIKAN HASIL EVALUASI MUSRENBANG OTSUS TAHUN 2026 PROVINSI PAPUA SELATAN
Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Selatan telah mengunci Berita Acara Musrenbang Otsus pada SIPPP sehingga Pembahasan Ketidakselarasan usulan dengan RAPPP 2025-2029 dapat dilakukan. Terdapat 210 usulan pada Tingkat provinsi yang perlu diperbaiki, serta 33 usulan di Kabupaten Merauke, 49 usulan di Kabupaten Boven Digoel, 16 usulan di Kabupaten Mappi dan 50 usulan di Kabupaten di Kabupaten Asmat.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan:

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 380
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 170
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 210

Pemerintah Kabupaten Merauke

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 109
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 76
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 33

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 110
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 61
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 49

Pemerintah Kabupaten Mappi

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 76
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 60
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 16

Pemerintah Kabupaten Asmat

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 147
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 97
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 50

Agar Pemerintah Daerah melakukan perbaikan Daftar usulan yang direkomendasikan namun belum selaras dengan RAPPP 2025–2029 sebagai dasar identifikasi usulan yang perlu diperbaiki dengan mengacu kepada Referensi Usulan pada Daftar usulan/program/kegiatan/sub-kegiatan yang selaras dengan RAPPP 2025–2029 sebagai acuan penyesuaian atau penggantian usulan.

Instrumen Perbaikan yang telah Disampaikan kepada Pemerintah Daerah (14 Agustus 2026) meliputi:

1. Ketiga instrumen yang menjadi acuan bersama dalam proses perbaikan usulan, dengan Form Perbaikan menjadi bahan review Tim Asistensi terhadap usulan yang disampaikan pemda untuk memastikan keselarasan dengan RAPPP 2025–2029.
2. Data Usulan Tidak Selaras Daftar usulan yang direkomendasikan namun belum selaras dengan RAPPP 2025–2029 sebagai dasar identifikasi usulan yang perlu diperbaiki yang disampaikan kepada setiap Pemerintah Daerah sebagai Form Perbaikan untuk menyampaikan usulan hasil perbaikan, termasuk substansi usulan dan kesepakatan sumber daya/angggaran.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengklarifikasi hasil evaluasi, menyempurnakan usulan agar selaras dengan RAPPP 2025–2029, serta menyepakati hasil perbaikan dan tindak lanjutnya. Berita Acara Evaluasi Usulan hasil Musrenbang Otsus Tahun 2026 yang direkomendasikan dan Selaras di SIPPP oleh Bappenas dapat diinput pada SIKD Otsus Kemenkeu sebagai RAP Awal.
Dokumentasi	 Bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan  Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel  Bersama Pemerintah Kabupaten Asmat  Penutupan Kegiatan di Provinsi Papua Selatan

Kegiatan Ke-6: Rapat Tindak Lanjut Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/Tgl : Senin, 24 Agustus 2026, Pukul 08.00 WIT – selesai
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
☒ Surat Tugas/Sumber Kegiatan: Undangan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kemeterian/ Bappenas Nomor: T-18934/Dt.02.05/PP.03.03/08/2026	
☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya	
Surat Tugas	
Undangan Nomor	
Lokasi Kegiatan	Rapat via Zoom Meeting dari Kediaman Jl. Mangga Dua Merauke (Bertepatan dengan Hari Libr Resmi Pemerintah Provinsi Papua Selatan)
Judul Kegiatan	Rapat Tindak Lanjut Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan

	Musrenbang Otsus Tahun 2026
Misi/Keterangan	BPP hadir untuk memastikan proses tersebut berjalan melalui fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi atau SHEK. BPP tidak mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Justru memperkuat pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan penyelesaian berbagai hambatan agar Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029 dapat mencapai 100%
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	Melakukan Fungsi SHEK terhadap Tindak Lanjut Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 agar Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029 dapat mencapai 100%
Pelaksana Kegiatan	Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas
Peserta Kegiatan/Sumber Dokumen	**Provinsi Papua Selatan** 1. Bapperida Kabupaten Mappi 2. Bapperida Kabupaten Boven Digoel 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke 4. Kepala Bappeda/Bapperida Provinsi 5. Kepala Bappeda/Bapperida Kabupaten 6. Kepala OPD Provinsi 7. Kepala OPD Kabupaten
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 agar Hasil keselarasan usulan daerah yang direkomendasikan dan selaras dengan RAPPP 2025-2029 dapat mencapai 100%

Hasil/output Kegiatan

FOKUS PERBAIKAN HASIL EVALUASI MUSRENBANG OTSUS TAHUN 2026 PROVINSI PAPUA SELATAN

Pemerintah Provinsi Papua Selatan:

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 380
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 170
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 210
4. Perbaikan Hasil Pembahasan Desk: 10 usulan menjadi direkomendasikan dan Selaras : 180 usulan dicatat dalam Berita Acara
5. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras menjadi : 200 usulan

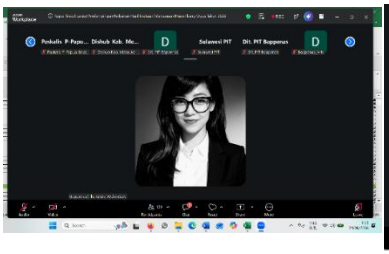
Pemerintah Kabupaten Merauke

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 109
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 76
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 33
4. Perbaikan Hasil Pembahasan Desk: 2 usulan menjadi direkomendasikan dan Selaras : 78 usulan dicatat dalam Berita Acara
5. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras menjadi : 31 usulan

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel

1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 110
2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 61
3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 49
4. Perbaikan Hasil Pembahasan Desk: 8 usulan menjadi direkomendasikan dan Selaras : 69 usulan dicatat dalam Berita Acara
5. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras menjadi : 41 usulan

Pemerintah Kabupaten Mappi 1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 76 2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 60 3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 16 4. Perbaikan Hasil Pembahasan Desk: 4 usulan menjadi direkomendasikan dan Selaras : 64 usulan dicatat dalam Berita Acara 5. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras menjadi : 12 usulan Pemerintah Kabupaten Asmat 1. Usulan Yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 : 147 2. Jumlah direkomendasikan dan Selaras : 97 3. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras : 50 4. Perbaikan Hasil Pembahasan Desk: 6 usulan menjadi direkomendasikan dan Selaras : 103 dicatat dalam Berita Acara 5. Jumlah Direkomendasikan dan Tidak Selaras menjadi : 44 usulan 1. Pelaksanaan Musrenbang Otsus Tahun 2026 dan Progres penginputan program, kegiatan dan subkegiatan di RKPD Tahun 2027 pada SIPD sudah dilakukan bersamaan dengan penginputan program, kegiatan dan subkegiatan di SIPPP melalui interoperabilitas Sistem yang Mengintegrasikan tiga platform besar, yaitu SIPPP (Perencanaan), SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dijalankan untuk perencanaan tahun 2027. Hal ini menyebabkan beberapa subkegiatan yang diinput pemerintah daerah belum mengacu kepada RAPPP Tahun 2024 – 2029. Dampaknya adalah dari sejumlah subkegiatan yang direkomendasikan untuk Tahun 2027 ada yang Selaras dan Tidak Selaras dengan RAPPP. Proses Selanjutnya adalah menginput program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dinyatakan DIREKOMENDASIKAN DAN SELARAS pada SIKD sebagai RAP Awal. 2. Subkegiatan yang Tidak Selaras dengan RAPPP lebih banyak yang sumber dananya dari dana Otsus 1% (Dana Otsus yang bersifat Umum). Dana Otsus 1 % sesuai pasal 12 PMK 33 Tahun 2024 terutama diperuntukan untuk membiayai: pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemerintah daerah sudah menggunakan beberapa subkegiatan dengan sumber dana Otsus 1% untuk membiayai program prioritas daerah dan kebutuhan urgen yang menyetuh langsung dengan kehidupan Masyarakat Orang Asli Papua beberapa Tahun sebelumnya. Sementara subkegiatan tersebut pada Interoperabilikas platform SIPPP yang mengakomodir RAPPP menjadi TIDAK SELARAS karena tidak tersedia pada REFERENSI pada SIPPP.	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	**1.** Untuk jangka Pendek pada perencanaan penggunaan dana Otsus Tahun 2027 adalah dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menetukan mekanisme diluar Interoperabilitas yang dapat menampung **SUBKEGIATAN YANG DIREKOMENDASIKAN NAMUN TIDAK SELARAS.** 2. Platform SIPPP perlu diupdate guna menampung program prioritas daerah dan kebutuhan urgen yang menyetuh langsung dengan kehidupan Masyarakat Orang Asli Papua yang diformulasikan melalui Program, Kegiatan dan subkegiatan pada sistem Interoperabilitas.

Dokumentasi	  Pemateri: Ibu Ika Wulandari (Bppenas)  Jadwal Desk

Kegiatan Ke-7: Rapat Bersama Tim Evaluasi Efektifitas Dana Otsus BPKP Papua di Kabupaten merauke	
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Hari/Tgl : Rabu, 26 Agustus 2026, Pukul 10.00 – 12.00 WIT
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	
☐ Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026	
☒ Surat Tugas/Sumber Kegiatan: Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Papua Nomor PE.09.02/S-711/PW26/3.1/2026	
☐ Insidentil : Sebutkan Alasannya	
Surat Tugas	
Undangan Nomor:	
Lokasi Kegiatan	Kantor BPP Papua Selatan, Jl Prajurit No. 1 Merauke
Judul Kegiatan	Diskusi Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Meraukedan Papua Selatan
Misi/Keterangan	Dana Otonomi Khusus Papua yang disediakan guna peningkatan kesejahteraan hidup orang asli papua di Papua harus terus diawasi oleh aparat pengawasan agar tepat sasaran dan berdampak nyata. Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke menjadi sarana melakukan pengawasan oleh BPKP Wilayah Papua.
Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	Tugas dan Fungsi BP3OKP/BPP adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua. BPKP dan BP3OKP akan melaksanakan fungsi masing-masing dengan berbagi informasi dan perkembangan pelaksanaan otonomi khusus papua.

Pelaksana Kegiatan	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua
Peserta Kegiatan/Sumber Dokumen	1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke 3. Ketua Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Selatan 4. Inspektur Kabupaten Merauke 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Merauke 6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Merauke 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Merauke 10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke 11. Kepala OPD Terkait Lainnya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Triwulan III Tahun 2026 oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan melaksanakan Evaluasi Efektivitas Dana Otonomi Khusus Triwulan III Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Merauke
Hasil/output Kegiatan	

BPKP Papua Berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengoptimalkan hasil pengawasan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi awal mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Papua di wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh informasi yang memadai sebagai dasar pelaksanaan evaluasi guna mendukung pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi dilakukan mulai dari Perencanaan dan Pelaksanaan guna Menilai apakah perencanaan program dan penggunaan Dana Otsus sudah sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

Pengawalan Akuntabilitas guna mengawasi tata kelola keuangan daerah agar transparan dan meminimalkan risiko penyimpangan.

Tata keleloa dana otsus yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, harus memenuhi Strategi Tata Kelola 5T yang meliputi :

Tepat Data: Validasi data penerima dan sasaran wilayah yang akurat.

Tepat Waktu: Ketepatan jadwal pencairan dan penyaluran anggaran ke daerah.

Tepat Sasaran: Alokasi anggaran yang benar-benar memihak Orang Asli Papua (OAP).

Tepat Kelola: Mekanisme keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

Tepat Manfaat: Dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengawasan Partisipatif: Pelibatan tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk mengawal penggunaan dana.

Pencegahan Korupsi dana Otsus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilaksanakan di Papua

Masukan: Tata kelola penggunaan dana otsus oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sudah berjalan baik. Yang menjadi masalaha adalah dampak dan manfaat di masyarakat masih jauh dari harapan. Selama ini pelaksanaan dana otsus oleh birokrat dengan sistem birokrasinya telah berjalan sejak awal adanya otsus sampai sekarang.

Sudah saatnya menggunakan mekanisme lain diluar sistim birokrasi, misalnya pihak lain seperti lembaga swadaya yang berbadan hukum yang selama ini memiliki pratek baik dama melksanakan pembangunan bersama orang asli papua.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	Rekomendasi: Penyelarasan Perencanaan: Menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Pendek Daerah dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua melalui SIPPP. Penguatan Pengawasan: Melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama guna mengawal penggunaan dana agar transparan dan tepat sasaran. Rekonsiliasi SiLPA: Melakukan sinkronisasi data Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta penggunaan yang program prioritas daerah Tindak Lanjut: Reformasi Kebijakan dengan melakukan pembenahan tata kelola Pendampingan KPK pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan dengan memperkuat sistem pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada seluruh pemerintah daerah di provinsi se-Papua. Penyusunan RAP SiLPA dengan meminta daerah segera menyusun Rencana Anggaran Program (RAP) SiLPA agar sisa anggaran dapat segera dieksekusi.
Dokumentasi	  Diskusi Bersama: BPP Papua Selatan dan BPKP Papua  Kunjungan Kerja BPKP Papua di BPP Papua Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF